

Dinamika Inklusivitas

Pemimpin Informal Lokal Bagi
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan



Dinamika Inklusivitas Pemimpin Informal Lokal bagi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Editor

Benny D. Setianto

Penulis

Benny D. Setianto

Adrianus Bintang Hanto Nugroho

Fidelis Aggiornamento Saintio

Ridwan Sanjaya

Theresia Dwi Hastuti

Andre Kurniawan Pamudji

Stephani Inggrit Swastini Dewi

Konsorsium Inklusi



Dinamika Inklusivitas

Pemimpin Informal Lokal
bagi Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Sepenggal Kata	ix
Kata Pengantar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pembentukan Konsorsium Inklusi	1
B. Latar Belakang Penulisan Modul Lokakarya Informal Pemimpin Lokal.....	2
BAB II KERANGKA KERJA KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	5
A. Kemajemukan Bangsa dan Negara Indonesia	5
B. Tata Regulasi Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.....	7

**BAB III PROSEDUR PENYELENGGARAAN LOKAKARYA
INFORMAL PEMIMPIN LOKAL 13**

A. Penentuan Lokasi	13
Ambon	14
Denpasar	16
Depok.....	17
Kupang	17
Manado	19
Surabaya.....	19
B. Kriteria Peserta.....	21
C. Kerjasama Pihak Ketiga.....	23

**BAB IV MATERI LOKAKARYA INFORMAL PEMIMPIN
LOKAL 25**

A. Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.....	25
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	26
2. Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik	27
3. Deklarasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	29
B. Manajemen Keberagaman Agama	31
1. Analisis Situasi Keberagaman Lokal	32
2. Pemetaan Aktor-Aktor Lokal dan Peranannya	36
3. Kepemimpinan puncak (<i>top leaders</i>).....	39

4. Kepemimpinan menengah (<i>middle-range leaders</i>)	39
5. Kepemimpinan akar rumput (<i>grassroots leaders</i>)	40
C. Manajemen Pengelolaan Konflik dan Perdamaian	43
1. Manajemen Krisis dan Konflik	43
2. Pengelolaan Komunikasi Antar-Aktor	56
D. Pemanfaatan Media Sosial untuk Tujuan Perdamaian	72
1. Pemetaan sumber-sumber informasi yang sah dan valid	72
2. Bagaimana cara mengatasi hal ini?	78
3. Strategi promosi keberagaman keber-agama-an	80
BAB V KISAH-KISAH SUKSES	85
A. Ambon	86
B. Denpasar	88
C. Depok	95
D. Kupang	128
E. Manado	151
F. Surabaya	176
BAB VI PENUTUP	185
Kontributor Tulisan	186

Sepenggal Kata

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang disusun oleh UNIKA Soegijapranata bersama dengan Konsorsium INKLUSI yang terdiri atas INFID, Unika Soegijapranata, PW Fatayat NU Jawa Barat, PW Fatayat NU Jawa Timur, Ma'arif Institute, Medialink, Setara Institute, dan Yayasan Inklusif. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengumpulkan cerita mendalam mengenai pentingnya toleransi dalam keberagaman agama dan kepercayaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih juga kepada tim program *Civil Society for Human Rights and Democracy* INFID yang telah mewujudkan penulisan modul bersama dengan para penulis, hingga buku ini hadir di tangan pembaca.

Buku *Dinamika Inklusivitas Pemimpin Informal Lokal bagi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* hadir di saat yang tepat. Saat semangat untuk kebhinekaan sedang menguat, baik di tingkat nasional maupun global. Saat dunia yang terus diuji untuk saling menghargai kekayaan akan keragaman itu sendiri, dan saat Indonesia terus bergerak memperkuat kebangsaan. Beragam dalam berbagai aspek, baik suku, golongan, kepercayaan, agama, adat-istiadat, dan lainnya

merupakan satu keniscayaan, namun sering kali keberagaman menghadapi tantangan yang kompleks.

Sebagai negara yang terdiri atas beragam bangsa dengan beragam budaya, adat istiadat, agama, dan keyakinan, Indonesia menjadi contoh tentang pentingnya menjaga nilai-nilai yang jamak. Kita memahami bahwa pandangan pluralisme tidak cukup hanya menjaga toleransi, namun dibutuhkan juga pelibatan aktif dan bermakna antar-kelompok yang berbeda untuk saling memahami perbedaan tersebut, sekaligus adanya dialog yang terbuka dalam menemukan semangat kebersamaan dari sekian perbedaan yang ada.

Buku ini memberikan panduan mengenai bagaimana dialog aktif tersebut dapat diselenggarakan, sekaligus juga memberikan cerita-cerita inspiratif tentang peran pemimpin lokal dalam menghidupkan nilai-nilai keberagaman. Kehadiran buku ini menunjukkan bahwa pemimpin Indonesia, terutama mereka yang bekerja di akar rumput, telah memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia.

Semoga buku ini menambah khazanah pengetahuan mengenai kebhinekaan Indonesia, sekaligus memberikan panduan untuk memperkuat ruas-ruas kebersamaan dalam beragama dan berkeyakinan. Selain juga terus mewarnai dan memperkuat cita-cita sebagai sebuah bangsa yang berdiri atas keberagaman. Buku ini sangat penting kita pelajari dan pahami bersama.

Jakarta, 27 Januari 2025

Siti Khoirun Ni'mah

Direktur Eksekutif INFID

Kata Pengantar (Editor Utama)

Sejak awal pendirian bangsa ini “Bhineka Tunggal Ika” disepakati sebagai semboyan yang menunjukkan keberagaman di bawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, pencantuman semboyan tersebut dalam lambang negara Garuda Pancasila maupun dokumen resmi kenegaraan tidak berarti bahwa narasi itu sudah final. Perjalanan untuk menyatukan perbedaan yang ada baik dari sisi budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat selalu memunculkan dinamikanya sendiri.

Sejarah mencatat, sejak negara ini diproklamasikan, upaya untuk memecah belah masyarakat berdasarkan suku dan golongan telah terjadi. Hal ini tampak dalam upaya perubahan ketatanegaraan dari Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat.

Dalam perjalanan bernegara, kerusuhan rasial juga terjadi beberapa kali. Kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pada zaman Orde Baru kadang masih terasa dampaknya hingga saat ini. Belum lagi konflik-konflik antar-etnis lain seperti Madura dan Dayak, mahasiswa Papua dan

warga lokal di beberapa kota, termasuk konflik antar-agama. Penolakan pembangunan rumah ibadah, gangguan pada saat menjalankan ibadah, perusakan rumah ibadah, dan kriminalisasi orang-orang yang dituduh melakukan penistaan agama sering kali terjadi dan dilakukan oleh umat mayoritas terhadap umat minoritas di beberapa daerah, terlepas dari siapa mayoritas dan minoritasnya.

Beberapa hal juga jarang diungkap, misalnya kelompok yang lebih kecil daripada yang selama ini disebut minoritas. Kami menyebutnya “mikro-minoritas”. Istilah itu kami gunakan untuk merujuk kepada kelompok yang: (1) secara kuantitas jumlahnya lebih kecil daripada kelompok minoritas; (2) tidak memiliki status sosial yang jelas, bahkan sering kali dianggap tidak ada; (3) sering kali tidak memiliki akses terhadap sumber daya, tidak bisa memiliki atau menguasai sumber daya tertentu di wilayahnya; dan (4) tidak memiliki daya untuk bersuara (*voiceless*) atau mengalami ancaman fisik maupun psikis ketika menyampaikan suara kelompoknya.

Modul ini berisikan “bahan ajar” sebagai pemahaman dasar terhadap hak-hak yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok individu terutama dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan yang bisa digunakan dalam lokakarya informal para pemimpin lokal. Modul ini tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana lokakarya itu harus dilakukan, serta hal-hal teknis lain dalam persiapannya. Namun demikian, modul ini memberikan contoh bagaimana Unika Soegijapranata sebagai anggota konsorsium Inklusif melakukan lokakarya di enam kota dengan karakteristik yang berbeda.

Kami berharap modul ini akan memberikan visi dan pemahaman yang sama tentang apa itu kebebasan beragama dan berkeyakinan, bagaimana rincian hak-hak yang dimiliki

sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta bagaimana memahami konflik dan mengelola konflik itu, termasuk dengan mengelola media sosial.

Semoga pemahaman yang sama tersebut akan mendorong para pemimpin informal lokal untuk dapat berkomunikasi dengan lebih baik, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing serta menemukan dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif termasuk dalam pelaksanaannya.

Untuk itulah, di bagian akhir kami memberikan kesempatan kepada para pemimpin lokal untuk bisa mengubah serta menambahkan kisah-kisah sukses yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Semoga harapan ini akan segera terwujud agar Indonesia menjadi semakin inklusif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pembentukan Konsorsium Inklusi

Konsorsium Inklusi diawali oleh organisasi masyarakat sipil ternama di Indonesia bernama INFID (International NGOs Forum on Indonesia Development). Organisasi yang eksis sejak 1985 ini didirikan untuk memperjuangkan pembangunan Indonesia dengan melakukan advokasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan bertugas mengumpulkan berbagai elemen jejaring untuk menyusun proposal bersama demi mendorong semakin diharganya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ada 7 (tujuh) organisasi lain yang pada perkembangannya terlibat dan membentuk konsorsium, dengan INFID sebagai koordinatornya, yaitu¹:

1. Fatayat NU Jawa Barat
2. Fatayat NU Jawa Timur
3. Ma'arif Institute
4. Medialink

1. Urutan ini dibuat secara alfabetis

5. Setara Institute
6. Unika Soegijapranata
7. Yayasan Inklusif

Kedelapan organisasi inilah yang kemudian membuat proposal kegiatan sesuai dengan kapasitas masing-masing lalu mengajukan proposal payung dengan judul:

“INKLUSI: Memberdayakan kepemimpinan untuk memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan (FoRB) dan masyarakat yang tangguh di sektor-sektor strategis utama: media massa, perusahaan milik negara, pemerintah daerah, pendidikan, kepemimpinan perempuan, dan media sosial”

Hasil yang diharapkan terwujud dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan kepemimpinan inklusi di kalangan media massa, perusahaan milik negara, pemerintah daerah, guru pendidikan Islam di sekolah menengah yang didanai publik, dan aktivis perempuan di organisasi Islam dalam mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta dalam melawan intoleransi dan ekstremisme kekerasan, melalui bidang pendidikan dan media sosial.

Dengan beragam kegiatan yang dilakukan, konsorsium ini kemudian disebut sebagai Konsorsium Inklusif.

B. Latar Belakang Penulisan Modul Lokakarya Informal Pemimpin Lokal

Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Konsorsium, setidaknya ada 4 (empat) luaran utama yang hendak dicapai dengan diikuti subluaran-subluaran: *pertama*, mendorong moderasi beragama serta kebebasan beragama dan

berkeyakinan di media massa daring (*online*) dan sekolah-sekolah. Pada kegiatan ini dilakukan pula serial diskusi untuk mendorong jurnalisme damai.

Kedua, penyusunan modul dan pelatihan LOVE bagi guru-guru sekolah agama agar semakin inklusif. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan survei bagi siswa-siswa dari sekolah berlatar belakang keagamaan tertentu tentang sikap toleransi dan inklusi di sekolah.

Ketiga, pelaksanaan beberapa kegiatan pelatihan, antara lain pelatihan advokasi kebhinekaan dan pelatihan kepemimpinan perempuan yang inklusif.

Luaran *keempat*, terakhir, berupa penyusunan modul pelatihan untuk mendorong dialog antar-agama serta menyelaraskan pemahaman dan komitmen untuk tindakan kolektif.

Modul ini mencakup hal-hal berikut:

1. Perspektif pluralisme nasional
2. Kepemimpinan strategis menuju pola pikir keragaman
3. Hak-hak dasar sehubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan
4. Pemenuhan hak asasi manusia sehubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan

Keberadaan modul ini diharapkan dapat dipakai sebagai panduan materi yang bisa diberikan kepada para pemimpin lokal untuk meningkatkan pengetahuan mereka agar lebih inklusif demi semakin terlindunginya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Teknis pelaksanaan modul diserahkan kepada penyelenggara lokal sehingga dapat disesuaikan dengan karakter daerah dan peserta yang hadir.

BAB II

KERANGKA KERJA

KEBEBASAN BERAGAMA DAN

BERKEYAKINAN

A. Kemajemukan Bangsa dan Negara Indonesia

Sejak awal munculnya kesadaran berbangsa hingga kemudian bernegara, Indonesia telah menyadari bahwa kemajemukan budaya adalah sebuah keniscayaan. Hal ini mencapai titik kulminasinya ketika orang-orang muda bertemu dan berkumpul mengadakan Kongres Pemuda II pada 1928.

Kongres ini digagas oleh perhimpunan pelajar Indonesia yang terdiri atas orang-orang muda yang tidak hanya mewakili berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga keragaman agama. Kongres yang diselenggarakan di Katholieke Jongenlingen Bond tersebut tercatat dihadiri antara lain oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemoeda Kaoem Betawi ditambah Jong Islamieten Bond serta Pemoeda Indonesia. Kongres inilah yang menghasilkan kesepakatan orang-orang muda yang senasib dan memiliki sejarah yang sama untuk membentuk sebuah bangsa yang dinamakan Indonesia.

Kemajemukan bangsa ini menjadi semakin menemukan bentuknya ketika di kemudian hari secara formal kemerdekaan

Negara Indonesia diproklamasikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menyebutkan semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda tetapi tetap satu) untuk menyatakan bahwa negara ini menjunjung tinggi keberagaman suku, etnis, warna kulit, bahasa, dan agama. Atas dasar itulah kemajemukan bangsa dan negara Indonesia adalah keniscayaan, seperti telah disebutkan pada paragraf awal.

Dalam sensus BPS tahun 2010 tercatat setidaknya ada 1.340 suku bangsa di Indonesia, dengan 41%-nya adalah suku Jawa, sementara di pedalaman Kalimantan dan Papua terdapat suku yang tercatat hanya berjumlah ratusan orang saja.

Di samping keberagaman suku, Indonesia juga merupakan surga bagi keberagaman agama, sekalipun fokusnya masih terbatas pada agama-agama yang justru tidak asli Nusantara. Terdapat enam agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di luar keenam agama tersebut, agama-agama lokal dikelompokkan sebagai aliran kepercayaan. Lembaga yang secara formal mengurus agama dan kepercayaan pun dibedakan. Kementerian agama bertugas untuk mengurus keenam agama yang diakui secara formal, sementara penganut aliran kepercayaan koordinasinya diserahkan kepada Dirjen Kebudayaan.

Meskipun demikian, terlepas dari agama-agama yang diakui, eksistensi agama-agama lokal dan aliran kepercayaan lainnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman dalam hal agama sehingga jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap dibutuhkan.

B. Tata Regulasi Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Secara hierarkis, diawali dari Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia, regulasi Indonesia diturunkan dengan menciptakan konstruksi dasar bangunan negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pemberian jaminan ini secara tegas mengatakan bahwa setiap penduduk (bukan hanya warga negara), termasuk warga asing yang berstatus penduduk di wilayah Republik Indonesia, memiliki kemerdekaan untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan dan meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur akan hal tersebut.

Pada Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam Pasal 22 disebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agama dan kepercayaannya

Sesuai dengan teks yang tersurat, undang-undang ini memperluas jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan tidak hanya kepada penduduk tetapi juga

kepada setiap orang. Penggunaan kata-kata yang semacam itu semakin menegaskan bahwa kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menjadi hak yang melekat kepada semua orang tanpa kecuali.

Secara tegas Indonesia menuliskan tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasarnya. Hal itu tertera dengan jelas pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa perlindungan bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia telah dijamin dan dilindungi secara konstitusional serta memberikan tanggung jawab kepada negara dalam proses penegakannya.

Dalam ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur hak asasi manusia, khususnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan secara khusus bahwa Negara Indonesia akan memenuhi segala kewajiban internasional atas perjanjian internasional yang diikutinya. Hal itu terlihat dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sejak 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang juga secara eksplisit mencantumkan kebebasan beragama dan

berkeyakinan. Sayangnya, dalam UU No. 12 Tahun 2005, kata *religion* yang muncul dalam teks asli ICCPR tidak ikut diterjemahkan (baca: dihilangkan), entah apa alasannya. Berikut adalah perbedaan teks asli dan terjemahan resmi dalam UU No. 12 Tahun 2005:

*In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, **religion** or social origin.*¹

Bandingkan dengan terjemahan resmi dalam UU No. 12 Tahun 2005 berikut:

Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh yang benar-benar dibutuhkan dalam situasi tersebut, asalkan langkah termaksud tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban mereka lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi yang semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau asal-usul sosial.²

1 Diunduh dari laman <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> pada tanggal 17 Januari 2022

2. Diunduh dari laman <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/>

Sangat disayangkan jika perbedaan terjemahan ini mengandung unsur kesengajaan. Seandainya bukan karena disengaja pun, hal ini sekaligus menunjukkan ketidaktepatan Negara dalam menerjemahkan undang-undang sebab nantinya pada ayat (2) juga disebutkan hak-hak dalam pasal mana saja yang tidak boleh dikurangkan kewajibannya. Salah satunya terdapat pada Pasal 18 yang memberikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ayat 2-nya berbunyi:

Pengurangan kewajiban atas Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan **18** sama sekali tidak dibenarkan oleh ketentuan ini.³

Sekalipun tidak boleh ada pengurangan kewajiban terhadap penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi beberapa ketentuan internasional memberikan peluang bagi pembatasan mengejawantahkan kebebasan tersebut dengan berbagai macam pertimbangan, seperti tertulis pada Pasal 18 ayat (3) dari ICCPR yang menyatakan:

Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.

[Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila

Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf pada tanggal 17 Januari 2022

3 *Ibid*, penebalan pada angka 18 dilakukan oleh penulis untuk penegasan

diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan/atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.]

Hal ini juga tertulis dalam deklarasi yang melarang tindakan intoleran dan diskriminatif berdasarkan agama dan keyakinan. Dalam Pasal 7 disebutkan:

The rights and freedoms set forth in the present Declaration shall be accorded in national legislation in such a manner that everyone shall be able to avail himself of such rights and freedoms in practice.

Artinya, sekalipun kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang tidak boleh dikurangi, Negara wajib melindungi sekaligus memiliki hak untuk mengatur bagaimana kebebasan tersebut bisa diejawantahkan. Tentu saja, pengaturan negara dilakukan untuk menjamin agar setiap orang bisa menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinannya dengan baik.

BAB III

PROSEDUR PENYELENGGARAAN LOKAKARYA INFORMAL PEMIMPIN LOKAL

A. Penentuan Lokasi

Lokakarya informal pemimpin lokal dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) karena melalui cara ini para peserta FGD yang berasal dari beragam latar belakang agama dan kepercayaan dapat mengemukakan pendapat, pandangan, informasi, serta pengetahuannya secara langsung di muka forum diskusi. Sementara itu peserta lain juga dapat memberikan reaksi balik dan tanggapan secara langsung. Dengan demikian, untuk mengelola kelancaran alur FGD dibutuhkan fasilitator yang menguasai isu yang sedang dibahas. Peran fasilitator dalam FGD sangatlah sentral yaitu untuk mengarahkan diskusi agar menghasilkan hal-hal yang berguna bagi penyelenggara maupun para peserta itu sendiri.

Unika Soegijapranata sebagai bagian dari konsorsium telah melakukan lokakarya FGD di enam kota yaitu Ambon, Denpasar, Depok, Kupang, Manado, dan Surabaya. Basis pemilihan keenam kota tersebut setidaknya didasarkan pada dua hal: **pertama**, statistik jumlah pemeluk agama dan kepercayaan di kota atau wilayah yang dipilih. Data jumlah

pemeluk agama yang didapat dari berbagai sumber formal dipakai untuk melihat perimbangan komposisi agama di suatu kota atau wilayah.¹ Asumsinya, perimbangan jumlah pemeluk agama turut memberi warna pada bentuk dan pola relasi antar-umat beragama di suatu kota atau wilayah sehingga penting untuk mencari tahu kelompok agama mana sajakah yang dominan dan non-dominan. **Kedua**, peristiwa sosial penting yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Peristiwa sosial yang dimaksud merupakan kejadian yang menjadi penanda dan dapat mempererat maupun mempertajam relasi antar-umat beragama di sebuah wilayah, misalnya konflik bernuansa agama.

Ambon

Ambon merupakan kota yang dipilih Unika Soegijapranata untuk menyelenggarakan FGD oleh karena faktor historis di mana pada akhir 1990-an sampai awal 2000-an di wilayah tersebut pernah terjadi konflik bernuansa agama. Saat itu konflik dipicu oleh perkelahian antara seorang sopir angkutan umum dan preman yang memalaknya di Terminal Mardika sehingga terjadilah konflik berdarah antara masyarakat Ambon yang beragama Kristen Protestan dan Islam.^{2 3 4 5} Meskipun demikian, rekonsiliasi melalui jalur formal yang bersifat *top-*

1. Sumber formal yang dimaksud yaitu Badan Pusat Statistik maupun sumber-sumber pemerintahan lainnya.

2. Lihat Van Klinken, G. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London and New York: Routledge.

3. Lihat Bertrand, J. 2003. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Lihat Braithwaite, J., et. al. 2010. *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Canberra: ANU Press.

5. Lihat Al Qurtuby, S. 2016. *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas*. London and New York: Routledge.

down maupun jalur kultural yang *bottom-up* berhasil diinsiasi oleh pemerintah dan pihak-pihak yang bertikai sehingga konflik dapat mereda dan terselesaikan.⁶ Meskipun konflik telah selesai lebih dari 20 tahun yang lalu namun hingga sekarang dampak dari konflik berupa trauma sosial yang difasilitasi oleh pewarisan narasi konflik antargenerasi dan segregasi pemukiman pasca-konflik masih terjadi.^{7 8 9} Yang menarik adalah meskipun residu psikososial pasca-konflik masih terjadi sampai hari ini namun Kota Ambon justru menjadi langganan kota paling toleran menurut riset Setara Institute.¹⁰

Secara statistik, pada 2022 BPS mencatat jumlah pemeluk Islam dan Kristen Protestan yang hampir berimbang di Kota Ambon. Agama Islam dipeluk oleh sekitar 142 ribu warga, sementara Kristen Protestan sekitar 200 ribu warga, pemeluk Katolik sekitar 8.700 warga, Hindu sekitar 270 warga, Buddha sekitar 130 warga, sementara 15 warga lainnya memeluk agama dan kepercayaan lainnya.¹¹

6. Lihat Brauchler, B. 2015. *The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

7. Lihat <https://crcs.ugm.ac.id/pewarisan-narasi-konflik-di-ambon/>

8. Lihat Ansori, M. H., dkk. 2014. *Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik di Ambon*. Jakarta: The Habibie Center.

9. Lihat Riyanto, G. 2023. Precarious Coexistence in Maluku: Fear and Trauma in Post-Conflict Christian-Muslim Relations. *Muslim Politics Review*, Vol. 2, No. 1, June 2023, 66-87.

10. Indeks Kota Toleran dapat diunduh dari <https://setara-institute.org/category/publikasi/laporan/>

11 Badan Pusat Statistik Kota Ambon. 2023. Kota Ambon Dalam Angka 2023. Hlm. 151.

Denpasar

Kota Denpasar dipilih oleh Unika Soegijapranata untuk menyelenggarakan FGD karena keunikan kota tersebut yang secara statistik didominasi oleh penduduk yang menganut agama Hindu. Menurut survei terakhir BPS pada 2022, jumlah penganut agama Hindu sebanyak 440 ribu lebih, Islam sekitar 147 ribu, Kristen Protestan sekitar 33 ribu, Katolik sekitar 15 ribu, Buddha sekitar 15 ribu, dan Konghucu sekitar 300 penganut.¹² Bali adalah episentrum pariwisata di Indonesia sehingga kota ini menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang untuk tinggal dan bekerja di sana, terutama di Denpasar sebagai pusat politik, pemerintahan, dan perdagangan di provinsi tersebut. Kedatangan orang-orang tersebut menyebabkan Denpasar menjadi lebih beragam secara demografis karena dihuni oleh berbagai orang dari beragam latar belakang sosial, agama, dan etnisitas. Meskipun secara historis Denpasar merupakan wilayah yang relatif damai dan tidak pernah mencatat kasus kekerasan atau kerusuhan berbasis agama atau etnis namun wilayah ini tampaknya sempat diwarnai oleh tensi pertentangan internal di kalangan umat Hindu sendiri. Demonstrasi penolakan terhadap aliran agama Hindu tertentu oleh umat Hindu Bali pernah terjadi beberapa waktu lalu.^{13 14 15 16 17} Kendatipun tidak sampai melibatkan

12. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2023. Kota Denpasar Dalam Angka 2023. Hlm. 100.

13. Lihat <https://www.medcom.id/foto/news/4bamQrBb-raturan-warga-bali-gelar-aksi-tolak-aliran-hare-krishna>

14. Lihat <https://fajarbadung.com/ribuan-umat-hindu-demo-tolak-ajaran-hare-krisna-hadir-di-bali/9237/2020/>

15. Lihat <https://radarbali.jawapos.com/bali/70841017/aksi-tolak-aliran-hk-dan-mosi-tak-percaya-awk-di-bali-berlanjut>

16. Lihat <https://www.nusabali.com/berita/78585/forkom-taksu-bali-gelar-aksi-damai-tolak-hare-krishna>

17. Lihat <https://mediaindonesia.com/nusantara/334789/phdi-didesak-keluarkan-hare-krisna>

kekerasan, namun aksi demonstrasi tersebut menggambarkan adanya pertentangan di dalam masyarakat penganut Hindu di Denpasar pada khususnya dan Bali pada umumnya.

Depok

Depok merupakan kota satelit Jakarta yang terus bertumbuh dan menarik banyak orang untuk tinggal di sana. Secara statistik, mayoritas warga Depok memeluk agama Islam. Menurut laporan BPS Depok pada 2021, ada sekitar 1,7 juta warga Depok beragama Islam, sekitar 90 ribu warga memeluk Kristen Protestan, sekitar 29 ribu memeluk Katolik, sekitar 5.300 memeluk agama Buddha, sekitar 3.000 warga memeluk Hindu, dan sekitar 2.100 lainnya memeluk berbagai agama dan kepercayaan lain.¹⁸ Meskipun demikian, dinamika keagamaan di kota ini juga dihidupi oleh berbagai komunitas keagamaan seperti Ahmadiyah, Syiah, maupun berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menariknya, sejak 2017, menurut riset yang dilakukan oleh Setara Institute, kota ini selalu menempati posisi sepuluh teratas kota dengan skor toleransi terendah.¹⁹ Hal inilah yang mendasari tim Unika Soegijapranata memilih untuk menyelenggarakan FGD di Kota Depok.

Kupang

Selain memilih kota-kota yang secara statistik didominasi oleh

18. <https://depokkota.bps.go.id/statictable/2022/09/20/155/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-depok-2021.html>

19. Berbagai laporan Indeks Kota Toleran yang dikeluarkan oleh Setara Institute sejak tahun 2017 dapat dilihat dan diunduh dari <https://setara-institute.org/category/publikasi/laporan/>

pemeluk agama Islam, Unika Soegijapranata juga mencari kota-kota yang dihuni oleh warga yang mayoritasnya memeluk agama Kristiani, baik Kristen Protestan maupun Katolik. Kota Kupang memiliki fenomena unik sebab, berbeda dengan Depok dan Surabaya, mayoritas warga Kupang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan. Menurut data survei terakhir pada 2022, sekitar 357 ribu warga Kupang beragama Kristen Protestan, 183 ribu lebih warganya memeluk Katolik, hampir 60 ribu warganya memeluk Islam, sekitar 6.000 warga memeluk Hindu, lebih dari 100 warga memeluk Buddha, sementara penganut agama dan kepercayaan lainnya tidak ditemukan di kota ini.²⁰

Secara historis, penduduk asli Kupang umumnya beragama Kristen Protestan, sedangkan warga yang beragama Katolik merupakan migran atau keturunan migran yang biasanya berasal dari Pulau Flores maupun wilayah-wilayah interior Pulau Timor. Warga yang memeluk Islam juga pada umumnya adalah migran atau keturunan migran yang berasal dari wilayah-wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Flores, Solor, dan Adonara, atau dari wilayah lain di Indonesia seperti Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, warga Kupang yang beragama Hindu umumnya merupakan migran atau keturunan migran yang berasal dari Bali. Kupang adalah kota yang beragam baik secara agama dan etnisitas. Menariknya lagi, sejak 2018 kota ini selalu berhasil menempati posisi sepuluh teratas kota tertoleran menurut riset Setara Institute.²¹

20. Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2023. Kota Kupang Dalam Angka 2023. Hlm. 139.

21. Indeks Kota Toleran dapat diunduh dari <https://setara-institute.org/category/publikasi/laporan/>

Manado

Manado menjadi kota yang dipilih selanjutnya karena kota ini merupakan kota yang secara tradisional dihuni oleh mayoritas warga beragama Kristen Protestan. Secara statistik, warga Manado yang memeluk agama Kristen Protestan tercatat lebih dari 300 ribu jiwa, sekitar 147 ribu warga memeluk Islam, 25 ribu memeluk Katolik, 3.000 warga memeluk agama Buddha, dan sekitar 800 warga memeluk agama Hindu.²² Sama seperti Kota Kupang yang selalu berhasil masuk dalam peringkat teratas dari sepuluh kota paling toleran di Indonesia, Manado sejak 2017 selalu mampu menempatkan diri di jajaran kota-kota paling toleran menurut riset Setara Institute.²³ Meskipun demikian, jika kita cermati, setidaknya melalui pemberitaan di media-media elektronik, Kota Manado pernah menjadi lokasi penolakan pendirian dua rumah ibadah (masjid) pada 2016 silam.^{24 25 26} Hal ini menarik sebab Kota Manado hanya membutuhkan waktu kurang lebih setahun untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut sehingga sejak 2017 hingga hari ini kota itu menjadi salah satu kota paling toleran di Indonesia.

Surabaya

Pada mulanya Unika Soegijapranata memilih Sampang, Madura, menjadi kota tujuan penyelenggaraan lokakarya

22. Badan Pusat Statistik Kota Manado. 2023. Kota Manado Dalam Angka 2023. Hlm. 108.

23. Data Indeks Kota Toleran dapat diunduh dari <https://setara-institute.org/category/publikasi/laporan/>

24. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016.

25. <https://rumahbersama.id/post/264>

26. <https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/telaah-demonstrasi-masjid-al-khairiyah-di-eks-kampung-texan-manado-3FV8k>

FGD. Hal ini dikarenakan pada akhir Agustus 2012 terjadi kekerasan fisik berupa penyerangan, pembakaran rumah, dan pengusiran terhadap penganut Syiah di Sampang sehingga tim Unika menilai Sampang menjadi tempat yang tepat untuk menyelenggarakan FGD.²⁷ Namun demikian, karena situasi yang tidak memungkinkan maka tim Unika akhirnya memilih untuk beralih ke Surabaya.

Kota yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan menjadi pusat perdagangan serta politik di bagian timur Pulau Jawa ini dipilih karena ia merupakan kota metropolitan yang secara statistik didominasi oleh populasi pemeluk agama Islam yakni sekitar 2,5 juta orang, 250 ribu lebih warga menganut Kristen Protestan, sekitar 114 ribu warga memeluk Katolik, sekitar 39 ribu warga memeluk agama Buddha, sekitar 6.500 warga memeluk Hindu, dan 900 warga memeluk agama dan kepercayaan lainnya.²⁸

Surabaya merupakan rumah bagi beragam orang dari berbagai latar belakang agama yang datang dan menetap serta membentuk relasi sosial sehari-hari di antara mereka. Selain menjadi tempat tinggal dari penganut keenam agama yang secara formal diakui oleh negara, Surabaya juga dihuni oleh orang-orang yang menganut agama, aliran agama, maupun kepercayaan lain seperti Bahá'í, Ahmadiyah, Syiah, dan berbagai komunitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).

27. Tempo.co. (2012, 27 Agustus). *Kronologi Penyerangan Warga Syiah di Sampang*. <https://nasional.tempo.co/read/425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang>

28. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2023. *Kota Surabaya Dalam Angka 2023*. Hlm. 144.

B. Kriteria Peserta

Unika Soegijapranata memiliki beberapa kriteria dalam mencari peserta FGD, yaitu:

- 1. Pelibatan seluruh elemen keagamaan lokal di setiap kota:** Langkah pertama yang diambil adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok agama yang ada di suatu kota. Kelompok-kelompok ini dapat mencakup enam agama yang secara resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam praktiknya, Unika Soegijapranata mengundang perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabuddhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).
- 2. Pelibatan unsur-unsur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:** Dalam setiap FGD, Unika Soegijapranata selalu berupaya melibatkan kelompok-kelompok kepercayaan di setiap kota dengan mengundang perwakilan dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).
- 3. Pelibatan kelompok-kelompok keagamaan yang secara statistik maupun sosial tergolong sebagai kelompok mikro-minoritas:** Di dalam FGD, Unika Soegijapranata selalu melibatkan kelompok-kelompok agama yang secara teologis maupun sosiokultural dikategorikan sebagai kelompok yang terpinggirkan (dalam konteks lokal). Hal ini penting dilakukan untuk menggali pengalaman dan perspektif dari kelompok-kelompok yang selama ini tidak mampu bersuara di ruang-ruang publik seperti Ahmadiyah

dan Syiah di Surabaya, Depok, Ambon, serta Yahudi dan kepercayaan Malesung di Manado.

4. **Pelibatan kaum muda, khususnya dari organisasi kemahasiswaan:** Unika Soegijapranata selalu mengundang organisasi-organisasi kaum muda terutama dari unsur mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kategori usia di antara para peserta.
5. **Pelibatan berbagai kantor surat kabar lokal:** Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran situasi keberagaman lokal dari perspektif media, misalnya *Radar Bali*, *Pos Kupang*, dan *Ambon Ekspres*.
6. **Pelibatan organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal:** Partisipasi mereka penting karena organisasi-organisasi ini biasanya memiliki pengalaman serta cakupan luas dalam konteks dinamika sosial dan keagamaan di tingkat lokal, contohnya Yayasan Inklusif dan Institut Tifa Damai Maluku.
7. **Dalam setiap FGD, Unika Soegijapranata selalu berupaya menjaga keseimbangan gender di antara peserta:** Unika Soegijapranata juga mengundang organisasi-organisasi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses FGD, seperti Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (Puan Hayati), Fatayat Nahdlatul Ulama, dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI).

C. Kerjasama Pihak Ketiga

Dalam menyelenggarakan FGD, Unika Soegijapranata selalu menjalin kerjasama dengan mitra lokal di masing-masing kota. Mitra tersebut merupakan individu atau organisasi lokal yang memiliki pengalaman dan jejaring di masing-masing kota. Dengan melibatkan mereka lebih jauh, proses pemetaan situasi keberagaman di tingkat lokal dapat dilakukan secara lebih tepat karena bagaimanapun individu dan organisasi tersebutlah yang memiliki pengetahuan mengenai situasi dan jaringan aktor keagamaan lokal. Adapun mitra lokal yang diajak untuk bekerjasama yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Universitas Sam Ratulangi di Manado, Universitas Udayana di Denpasar, Universitas Nusa Cendana di Kupang, dan Institut Tifa Damai Maluku di Ambon.

BAB IV

MATERI LOKAKARYA

INFORMAL PEMIMPIN LOKAL

A. Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Tata cara kehidupan beragama dan berkeyakinan yang berbeda antarkomunitas, termasuk manifestasi dan ekspresi sikap-sikap keberagaman, menjadi bagian yang harus dihormati dan tidak bisa dipisahkan dari sikap inklusif itu sendiri. Bahkan, pada tataran lebih lanjut, sikap saling menerima perbedaan tidaklah cukup, melainkan juga dibutuhkan sikap berani melindungi jika ada pihak-pihak lain yang berusaha menghalangi kelompok-kelompok yang tata cara agamanya berbeda ingin memanasifestasikan kehidupan agama dan keyakinannya.

Untuk itulah, pemahaman universal yang lebih menyeluruh tentang hak asasi manusia dan segala turunannya—mulai dari berbagai macam perjanjian internasional hingga regulasi nasional—sebaiknya dimiliki oleh para pemimpin lokal agar bisa bersikap lebih inklusif. Hak-hak dasar yang melekat pada kehidupan manusia karena kemanusiaannya akan mendorong sikap menerima perbedaan-perbedaan yang ada.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menjadi moralitas baru bagi masyarakat global. Hal ini tampak dalam kesepakatan negara-negara untuk mendeklarasikan hak asasi manusia sebagai nilai universal pada 10 Desember 1948. Mendapatkan mandat dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB), terdapat 18 orang yang ditugaskan untuk menyusun serangkaian hak yang melekat pada manusia.

Dipimpin oleh Eleanor Roosevelt, janda dari mendiang Franklin D. Roosevelt, komite ini beranggotakan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, antara lain Rene Cassin dari Prancis yang menjadi perancang dasar dari deklarasi tersebut. Selain itu, Charles Malik dari Lebanon juga tercatat sebagai anggota aktif. Belum lagi Peng Chung Chang dari China yang diberi kepercayaan menjadi wakil ketua, mendampingi Eleanor.

Akhirnya, dengan Resolusi Majelis Umum nomor 217 A (III) yang dihadiri oleh 50 anggota PBB saat itu dikumandangkanlah pernyataan semesta berisi 30 pasal yang memberikan daftar hak yang dimiliki manusia karena hakikat kemanusiaannya. Salah satu hak asasi manusia yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (*Freedom of Religion and Belief*).

Pengakuan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara lengkap berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan

untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.¹

Di dalam pasal tersebut tergambar secara tegas bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama sesuai dengan pikiran dan hati nurani masing-masing. Berdasarkan hal itu maka menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak tersebut.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak kebebasan dan berkeyakinan terkadang menjadi lebih rumit jika menyangkut juga kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan. Hal ini dikarenakan doktrin agama atau kepercayaan sering kali melarang tindakan tersebut, terutama jika itu berarti “keluar” dari agama tersebut. Sebaliknya, pergantian atau perpindahan agama atau kepercayaan dianggap lazim—mungkin malah dianjurkan—jika orang luar (sebelumnya beragama lain) berpindah ke agama mereka.

2. Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik

Sebagai sebuah perlindungan moral, apa yang tertuang dalam Pasal 18 DUHAM akhirnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah negara-negara sepakat untuk membuat perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*) 17

1. Terjemahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diunduh dari laman [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 17 Januari 2022

tahun setelah DUHAM dideklarasikan.

Dengan nomor pasal yang sama, perjanjian internasional ini (ICCPR) menyatakan secara lebih detail bahwa²:

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan, dan pengajaran.
- b. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- c. Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan/atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- d. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 18 ICCPR tersebut, tampak bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan juga memberi

2. Terjemahan ICCPR dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, diunduh dari laman <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf> pada tanggal 17 Januari 2022

perlindungan agar tidak terjadi pemaksaan sekaligus memunculkan tanggung jawab bagi negara untuk memberikan jaminan terhadapnya.

Sekalipun tidak terlibat secara langsung pada pelaksanaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sejak 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang justru memberikan tanggung jawab kepada negara dan mengikatnya secara hukum.

3. Deklarasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perkembangan kebebasan beragama dan berkeyakinan ternyata tidak hanya berhenti pada Pasal 18 dari ICCPR saja, tetapi lebih didetailkan lagi dalam deklarasi yang secara khusus berkeinginan menghapuskan segala bentuk tindakan yang tidak toleran dan diskriminatif yang disandarkan pada agama dan keyakinan.

Melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 36 (LV), yang telah dideklarasikan pada 25 November 1981, terdapat upaya untuk menghapuskan segala bentuk tindakan intoleran dan diskriminatif yang didasarkan pada agama dan keyakinan.

Dengan mempertimbangkan semangat bahwa semua manusia itu setara, deklarasi ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang diskriminatif atas dasar apa pun harus dilarang, termasuk perbedaan agama dan keyakinan.

Lebih lanjut, ditegaskan pula dalam deklarasi ini bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam kategori hak-hak mendasar untuk mendukung kehidupan sehingga tidak termasuk hak yang bisa dikurangi.

Meski hanya terdiri atas 8 (delapan) pasal, deklarasi ini menyebutkan daftar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan serta mendorong negara untuk membuat kebijakan demi mencegah terjadinya tindakan yang intoleran dan diskriminatif atasnya. Hak-hak tersebut adalah³:

- a. Kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama
- b. Kebebasan untuk memeluk, mengubah, menolak suatu agama dan keyakinan
- c. Bebas untuk tidak dipaksa memeluk, mengubah, atau menolak suatu agama dan keyakinan
- d. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama dan keyakinannya
- e. Kebebasan untuk beribadah
- f. Kebebasan untuk memiliki tempat ibadah
- g. Kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol keagamaan dan keyakinannya
- h. Kebebasan untuk menjalankan hari raya keagamaan dan keyakinan sebagai hari libur
- i. Kebebasan untuk menunjuk pemuka-pemuka agama dan keyakinannya sendiri
- j. Kebebasan untuk mengajarkan dan menyebarkan agama dan keyakinannya
- k. Kebebasan bagi orang tua untuk mengajarkan moralitas berdasarkan agama dan keyakinan orang tua
- l. Kebebasan untuk mendaftarkan agama dan keyakinannya dalam urusan administratif negara

3. Diunduh dari laman <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx> pada tanggal 17 Januari 2022

- m. Kebebasan untuk menjalin relasi dan berkomunikasi dengan sesama pemeluk agamanya baik secara nasional maupun internasional
- n. Kebebasan untuk mendapatkan sumbangan dan melakukan tindakan pemberian bantuan atas nama kemanusiaan
- o. Kebebasan untuk menulis, berpendapat, atau berekspresi sesuai dengan agama dan keyakinannya

Secara khusus, deklarasi ini memberikan tugas kepada negara untuk:

- a. Melakukan berbagai tindakan dan kebijakan yang efektif untuk menjamin terlaksananya hak dan kebebasan yang dilindungi oleh deklarasi ini
- b. Menerbitkan aturan perundang-undangan yang mencegah terjadinya perilaku diskriminatif dan intoleran atas dasar agama dan keyakinan
- c. Melakukan pengaturan agar sumber daya yang dimiliki negara dapat memenuhi hak dan kebebasan yang dimandatkan oleh deklarasi ini

B. Manajemen Keberagaman Agama

Keberagaman agama adalah keniscayaan sosial dan realitas budaya yang tidak dapat dielakkan. Di tempat tinggal kita masing-masing, kita tidak hanya hidup bersama dengan orang-orang yang berasal dari budaya dan agama yang sama, melainkan juga dengan orang lain dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

Dalam praktiknya, kita tentu akan bersentuhan bahkan membangun relasi sehari-hari dengan orang yang berbeda di berbagai jenjang; mulai dari jenjang terbawah seperti rukun

tetangga (RT), rukun warga (RW), ke jenjang yang lebih luas yaitu desa atau kelurahan hingga kota atau kabupaten. Selain di lingkungan tempat tinggal, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita juga berjumpa dan berelasi dengan berbagai orang di berbagai lokasi dan situasi, seperti di sekolah, lingkungan kerja, pasar, atau kantor-kantor pemerintahan ketika mengurus administrasi kependudukan. Orang-orang yang berbeda agama dengan kita sangat mungkin adalah tetangga kita, teman masa kecil kita, guru anak kita, atau rekan kerja kita yang memiliki kedekatan jarak dan emosional dengan kita, atau bisa jadi orang-orang yang berbeda agama dengan kita itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal secara pribadi namun memiliki pengaruh di masyarakat seperti tokoh masyarakat, rohaniwan, pejabat pemerintah, atau tokoh politik di tingkat lokal.

Untuk membangun relasi yang damai dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita maka kita perlu mengelola keberagaman agama di wilayah tempat kita tinggal dengan baik. Oleh karenanya pada bagian ini kita akan belajar tentang dua hal yaitu: **pertama**, bagaimana menilai situasi keber-agama-an di wilayah tempat kita tinggal, dan **kedua**, memetakan siapa saja orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan apa saja peran mereka.

1. Analisis Situasi Keberagaman Lokal

Situasi keberagaman lokal menjadi faktor penting yang membentuk relasi-relasi yang bersifat damai atau konflikual di suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan terjadi sebab agama sering kali menjadi penanda identitas yang amat kuat bagi individu maupun kelompok individu dalam masyarakat.

Identitas keagamaan yang dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat material saja, seperti pengakuan keyakinan secara formal dalam administrasi kependudukan dan pemberlakuan praktik ritus-ritus keagamaan, melainkan juga aspek-aspek non-material seperti nilai dan norma agama yang membentuk cara berpikir para pengikut suatu agama dalam menafsirkan berbagai kejadian di lingkungan sekitarnya. Hal-hal yang bersifat non-material tersebut pada akhirnya justru mewarnai bahkan membentuk pola interaksi baik secara damai atau konfliktual antar-individu dan kelompok individu yang berbeda agama dalam masyarakat di suatu wilayah. Kita dapat menggunakan pengetahuan akan situasi keberagaman di suatu wilayah sebagai pintu masuk untuk menggambarkan dinamika sosial yang lebih luas dan mendalam di wilayah tersebut. Oleh karenanya amat penting bagi kita untuk memahami situasi keberagaman di wilayah tersebut secara utuh.

Ada beberapa hal yang dapat dipakai untuk membantu kita memahami situasi keberagaman di suatu wilayah. Hal **pertama** yang harus kita cermati adalah **komposisi demografis** pemeluk agama di suatu wilayah. Meskipun secara normatif negara mengakui tiap-tiap individu secara setara, terlepas apa pun latar belakang agamanya, namun dalam realitasnya kita tentu kerap menjumpai bahwa angka demografis pemeluk agama berpengaruh pada bentuk relasi antar-pemeluk agama di suatu wilayah. Jamak terjadi kelompok pemeluk agama yang secara statistik mayoritas menjadi kelompok dominan yang memiliki pengaruh kuat secara sosial, politik, dan kultural. Sebaliknya, bagi kelompok agama yang berjumlah sedikit, pengaruh yang mereka miliki tidaklah cukup berarti.

Hal **kedua** yang mesti kita telisik adalah aspek **historis**, yaitu apakah di masa lalu pernah terjadi konflik antar-pemeluk agama atau sebaliknya pernah terjadi situasi damai dan harmonis di suatu wilayah. Dalam konteks ini apa yang pernah terjadi di masa lalu dapat memengaruhi perkembangan bentuk relasi antar-kelompok agama di masa sekarang melalui pewarisan trauma, dendam, kecurigaan, ketakutan, atau sebaliknya melalui praktik keterbukaan, kesetaraan, saling mengakui, dan menghormati.

Ingatan kolektif tentang konflik dan perdamaian di masa lalu, kendati situasi yang dimaksud sudah lama berlalu, dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui perbincangan-perbincangan informal (*communicative memory*) di dalam pertemuan-pertemuan di meja makan, warung-warung, ataupun ruang-ruang keluarga di dalam rumah. Ingatan-ingatan komunal semacam itu juga dapat diwariskan melalui acara-acara peringatan konflik dan perdamaian yang dilembagakan secara formal (*cultural memory*) oleh masyarakat seperti peringatan yang diadakan secara tahunan oleh kelompok agama, warga desa, dan kelompok masyarakat lain yang terdampak.

Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kelompok individu dari suatu agama atau individu penganut suatu agama, baik yang pernah terlibat secara langsung dalam situasi damai dan konflik di masa lalu atau yang tidak terlibat sama sekali, membangun **persepsi** atas peristiwa historis di masa lalu. Persepsi yang dibangun adalah tentang peristiwa itu sendiri maupun tentang aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut, terutama yang berasal dari kelompok agama yang berbeda. Persepsi atas peristiwa di masa lalu dapat menjadi faktor pembentuk relasi antar-aktor yang berbeda agama di

masa sekarang. Persamaan dan perbedaan persepsi di antara para aktor dapat memengaruhi perkembangan situasi masa sekarang: apakah menjadi situasi yang damai atau konfliktual.

Hal **ketiga** yang harus kita amati adalah bagaimana bentuk **struktur organisasi** internal dari kelompok-kelompok agama yang terlibat dalam membangun relasi damai atau konflik di suatu wilayah. Kita dapat membedakan struktur organisasi keagamaan dari apakah organisasi tersebut bersifat hierarkis dengan garis koordinasi vertikal yang kaku menuju satu pemimpin tunggal, atau sebaliknya justru bersifat desentralistik dengan simpul-simpul kepemimpinan yang tersebar.

Bentuk struktur suatu organisasi kerap kali turut menentukan bagaimana cara organisasi dan para anggotanya **berelasi** dengan individu dan kelompok individu (atau organisasi) dari agama lain maupun **bereaksi** terhadap sebuah situasi. Organisasi yang bersifat hierarkis bisa jadi cenderung lebih formal dan terstruktur dalam membangun relasi, sebaliknya organisasi yang bersifat desentralistik sangat mungkin relatif lebih spontan dan lentur dalam berjumpa dengan kelompok lain.

Dalam konteks penyelesaian konflik, kita dapat memperkirakan kepada siapa kita pertama-tama harus membangun komunikasi. **Saluran komunikasi** dan **otoritas** dari organisasi yang hierarkis cenderung lebih dapat dengan cepat dikenali dan lebih mudah dijangkau karena bersifat tunggal dan terpusat, sedangkan pada organisasi yang bersifat desentralistik individu-individu pemegang otoritas relatif menyebar sehingga memunculkan saluran komunikasi yang lebih banyak dan kompleks.

2. Pemetaan Aktor-Aktor Lokal dan Peranannya

Setelah melakukan analisis tentang situasi keberagamaan di suatu wilayah maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap aktor-aktor lokal dan peranan mereka dalam membangun relasi antar-agama di wilayah itu. Aktor yang dimaksud adalah siapa saja yang bertindak secara aktif maupun pasif dalam relasi antar-agama, baik aktor individu maupun aktor kelompok individu/ organisasi. Sedangkan relasi antar-agama yang dimaksud dapat berupa relasi positif yang menghasilkan situasi damai maupun relasi negatif yang menghasilkan situasi konflik.

Kita dapat mulai melakukan pemetaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut:

- **Siapa saja yang terlibat dalam membangun relasi damai atau konflik di suatu wilayah?**

Pertanyaan pertama itu kita lontarkan dengan maksud untuk memandu kita masuk ke dalam labirin pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam relasi antar-agama. Dengan menjawab pertanyaan pertama, kita dapat mengetahui siapa saja yang secara **aktif** dan **pasif** memberi bentuk pada relasi-relasi antar-agama, baik itu secara damai atau konfliktual. Jawabannya tentu saja variatif, tergantung konteks relasi antar-agama di suatu wilayah. Misalnya, kita dapat menemukan bahwa ketua RT menjadi aktor yang secara aktif berupaya membangun hubungan damai antarwarga, namun di sisi lain kita juga menemukan ada tokoh pemuda setempat yang berpengaruh yang justru secara aktif membangun relasi yang konfliktual dengan cara menghasut warga. Selain itu kita juga mungkin menemukan bahwa dalam situasi konflik beberapa orang yang tinggal dekat dengan lokasi konflik memilih untuk diam dan menghindar dari situasi itu.

Dari jawaban-jawaban yang didapatkan tersebut kita bisa membangun penilaian awal tentang siapa saja yang bertindak sebagai aktor yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam membangun relasi-relasi yang damai atau konfliktual di suatu wilayah. Orang-orang tersebut sangat mungkin akan menjadi aktor kunci bagi perkembangan situasi selanjutnya yaitu apakah akan berkembang menjadi semakin damai atau semakin konfliktual. Selain itu orang-orang yang mulanya enggan terlibat secara aktif pada perkembangan situasi berikutnya justru dapat mengambil peran yang lebih aktif, baik secara positif (mendorong situasi konfliktual menjadi lebih damai) atau sebaliknya.

- **Siapa saja yang menjadi pihak yang paling berkepentingan dan kurang berkepentingan dalam membangun situasi damai atau konflik di wilayah kita?**

Pertanyaan **kedua** kita lontarkan untuk memetakan siapa saja yang memiliki kepentingan, baik secara sosial-politik, kultural, maupun ekonomi terhadap situasi damai atau konflik. Mereka yang sangat berkepentingan terhadap situasi yang berkembang tersebut biasanya menjadi penyokong yang kuat bagi para aktor yang terlibat secara aktif atau justru malahan mereka sendiri aktif terlibat di dalam membentuk situasi damai atau konflik di suatu wilayah.

Orang-orang yang berkepentingan terhadap terciptanya perdamaian dapat kita jadikan mitra untuk menjaga agar situasi tetap damai atau untuk mendorong perubahan dari situasi konflik menjadi damai. Sebaliknya, kita juga harus melakukan **pendekatan bertahap** terhadap mereka yang berkepentingan agar situasi konflik tetap terjadi. Hal ini harus dilakukan agar kita tetap dapat menjalin relasi dengan mereka.

Pendekatan ini penting sebab dengan melibatkan mereka dalam perbincangan tentang situasi konflik yang sedang terjadi kita dapat mengerti bagaimana **perspektif** mereka terhadap situasi yang berkembang. Selibhnya kita juga dapat menggunakan perspektif tersebut untuk membantu menyelesaikan konflik. Kita harus membangun **relasi dan komunikasi**, baik dengan mereka yang sejalan dengan kita maupun juga dengan mereka yang tidak sejalan dengan kita.

Bagaimana posisi para aktor yang terlibat dan para aktor yang berkepentingan dalam situasi damai dan konflik di dalam struktur masyarakat?

Setelah mengetahui aktor-aktor yang terlibat secara aktif membangun situasi damai maupun konfliktual serta mengenali siapa saja yang berkepentingan terhadap situasi tersebut, maka kita perlu melihat posisi mereka di dalam struktur masyarakat. Berikut adalah gambar tentang piramida posisi aktor:



Gambar 1. Piramida Posisi Aktor

3. Kepemimpinan puncak (*top leaders*)

Para aktor yang berada di puncak piramida adalah mereka yang

memiliki kuasa politik, sosial, kultural, keagamaan, maupun keamanan tertinggi di tingkat lokal dengan rentang jangkauan kekuasaan yang luas. Dalam konteks masyarakat yang terstruktur, para pemimpin puncak amat jarang menjangkau orang-orang yang berada di tingkat terbawah yaitu akar rumput. Posisi terdekat yang paling mungkin mereka jangkau adalah orang-orang yang berada di tingkat kepemimpinan menengah. Para aktor di puncak piramida memiliki tugas dan wewenang untuk membuat berbagai kebijakan di tingkat lokal yang dapat memengaruhi situasi menjadi damai atau konfliktual. Contoh aktor di puncak piramida adalah kapolres, bupati/walikota, anggota DPRD kabupaten/kota, ketua organisasi keagamaan lokal/regional, dandim, dan individu-individu lain yang memiliki pengaruh luas di jenjang kota/kabupaten.

4. Kepemimpinan menengah (*middle-range leaders*)

Para aktor yang berada di tingkat menengah adalah mereka yang memiliki kuasa politik, keamanan, sosial, kultural, dan keagamaan yang setingkat di bawah para pemimpin puncak. Posisi para aktor di tingkat menengah sebenarnya sangat strategis karena mereka dapat menjangkau pemimpin puncak sekaligus pemimpin akar rumput. Dalam hal ini mereka dapat berfungsi sebagai perantara atau penghubung. Contoh dari aktor tersebut adalah kapolsek, camat, lurah/kepala desa, akademisi, dan rohaniwan.

5. Kepemimpinan akar rumput (*grassroots leaders*)

Para aktor yang bergerak di tingkat paling bawah sebenarnya

memiliki kuasa yang riil di dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena mereka mengenali seluk beluk masyarakat di mana mereka tinggal dan hidup bersama. Sumber daya yang dimiliki oleh para aktor pemimpin akar rumput di dalamnya termasuk kedekatan personal dan emosional dengan berbagai individu di tingkat akar rumput. Contoh dari aktor pemimpin akar rumput adalah ketua RT/RW, tokoh agama/masyarakat di tingkat kampung, serta petugas Babinsa.

- **Apa saja sumber-sumber kekuatan (*power resources*) para aktor tersebut?**

Bila kita sudah dapat memetakan para aktor yang terlibat dalam situasi damai dan konflik serta apa saja kepentingan mereka terhadap situasi tersebut maka kita dapat menemukan jawaban dari pertanyaan **ketiga**. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sumber daya yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat. Biasanya para aktor dapat secara aktif terlibat dalam sebuah situasi karena mereka memiliki **basis sumber daya** yang memungkinkan keterlibatan itu terjadi, misalnya sumber daya kultural, keagamaan, ekonomi, atau sosial-politik. Sebaliknya, mereka yang terlibat secara pasif mungkin hanya memiliki akses yang terbatas atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali pada berbagai sumber daya tersebut.

Dengan mengetahui berbagai sumber daya yang dimiliki oleh para aktor tersebut, kita dapat membuat gambaran yang lebih menyeluruh tentang mengapa mereka terlibat di dalam situasi yang terjadi, bagaimana mereka dapat terlibat, atau tentang apa yang mampu dilakukan (**kapasitas**) oleh para aktor tersebut di masa sekarang maupun masa mendatang untuk mendorong terjadinya situasi damai atau malah mendorong peningkatan eskalasi konflik. Lewat informasi tentang berbagai sumber daya yang dimiliki oleh para aktor,

kita juga bisa mendapatkan masukan tentang berbagai **insentif** dan **disinsentif** yang mungkin didapatkan oleh para aktor dari terjadinya situasi damai atau konflik. Semakin banyak insentif yang didapat oleh para aktor dari situasi damai maka semakin besar pula kemungkinan para aktor untuk menjaga situasi agar tetap damai atau mendorong situasi konflik berubah menjadi damai, begitu juga berlaku sebaliknya. Dengan mengetahui berbagai aspek insentif dan disinsentif para aktor terhadap damai dan konflik maka kita dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan dengan situasi tersebut.

Siapa saja yang sudah terdampak, akan terdampak, dan mungkin terdampak atas relasi damai atau konflik di wilayah kita?

Pertanyaan keempat kita lontarkan dengan tujuan untuk mencari tahu **siapa saja yang terdampak** dengan situasi damai atau konflik yang terbentuk akibat relasi-relasi yang dibangun oleh aktor-aktor di suatu wilayah. Misalnya di sebuah wilayah para warga secara langsung telah menerima manfaat dari relasi-relasi positif yang mereka bangun selama ini, atau semisal di situasi yang lain ada orang-orang yang terdampak situasi konflik di sebuah wilayah. Orang-orang yang terkena dampak positif atau negatif dari relasi damai atau konflikual inilah yang memiliki potensi menjadi aktor yang terlibat secara aktif di masa mendatang.

Bagaimana para aktor yang terlibat membangun relasi-relasi damai atau konflikual dan terhubung satu sama lain?

Relasi antar-aktor yang terlibat dalam situasi damai atau konflik menjadi hal yang mendasar untuk diketahui sebab relasi antar-aktor sangat berpengaruh pada perkembangan

situasi ke depan. Untuk menggambarkan **peta relasi antar-aktor**, pertama-tama kita dapat mencari siapa saja yang terlibat dalam situasi damai atau konflik. Setelah itu kita dapat membagi sifat relasi di antara para aktor ke dalam beberapa jenis, yaitu relasi normal, relasi pertemanan (aliansi), relasi informal, relasi dominasi satu arah, relasi konflikktual, dan relasi yang terputus. Berikut adalah gambar relasi dan posisi para aktor:



Gambar 2. Peta Relasi Antar-Aktor

Sumber: diadaptasi dari Fisher, et al. (2000: 23)

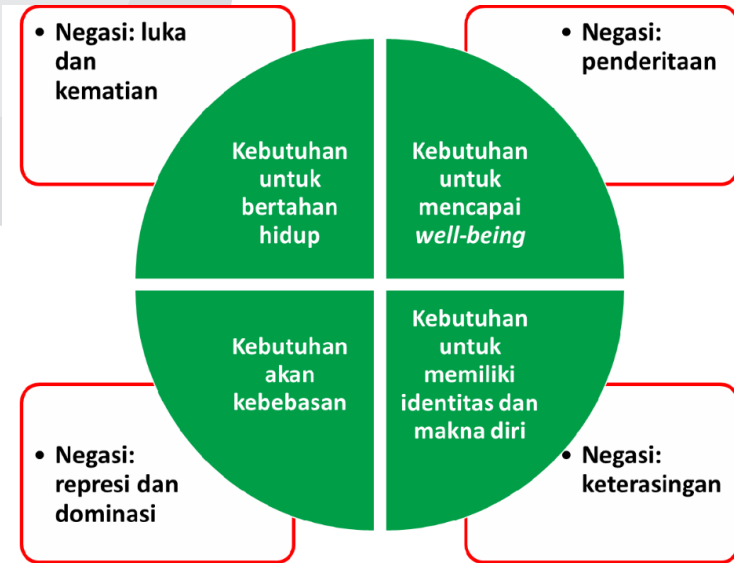
C. Manajemen Pengelolaan Konflik dan Perdamaian

Manajemen pengelolaan konflik dan perdamaian merupakan praktik yang penting dilakukan sebagai upaya agar situasi damai tetap terjaga atau agar situasi konflik dapat mereda dan ter-resolusi secara bertahap. Konflik merupakan hal yang wajar dan alami dalam relasi antar-individu dan kelompok individu. Ia lahir dari perbedaan kepentingan dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Agar tidak tereskalasi menjadi lebih besar maka konflik perlu dikelola agar ia dapat dikendalikan sehingga tidak meluas.

1. Manajemen Krisis dan Konflik

Kekerasan

Konflik merupakan situasi yang lahir dari kepentingan antar-individu atau antar-kelompok individu yang saling bertentangan (*contradictory*), tidak cocok (*incompatible*), dan tidak sesuai (*disharmonious*). Situasi yang lahir dari relasi yang bersifat konfliktual tidak selalu menghasilkan kekerasan. Sebaliknya, konflik yang tidak dikelola akan menghasilkan kekerasan sehingga menghalangi individu untuk meraih semua kebutuhan dasar serta potensi fisik dan mentalnya untuk mencapai kepenuhan hidup. **Kebutuhan dasar** dalam konteks ini dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:



Gambar 3. Empat Jenis Kebutuhan Dasar Individu

Keempat kebutuhan dasar di atas merupakan hal yang harus didapatkan oleh individu supaya ia memperoleh kedamaian yaitu situasi tercapainya kepenuhan hidup baik sebagai individu maupun kelompok individu.

Demi mengelola konflik secara tepat maka pertama-tama kita perlu mengenali beberapa **jenis kekerasan** yang mungkin terjadi dalam situasi yang konfliktual dalam masyarakat. Menurut Galtung (1990, 1996) setidaknya ada tiga jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jenis Kekerasan	Penjelasan
Kekerasan Langsung	Praktik yang ditujukan untuk melukai individu atau kelompok individu lain dengan sengaja. Bentuk dari kekerasan langsung dapat berupa kekerasan fisik dan verbal yang mengakibatkan tubuh, pikiran, perasaan, dan jiwa seorang individu terluka.
Kekerasan Struktural	Kekerasan tidak langsung yang diakibatkan oleh struktur sosial politik, termasuk kebijakan publik, yang menghalangi, membatasi, atau menghilangkan akses individu atau kelompok individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Bentuk dari kekerasan struktural adalah dominasi dan marginalisasi yang dilakukan terhadap individu atau kelompok individu non dominan oleh individu atau kelompok individu dominan.

Kekerasan Kultural	Pembenaran kultural terhadap kekerasan langsung dan kekerasan struktural yang dilakukan pada individu atau kelompok individu tertentu. Kekerasan kultural ini misalnya dapat berupa kebiasaan, tradisi, atau norma sosial yang digunakan untuk menormalisasi praktik kekerasan langsung dan struktural sehingga kedua kekerasan tersebut tampak alami, benar, dan dapat diterima. Kekerasan kultural biasanya menempel pada sistem kultur tertentu dan karena dianggap benar maka ia direproduksi dari generasi ke generasi tanpa ada kritik terhadapnya.
--------------------	---

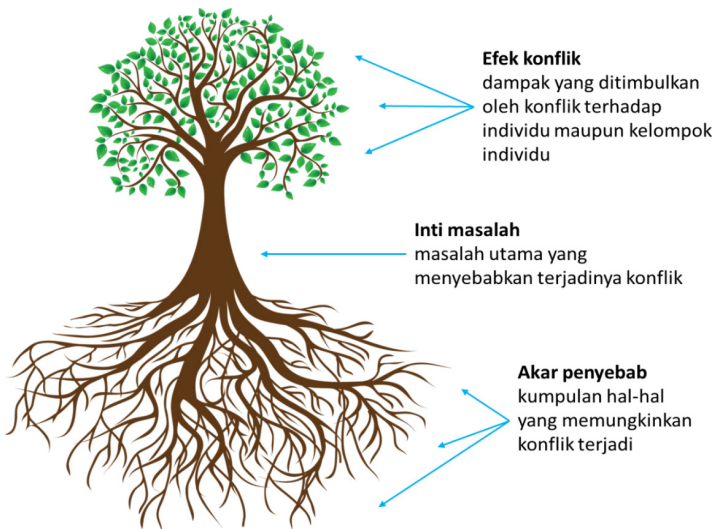
Tabel 1. Tiga Jenis Kekerasan

Dalam praktiknya, tidak semua jenis kekerasan tersebut tampak di permukaan. Hanya kekerasan langsung sajalah yang dapat terlihat oleh mata telanjang sehingga kita bisa mengatakan bahwa telah terjadi kekerasan di depan mata kita. Sementara itu, kekerasan struktural dan kultural hanya dapat kita sadari setelah kita melakukan penyelidikan terhadap manifestasi dari kedua jenis kekerasan tersebut, seperti marjinalisasi terhadap individu atau kelompok individu. Sering kali, dalam situasi konflik, yang tampak secara nyata hanyalah kekerasan langsung, namun tidak demikian dengan kekerasan struktural dan kultural. Meskipun demikian, bukan berarti

dalam situasi ini tidak ada kekerasan struktural maupun kultural. Oleh karena itu penting bagi kita untuk cermat dan berhati-hati dalam menilai situasi konflik.

Konflik

Konflik merupakan situasi yang dihasilkan dari inter-relasi berbagai kepentingan individu dan kelompok individu yang saling berbeda dan bertolak belakang. Bila konflik tidak dikelola dengan baik maka eskalasinya dapat meningkat sehingga menimbulkan korban terdampak (fisik, psikis, dan mental) yang lebih banyak. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan konflik adalah memahami seluk beluk situasi konflik yang terjadi. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah dengan melakukan analisis singkat melalui **analogi pohon konflik** berikut:



Gambar 4. Pohon Konflik

Gambar pohon konflik tersebut ingin menjelaskan secara sederhana tentang anatomi sebuah konflik. Ada tiga bagian besar dari sebuah konflik, yaitu akar konflik, penyebab utama konflik, dan efek konflik, di mana masing-masing bagian dianalogikan dengan akar, badan, dan ranting pohon.

Akar penyebab konflik merupakan berbagai hal yang sebetulnya menyebabkan sebuah konflik mungkin terjadi. Seperti akar, hal-hal ini tidaklah tampak di permukaan. Oleh karenanya kita sering kali tidak menyadari kehadirannya. Karena kita tidak menyadari kehadiran berbagai hal yang sesungguhnya menyebabkan sebuah konflik mungkin terjadi maka penyebab-penyebab konflik ini tidak pernah kita kelola dan resolusikan sama sekali. Situasi ini mengakibatkan penyebab-penyebab konflik ini terus-menerus tereproduksi secara alami dan tanpa gangguan sehingga mengakar kuat di dalam masyarakat.

Inti masalah adalah penyebab utama terjadinya konflik. Seperti badan pohon, penyebab utama ini sangat mudah tampak oleh kita. Sering kali, dalam pengelolaan konflik, kita hanya berfokus untuk meredakan inti masalah, padahal sebenarnya inti masalah tidak akan kuat berdiri tanpa akar penyebab yang kokoh menunjam ke tanah.

Efek konflik adalah berbagai dampak dari adanya konflik. Seperti ranting pohon yang menjulur ke segala arah, konflik juga memiliki dampak ke semua segi kehidupan masyarakat yang terdampak. Ranting pohon akan terus merimbun bila tidak kita kendalikan pertumbuhannya, begitu juga dengan dampak konflik akan terus meluas jika tidak kita selesaikan.

Dalam sebuah situasi konflik, misalnya konflik antar-penganut agama yang berbeda, sering kali kita hanya melihat

hal-hal yang tampak di depan mata seperti peningkatan tensi atau ketegangan antar-kelompok agama sebagai satu-satunya masalah yang terjadi; seolah-olah bila tensi dapat diredakan maka konflik akan berakhir dengan sendirinya. Kita sering kali lupa menyadari bahwa sebenarnya peningkatan tensi tersebut merupakan akibat dari berbagai penyebab yang telah terjadi selama rentang waktu tertentu dan tidak pernah berusaha untuk diselesaikan, seperti pengakuan tidak setara yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu, perlakuan istimewa terhadap kelompok agama dominan yang mendorong perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok agama non-dominan, serta rendahnya partisipasi sosial, budaya, politik kelompok agama non-dominan di ruang publik akibat dari peminggiran oleh kelompok agama dominan. Hal-hal tersebut merupakan akar penyebab mengapa peningkatan tensi antar-kelompok agama dapat terjadi dan pada akhirnya melahirkan berbagai dampak seperti prasangka dan rasa saling tidak percaya, solidaritas kelompok yang bersifat negatif, dan kebiasaan untuk mendominasi kelompok-kelompok non-dominan.

Konflik yang terjadi di masyarakat haruslah dikelola agar tidak bereskalasi menjadi semakin besar. Ada dua pendekatan yang dapat dipakai dalam mengelola konflik yaitu **pendekatan keamanan** dan **pendekatan perdamaian**. Kedua pendekatan tersebut pada praktiknya saling bertolak belakang seperti yang dapat kita cermati dari gambar berikut ini:



Pendekatan perdamaian

Perdamaian dapat diraih dengan mengelola, meresolusi, dan mentransformasi konflik dan kekerasan dengan cara-cara nirkekerasan yang empatik dan kreatif.

Selama konflik dan kekerasan tidak dikelola, diresolusi, dan ditransformasikan maka ia akan terus ada baik secara nyata maupun laten.



Pendekatan keamanan

Penyelesaian konflik hanya mungkin dicapai dengan kekuatan (*strength*) melalui tindakan mencegah (*deterrence*) atau mengalahkan (*defeat*) pihak lain yang dianggap sebagai lawan (*evil party with evil intention*) dan dianggap sebagai ancaman nyata maupun laten.

Pendekatan keamanan menyetujui penggunaan kekerasan sebagai metode untuk menegakkan ketertiban (*order*) dan menciptakan perdamaian (*peace*).

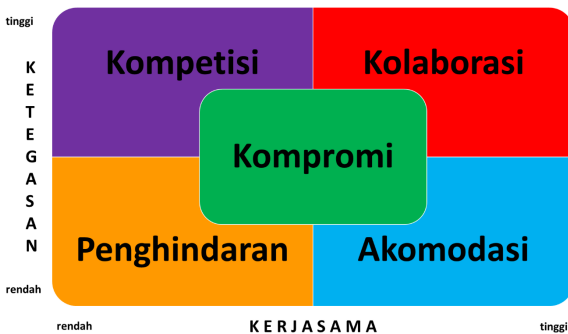
Gambar 5. Dua Pendekatan dalam Mengelola Konflik

Pendekatan keamanan merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya ketertiban (*order*). Menurut pendekatan ini, konflik dapat dikatakan selesai bila aktor yang memiliki otoritas dapat meniadakan kekerasan langsung (*absence of direct violence*) di lapangan dengan menggunakan kekuatan (*strength*) yang memaksa aktor-aktor yang terlibat untuk menghentikan konflik. Meskipun di atas permukaan kekerasan dapat berhenti namun penggunaan kekerasan oleh aktor berotoritas justru rawan menambah dan memperluas dampak konflik tanpa menyelesaikan akar penyebab konflik sesungguhnya.

Pendekatan perdamaian sebaliknya justru berupaya melakukan penyelesaian konflik secara bertahap melalui proses pengelolaan, resolusi, dan bahkan transformasi konflik. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan cara-

cara tanpa kekerasan pada para aktor yang terlibat konflik. Berkebalikan dengan pendekatan keamanan yang menekankan aspek ketertiban, pendekatan perdamaian menekankan aspek empati pada semua pihak yang terlibat konflik. Empati berarti bahwa insentif, kepentingan, dan motivasi para aktor yang terlibat didengar dan dipakai sebagai dasar penyelesaian konflik. Oleh karena konflik merupakan buah dari benturan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan bertolak belakang maka diperlukan kreativitas dalam proses penyelesaian konflik.

Penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan dalam jangka pendek mungkin saja efektif untuk menghentikan kekerasan namun dalam jangka panjang justru menyimpan bara dalam sekam sebab akar penyebab konflik tidak teresolusi dan tertransformasi dengan baik. Sebaliknya, meskipun pendekatan perdamaian tampak lambat dalam menyelesaikan konflik namun dalam jangka panjang pendekatan ini justru lebih mampu untuk meresolusi dan mentransformasi konflik secara utuh. Thomas (2002) membagi lima jenis pengelolaan konflik yang dilakukan secara damai seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Diagram Pengelolaan Konflik

Sumber: diadaptasi dari Thomas (2002: 5-6)

Terdapat lima model pengelolaan konflik yang diukur dari tingkat ketegasan (*assertiveness*) dan kerja sama (*cooperativeness*) dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu penghindaran (*avoidance*), akomodasi (*accommodation*), kompetisi (*competition*), kompromi (*compromise*), dan kolaborasi (*collaboration*).

Penghindaran merupakan bentuk pengelolaan konflik di mana aktor-aktor yang terlibat berupaya menyangkal eksistensi konflik dan berpura-pura bahwa situasi baik-baik saja. Model ini hanya memerlukan kemampuan bekerjasama yang rendah sekaligus tidak begitu memerlukan aspek ketegasan untuk mencapai tujuan oleh aktor-aktor yang terlibat. Meskipun seolah-olah konflik dapat diselesaikan namun sebetulnya model ini tidak menghasilkan penyelesaian apa pun karena semua aktor menarik diri dari segala praktik penyelesaian konflik.

Akomodasi merupakan model pengelolaan konflik di mana para aktor yang terlibat berupaya memberikan ruang bagi kepentingan aktor-aktor lain meskipun kepentingan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Dalam praktiknya para aktor yang memilih model ini memerlukan kemampuan bekerja sama yang tinggi dan sebaliknya tidak begitu memerlukan ketegasan terhadap aktor-aktor lain.

Kompetisi adalah model yang berkebalikan dengan akomodasi di mana para aktor berupaya mendorong kepentingan mereka agar diterima oleh aktor-aktor lain. Model ini merupakan praktik pengelolaan konflik yang berorientasi pada penggunaan kekuatan (*power-oriented*). Setiap aktor yang terlibat di dalam kompetisi sulit untuk melakukan tawar-menawar karena mereka menggunakan kekuatannya

sebagai upaya untuk merealisasikan kepentingan. Model ini memerlukan aspek ketegasan yang tinggi namun di sisi lain tidak begitu memerlukan keterampilan untuk bekerjasama.

Kompromi adalah model yang menitikberatkan praktik penyelesaian konflik pada tawar-menawar yang berujung pada kesepakatan bahwa masing-masing pihak bersedia untuk saling mengalah sekaligus menang atas suatu hal. Para aktor yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk bekerjasama sekaligus ketegasan untuk meraih kepentingan mereka masing-masing.

Kolaborasi merupakan bentuk penyelesaian konflik di mana para aktor berupaya untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama dengan tujuan agar kepentingan dan kebutuhan para aktor yang terlibat dapat terpenuhi. Kolaborasi memerlukan keterampilan bekerjasama sekaligus ketegasan untuk mencapai tujuan yang tinggi. Model ini memerlukan kreativitas dari para aktor yang terlibat untuk mencari praktik-praktik yang memungkinkan para aktor yang sebelumnya berkonflik dapat melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan konflik di antara mereka.

Untuk menyelesaikan konflik secara utuh, para aktor yang terlibat harus mampu mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam tahapan-tahapan pengelolaan dan resolusi konflik. Mereka justru harus menggunakan cara-cara nir-kekerasan secara kreatif dan empatik untuk saling berkolaborasi di mana para aktor saling bekerja sama. Untuk mencapai tahap ini maka diperlukan fondasi internal yang kuat di antara kelompok dan individu. Catholic Relief Services (2021) membagi resolusi konflik ke dalam tiga tahap seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 7. Tahapan Resolusi Konflik

Sumber: diadaptasi dari Catholic Relief Services (2021; 92)

Binding adalah tahapan paling awal dan utama dari resolusi konflik. Pusatnya terletak pada transformasi para individu yang secara personal terlibat dalam konflik. Transformasi individu ini penting sebab individu-individu adalah pelaku sekaligus korban dari situasi konflik. Sebagai pelaku dan korban, mereka menanggung kepedihan, ketakutan, prasangka, dan trauma yang mungkin saja diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu sebelum siap berkolaborasi dengan aktor-aktor lain yang berkonflik dengan mereka, para individu ini mesti didorong untuk melakukan refleksi dalam rangka memahami diri mereka sendiri. Tujuannya adalah supaya mereka menemukan *inner peace* yang berdasarkan pada penerimaan terhadap realitas hari ini atau terhadap

hal-hal yang telah terjadi (*truth*) sehingga memunculkan pengampunan terhadap segala hal yang telah terjadi (*mercy*). Dengan menemukan *inner peace* seorang individu dapat menciptakan cara yang unik untuk beradaptasi dengan tekanan emosional yang ia bawa. Tahap *binding* ini merupakan tahap yang paling mendasar sekaligus paling sulit dilakukan karena terkait dengan situasi subjektif individu yang dibentuk oleh berbagai pengalaman dan perjumpaan di masa lalu.

Bonding adalah tahapan kedua setelah *binding*, yaitu ketika seorang individu membangun kembali dan memperkuat relasinya dengan individu-individu lain di dalam kelompoknya. Dalam konteks penyelesaian konflik, praktik *bonding* dapat dimaknai sebagai sarana untuk mempersiapkan para anggota kelompok untuk menyongsong perjumpaan-perjumpaan yang lebih bermakna dengan anggota kelompok lain yang terlibat konflik dengan mereka. *Bonding* dapat membantu suatu kelompok untuk menyamakan tujuan, kebutuhan, dan prioritas sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan tersebut ketika berjumpa dengan kelompok lain.

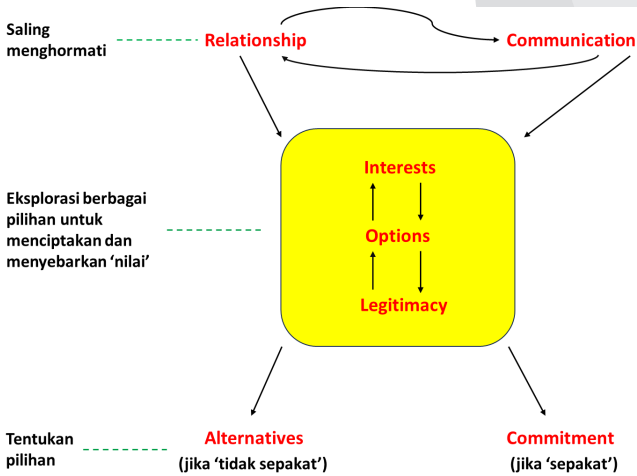
Tahap terakhir dari resolusi konflik adalah ***bridging***, yaitu ketika kelompok-kelompok yang berkonflik secara bersama-sama berupaya menyelesaikan permasalahan dengan cara yang saling menguntungkan di sebuah ruang aman bagi mereka. Dialog antarkelompok, yang merupakan elemen penting dari praktik *bridging*, mesti dilakukan dengan berfokus pada penyebab konflik. *Bridging* membantu menumbuhkan rasa percaya di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Ia juga secara bersamaan dapat menjadi sarana untuk menyatukan kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai tujuan bersama seperti memperkuat relasi sosial di antara mereka,

meniadakan praktik saling mengeksklusi, dan mengurangi perpecahan antarkelompok dengan memanfaatkan kombinasi sumber daya masing-masing kelompok.

2. Pengelolaan Komunikasi Antar-Aktor

Komunikasi adalah aspek penting dalam pengelolaan konflik; semakin lancar pertukaran pesan antar-aktor yang terlibat maka semakin besar pula peluang penyelesaian konflik. Komunikasi antar-aktor dapat dibagi menjadi dua yaitu komunikasi yang dilakukan saat konflik sedang terjadi (dengan tujuan menyelesaikan konflik) dan yang dilakukan saat konflik telah selesai (dengan tujuan menjaga situasi damai). Terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh para aktor dalam mengelola komunikasi di antara mereka ketika konflik sedang terjadi, yaitu negosiasi dan mediasi.

Menurut Patton (2005) **negosiasi** merupakan praktik pertukaran pesan secara langsung yang didesain untuk mencapai sebuah kesepakatan di antara aktor-aktor yang berkonflik dengan kepentingan yang berbeda bahkan saling bertolak belakang. Secara alami negosiasi sebenarnya merupakan salah satu bentuk interaksi antar-individu yang paling dasar dan paling sering digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Terdapat tujuh elemen negosiasi, yaitu relasi (*relationship*), komunikasi (*communication*), kepentingan (*interests*), pilihan (*options*), legitimasi (*legitimacy*), alternatif (*alternatives*), dan komitmen (*commitment*). Ketujuh elemen tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem negosiasi seperti pada gambar berikut:



Gambar 8. Pendekatan dalam Negosiasi

Sumber: diadaptasi dari Patton (2005; 295).

Relasi adalah hubungan di antara para aktor yang terlibat dalam konflik. Saat terjadi konflik, relasi di antara para aktor menjadi terganggu, rusak, atau putus sama sekali. Relasi yang buruk ditandai dengan munculnya rasa saling tidak percaya (*mutual distrust*), kurangnya empati terhadap aktor lain (*lack of empathy*) yang dibarengi oleh rasa asertif yang tinggi (*high degree of assertiveness*). Sebaliknya, relasi yang baik ditandai oleh rasa saling percaya, empati yang tinggi, dan kesediaan untuk bekerjasama dengan aktor lain kendati memiliki perbedaan kepentingan atau metode untuk mencapai kepentingan bersama.

Komunikasi merupakan cara para aktor untuk menyampaikan pesan kepada aktor lain. Bila dalam situasi ketiadaan konflik para aktor saling memiliki rasa percaya dan

empati di antara mereka maka sangat mungkin komunikasi yang terbangun bersifat informatif dan persuasif. Sebaliknya, bila konflik sedang terjadi, komunikasi yang terbangun dapat bersifat agresif, argumentatif, dan asertif.

Baik-buruknya relasi di antara para aktor memengaruhi cara mereka saling berkomunikasi. Relasi yang buruk juga akan mendorong buruknya kualitas komunikasi di antara para aktor. Begitu juga sebaliknya, relasi yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik pula. Di sisi lain komunikasi yang terbangun di antara para aktor juga dapat memengaruhi relasi di antara mereka. Bila komunikasi yang terjadi memiliki kualitas yang baik maka hal itu dapat memperbaiki maupun memperkuat relasi di antara para aktor. Sebaliknya, bila kualitas komunikasi di antara para aktor tidak begitu baik maka hal itu dapat semakin memperburuk relasi di antara mereka. Terganggunya, bahkan terputusnya, relasi di antara para aktor akan berdampak pada hilangnya komunikasi sehingga kemungkinan hal ini akan mendorong eskalasi konflik yang lebih besar. Oleh karena itu relasi dan komunikasi merupakan dua aspek yang saling memengaruhi. Dengan demikian, tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah memperbaiki relasi di antara para aktor sehingga mereka dapat membangun komunikasi dan secara bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi.

Interaksi antara aspek relasi dan komunikasi di antara para aktor akan memengaruhi bagaimana kinerja aspek kepentingan, pilihan, dan legitimasi di dalam praktik negosiasi. **Kepentingan** merupakan kebutuhan, keinginan, harapan, aspirasi, dan motivasi dari para aktor dalam situasi konflik. Masing-masing aktor yang terlibat sangat mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tidak cocok satu

sama lain, dan bahkan saling bertolak belakang. Sementara itu, **pilihan** adalah berbagai bentuk kesepakatan yang mungkin dicapai oleh para aktor yang bernegosiasi. Pilihan ini haruslah mempertimbangkan kepuasan dari aktor-aktor yang terlibat dalam negosiasi; apakah pilihan-pilihan kesepakatan memuaskan kepentingan semua aktor atau hanya memuaskan satu pihak saja, sementara pihak lain kurang atau tidak puas. Bila pilihan kesepakatan dapat memuaskan semua aktor karena memenuhi rasa keadilan mereka maka kesepakatan itu akan memiliki **legitimasi** untuk direalisasikan oleh para aktor.

Bila para aktor merasa tidak cocok dengan proses negosiasi—misalnya karena komunikasi yang buruk sehingga membuat kepentingan mereka tidak diakomodasi ke dalam berbagai pilihan bentuk kesepakatan yang mungkin dicapai—maka pilihan-pilihan itu dianggap tidak memiliki legitimasi. Akibatnya, negosiasi dikatakan gagal sehingga para aktor harus mencari berbagai **alternatif** bentuk negosiasi yang lain. Sebaliknya, jika proses negosiasi dapat memuaskan semua aktor yang terlibat maka mereka akan menyepakati hasil negosiasi dan membuat **komitmen** bersama untuk saling merealisasikan kesepakatan tersebut.

Pada praktiknya, negosiasi merupakan hal yang sulit dilakukan oleh para aktor yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, para aktor mesti memiliki panduan awal tentang apa dan bagaimana melakukan negosiasi. Tabel berikut berisi beberapa pertanyaan yang dapat menjadi panduan awal negosiasi:

Elemen	Pertanyaan panduan
Relasi	<p>Konflik adalah peristiwa di mana relasi para aktor yang terlibat menjadi rusak. Oleh karena itu negosiasi juga harus dimaksudkan untuk memperbaiki relasi yang rusak tersebut.</p> <p>Relasi seperti apa yang ingin kita capai dengan melakukan negosiasi ini?</p> <p>Bagaimana negosiasi ini bisa mencapai bentuk relasi yang kita inginkan?</p>
Komunikasi	<p>Model gaya berkomunikasi menjadi hal yang penting bagi proses negosiasi karena dapat memengaruhi persepsi mitra negosiasi. Oleh karena itu aspek komunikasi menjadi hal yang mutlak diperhatikan.</p> <p>Apa agenda kita di dalam negosiasi yang kita lakukan? Apa agenda mereka?</p> <p>Bagaimana gaya berkomunikasi yang akan kita pakai di dalam negosiasi? Persuasif? Argumentatif? Akomodatif? Dominatif?</p> <p>Bagaimana cara kita bereaksi terhadap gaya berkomunikasi mereka?</p>

Kepentingan	<p>Kepentingan adalah kebutuhan dasar, keinginan, dan motivasi dari aktor atau kelompok aktor. Oleh karena itu masing-masing aktor harus memikirkan beberapa hal berikut:</p> <p>Apa saja sebetulnya kepentingan kita (aktor A atau aktor dari kelompok A)? Apa saja kepentingan mereka (aktor B atau aktor dari kelompok B)?</p> <p>Apakah ada pihak lain di luar kita dan mereka yang kepentingannya harus dipertimbangkan di dalam negosiasi?</p> <p>Apa saja kepentingan kita yang sebetulnya sama atau sejalan dengan kepentingan mereka?</p> <p>Apa saja kepentingan kita yang sebetulnya hanya berbeda saja, meski tujuannya sama, dengan kepentingan mereka?</p> <p>Apa saja kepentingan kita yang memang bertolak belakang dengan kepentingan mereka?</p>
--------------------	--

Pilihan	<p>Tujuan utama dari negosiasi adalah mencari kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Oleh karena itu penting untuk secara bersama-sama mencari berbagai kemungkinan kesepakatan yang dapat dicapai oleh para aktor:</p> <p>Apa saja kemungkinan kesepakatan yang mungkin memuaskan kita dan mereka?</p> <p>Apa cara yang bisa digunakan untuk memadukan berbagai kepentingan kita dan mereka dengan tujuan mencari nilai bersama yang bisa disepakati?</p>
Legitimasi	<p>Negosiasi dan hasil negosiasi akan mendapat legitimasi apabila para aktor yang terlibat di dalamnya merasa bahwa mereka mendapatkan porsi yang adil (<i>fair</i>) dibandingkan aktor lain yang menjadi mitra negosiasi. Legitimasi atas negosiasi juga akan didapatkan bila para aktor merasa bahwa mereka diperlakukan secara setara (<i>equal</i>) oleh mitra negosiasi mereka.</p> <p>Bagaimana kita mempersepsikan mereka? Sebaliknya, bagaimana mereka mempersepsikan kita?</p> <p>Bagaimana kita harus memperlakukan mereka?</p> <p>Bagaimana cara mencapai kesepakatan yang memenuhi rasa adil bagi kita dan mereka?</p>

<p>Komitmen</p>	<p>Komitmen dari para aktor yang terlibat negosiasi sangat penting agar penyelesaian konflik dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.</p> <p>Bagaimana kita bisa berkomitmen pada kesepakatan yang dicapai sebagai hasil negosiasi?</p> <p>Hal-hal apa saja yang bisa memperkuat komitmen kita? Bagaimana cara kita memperkuat komitmen kita? Sebaliknya, apa saja yang dapat memperkuat komitmen mereka?</p> <p>Apa saja yang dapat melemahkan komitmen kita? Bagaimana cara kita menyingkirkan hal yang melemahkan komitmen kita? Sebaliknya, apa saja yang dapat melemahkan komitmen mereka?</p>
-----------------	--

Alternatif	<p>Tidak semua negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh aktor-aktor yang terlibat. Bila kesepakatan tidak tercapai maka para aktor memiliki tanggung jawab untuk menemukan berbagai alternatif lain terhadap kesepakatan yang gagal.</p> <p>Mengapa dan apa yang membuat kita tidak menyepakati hasil negosiasi? Mengapa dan apa yang membuat mereka tidak sepakat dengan hasil negosiasi?</p> <p>Apa alternatif kita terhadap kesepakatan yang tidak berhasil dicapai? Apa alternatif yang mereka tawarkan?</p> <p>Apa ekspektasi kita terhadap negosiasi berikutnya? Apa ekspektasi mereka?</p>
------------	---

Tabel 2. Panduan Pertanyaan Aktor dalam Proses Negosiasi

Negosiasi tidak selalu dapat dilakukan oleh para aktor yang terlibat saat konflik sedang terjadi. Relasi yang rusak akibat konflik membuat komunikasi di antara mereka menjadi sangat buruk, bahkan terputus. Oleh karena itu cara lain yang dapat digunakan oleh para aktor yaitu dengan melakukan mediasi atau mengundang pihak ketiga yang tidak terlibat konflik untuk menjadi perantara dan penengah. Kovach (2005) mendefinisikan **mediasi** sebagai sebuah proses di mana pihak ketiga yang netral, berfungsi sebagai mediator, membantu para aktor yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Peran utama mediator adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi, mendorong

kesepahaman di antara para aktor, dan mendorong berbagai upaya untuk mencari solusi-solusi kreatif atas penyelesaian konflik. Dalam praktik mediasi, mediator tidak membuat proposal penyelesaian konflik yang mengikat para aktor dan mengharuskan mereka untuk merealisasikannya. Sebaliknya, mediator justru mengundang aktor-aktor tersebut untuk secara bersama-sama terlibat dalam berbagai metode penyelesaian konflik yang kreatif dan kolaboratif tanpa memaksa mereka untuk bersepakat terhadap sebuah keputusan.

Mediasi merupakan praktik komunikasi antar-aktor yang bersifat informal dan lentur. Kelenturan ini justru menjadi kekuatan bagi mediasi di mana mediator dan aktor-aktor yang berpartisipasi dalam prosesnya diperkenankan untuk mengambil pendekatan yang berbeda demi menyelesaikan masalah secara kreatif. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam proses mediasi adalah seperti persiapan awal (*preliminary arrangements*), pendahuluan oleh mediator, pernyataan dari para aktor yang terlibat mediasi (*parties' statements*), pengumpulan informasi dari aktor dan pihak lain yang terlibat, identifikasi masalah dan kepentingan aktor, mencari pilihan-pilihan kesepakatan, tawar-menawar dan negosiasi di antara para aktor, pembuatan kesepakatan, serta penutupan.

Tahap	Apa yang dilakukan
Persiapan awal	Tahap persiapan awal mencakup berbagai hal yang terjadi sebelum sesi mediasi. Dalam tahap ini para aktor memilih siapa yang menjadi mediator, menentukan siapa saja dari pihak-pihak yang terlibat yang boleh menghadiri mediasi, dan menentukan pembagian wewenang di antara mereka yang terlibat tersebut.
Pendahuluan oleh mediator	Tahap kedua yaitu pendahuluan atau pembukaan proses mediasi oleh mediator dapat mencakup pengenalan semua peserta mediasi, penjelasan tentang proses mediasi, dan pembahasan aturan-aturan mediasi. Dalam tahap ini mediator dapat menyampaikan tujuan dan target dari proses mediasi. Mediator juga dapat meminta para peserta mediasi untuk menyampaikan berbagai harapan mereka tentang proses ini. Lebih lanjut, mediator hendaknya menyampaikan perihal-perihal hukum yang relevan dengan mediasi, misalnya kewajiban peserta untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi serta apa saja wewenang para peserta.

Pernyataan para aktor	Setelah tahap kedua dilalui maka pada tahap berikutnya mediator dapat meminta para aktor yang terlibat untuk memberikan pernyataan mereka masing-masing. Mediator dapat memandu para pihak yang terlibat mediasi untuk memberikan presentasi atas pandangan mereka tentang permasalahan atau konflik yang sedang dihadapi. Mediator harus memastikan bahwa para aktor memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk mengungkapkan berbagai pandangan maupun perspektif mereka atas konflik yang terjadi tanpa diinterupsi oleh siapa pun. Tahap ini adalah tahap yang penting karena menjadi kesempatan bagi aktor-aktor yang terlibat konflik untuk menyampaikan pandangan dan perspektif mereka secara utuh dengan kata-kata yang mereka pilih sendiri kepada mediator dan kepada aktor lain.
-----------------------	---

<p>Pengumpulan informasi</p>	<p>Tahap berikutnya adalah pengumpulan informasi. Pada tahap ini mediator dan pihak-pihak yang terlibat saling memberikan pertanyaan. Sangat mungkin mereka akan saling meluapkan emosi oleh karena itu mediator dapat memberikan waktu dan ruang bagi mereka untuk mengatasi emosi yang muncul. Sering kali hal ini menjadi aspek penting dalam mediasi.</p>
<p>Identifikasi masalah dan kepentingan</p>	<p>Setelah informasi terkumpul maka tugas mediator adalah melakukan identifikasi dengan tepat mengenai berbagai masalah dan isu yang menyebabkan konflik serta apa saja kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam tahap ini mediator dapat merumuskan ulang berbagai isu dan permasalahan dengan pilihan bahasa yang lebih netral dan dapat diterima oleh aktor-aktor yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap gambaran besar situasi konflik serta mendorong keterbukaan mereka terhadap berbagai pilihan penyelesaian konflik.</p>

<p>Perumusan pilihan-pilihan kesepakatan</p>	<p>Dalam tahap ini mediator dapat mulai mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menghasilkan berbagai pilihan ide yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara memfasilitasi mereka dengan metode kreatif seperti <i>brainstorming</i>. Sering kali dalam tahap ini mediator bertemu secara personal dengan pihak-pihak yang terlibat. Pada sesi personal ini mediator biasanya bisa menggali informasi tambahan dari setiap pihak yang mungkin mereka tahan atau sembunyikan saat presentasi pandangan di tahap sebelumnya.</p>
<p>Tawar-menawar dan negosiasi</p>	<p>Setelah para pihak dapat menemukan berbagai pilihan penyelesaian konflik yang potensial dilakukan maka tahap selanjutnya adalah tawar-menawar dan negosiasi. Dalam proses tawar-menawar ini mediator membantu para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dengan cara saling mengorbankan kepentingan atau sebagian kepentingan mereka</p>

Kesepakatan	Bila dalam proses ini para pihak berhasil menghasilkan kesepakatan maka mediator akan merumuskannya dengan menyusun formula kesepakatan secara utuh melalui memorandum penyelesaian. Sebaliknya, jika para pihak tidak mencapai kata sepakat maka mediator akan mengulang proses mencari pilihan penyelesaian lain yang mungkin dilakukan.
Penutupan	Mediasi ditutup dengan pernyataan mediator tentang upaya tindak lanjut serta pelaksanaan hasil kesepakatan para aktor.

Tabel 3. Tahapan Mediasi

Proses mediasi akan dapat berjalan dengan lancar bila mediator mengerti perannya di dalam proses tersebut. Ada beberapa peran yang harus dijalankan mediator untuk membantu para aktor membuat kesepakatan yang memuaskan mereka:

Pertama, sebagai orang yang menyelenggarakan mediasi dan mengorganisasikan interaksi para pihak maka mediator memiliki tanggung jawab untuk mengelola keseluruhan proses mediasi. Mediator tidak hanya harus piawai dalam mengelola interaksi antar-aktor namun juga mengelola berbagai informasi yang didapatkan dari para aktor yang sedikit banyak berdampak pada penyelesaian konflik.

Kedua, mediator dapat mengambil peran untuk mengatur tata cara penyampaian pernyataan para pihak dan lalu lintas

pertukaran informasi di antara mereka. Sering kali konflik akan semakin tereskalasi ketika masing-masing aktor yang terlibat tidak memahami dan tidak mau menghargai apa yang dikatakan oleh aktor lain. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan perspektif di antara mereka. Oleh karenanya penting bagi mediator untuk mengatur lalu lintas perbincangan maupun perdebatan agar dapat bermanfaat bagi penyelesaian konflik. Selain itu mediator dapat pula menafsirkan dan merumuskan ulang pernyataan dan informasi para pihak dengan pilihan kata yang lebih netral agar dapat diterima oleh para pihak yang terlibat.

Ketiga, saat pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi mengalami kebuntuan dalam mencari pilihan untuk menyelesaikan konflik maka mediator dapat membantu mereka dengan menganalisis berbagai kesulitan dan hambatan negosiasi. Dalam konteks jika pilihan kemungkinan penyelesaian konflik telah ada maka mediator dapat membantu menguji apakah pilihan-pilihan tersebut masuk akal untuk dilakukan atau jangan-jangan para pihak memiliki harapan yang tidak realistis terkait penyelesaian konflik.

Keempat, peran paling penting dari seorang mediator justru bisa jadi adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Konflik dapat bereskalasi karena masing-masing aktor yang terlibat saling tidak memiliki keinginan untuk mendengarkan keluhan, keinginan, kebutuhan, dan harapan masing-masing. Oleh karenanya kebutuhan mendasar dari para aktor tersebut adalah kebutuhan untuk didengarkan. Maka, dengan mendengar berbagai pernyataan dan informasi secara saksama, baik yang dilakukan secara rasional maupun emosional, mediator dapat memenangkan hati dan pikiran para aktor yang terlibat konflik. Selain itu dengan mendengarkan mereka, mediator dapat

mempelajari berbagai isu dalam konflik tersebut secara lebih luas dan mendalam sehingga bisa dipakai untuk membantu penyelesaian konflik. Dengan menjadi pendengar yang baik, mediator memberi contoh bagi para aktor yang terlibat supaya mereka juga dapat mendengarkan lawan bicara mereka.

D. Pemanfaatan Media Sosial untuk Tujuan Perdamaian

1. Pemetaan sumber-sumber informasi yang sah dan valid

Setiap hari, terdapat jutaan informasi yang lalu-lalang di media sosial. Tidak semuanya dapat dipercaya dan tidak semuanya benar. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi atas informasi yang diterima melalui media sosial. Lalu, apakah yang harus kita lakukan agar kita dapat membuat *filter* mandiri ketika menyaring informasi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita melihat sekilas permasalahan yang melingkupi jagat media sosial.

a. Siapa saja dapat memproduksi konten

Patut digarisbawahi bahwa kehadiran media sosial telah mengubah peran masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Dewasa ini, masyarakat tidak lagi mengonsumsi informasi. Mereka dapat menjadi produsen informasi yang dikemas dalam konten yang menarik lalu disebarakan ke dalam berbagai *platform*, salah satunya media sosial. Berkat media sosial, warganet memiliki daya untuk menyeleksi, mendiskusikan, bahkan menghasilkan konten layaknya seorang wartawan.⁴

4. Sudibyo, A(2022, Mei 27). Jurnalisme dan Kuasa Platform Digital. Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/artikel->

Namun, proses ini tidak menyertakan kaidah-kaidah yang lazim digunakan oleh wartawan. Alhasil, kandungan kebenaran dan ketepatan informasi tersebut patut dipertanyakan.

Proses ini tidak hanya terjadi di media sosial yang terbuka seperti Instagram, X, TikTok, Facebook, atau Youtube; melainkan juga di bentuk aplikasi *social networking* yang sifatnya privat seperti WhatsApp, Line Messenger atau Facebook Messenger. Sekalipun bersifat privat, aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan dengan jangkauan yang amat luas. Karena kemampuan itu, Manuel Castells kemudian memberikan julukan media sosial sebagai *mass-self communication*.

Pesan yang dibuat oleh pengguna aplikasi tersebut amatlah personal sifatnya dan dapat diproduksi oleh siapa saja, tidak memerlukan proses verifikasi ilmiah atau kaidah jurnalistik yang sesuai. Lebih daripada itu, pesan tersebut dapat ditujukan kepada *target audience* tertentu sesuai keinginan si pembuat pesan. Dengan fitur-fitur ini, pengguna memiliki kebebasan berpendapat yang hampir tanpa batas. Namun demikian, di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal ini dapat dimanfaatkan untuk memproduksi informasi yang tidak benar dan berpotensi mengancam hak asasi manusia.

Ketika garis batas antara produsen dan konsumen informasi itu samar maka Indonesia belum bisa menjawab permasalahan ini dengan payung regulasi yang jelas, terutama untuk mengatur *platform* media sosial dan aplikasi yang tergolong *mass self-communication* seperti disebutkan di atas. Negara perlu mengatur hal ini sebab khalayak mampu mendapatkan informasi dari mana saja dan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran.

Sementara itu, dalam upaya mengatur media sosial, Pemerintah masih harus berhadapan dengan persoalan regulasi karena terdapat tumpang tindih antara UU No. 40 tahun 1999, UU ITE, PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSTE Lingkup Privat, serta yang terbaru adalah Perpres No. 32 tahun 2024 tentang Jurnalisme Berkualitas. Tumpang tindih ini menyebabkan kebingungan, terutama untuk mengatur sejauh mana satu informasi dianggap produk jurnalistik atau bukan; dan sejauh mana satu informasi dianggap melanggar hukum atau tidak. Di tengah situasi itu, masyarakat juga diberi kebebasan yang tidak terbatas untuk menyebarkan informasi di media sosial, entah itu benar atau salah; melanggar hukum atau tidak.

b. Media sosial dapat menciptakan polarisasi

Tantangan media sosial yang berikutnya adalah praktik penyingkiran atau eksklusif. Dalam praktik ini, pembatasan antara kamu vs. aku; kami vs. kalian sangatlah kental. Sebetulnya ini bukan fenomena baru, namun dewasa ini praktik penyingkiran tersebut semakin tajam karena lahirnya teknologi komunikasi dan informasi seperti media sosial.

Pada mulanya, para peneliti yang melakukan studi atas *platform* berpendapat bahwa *platform* media sosial adalah tempat yang netral dan tidak memihak. Melalui media sosial, orang bisa berbicara apa saja tanpa intervensi dari perusahaan *platform*. Perusahaan juga merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk konten yang tersebar di *platform* mereka. Pendeknya, media sosial adalah arena pertarungan narasi yang bebas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di balik alasan netralitas itu, *platform*, termasuk media sosial menerapkan

kurasi algoritma untuk menyeleksi, menata, dan menyajikan konten-konten tertentu di hadapan penggunanya. Media sosial diprogram untuk memilahkan konten yang cocok bagi kita. Sederhananya, ketika dua orang membuka media sosial yang sama, di jam yang sama, konten yang muncul pasti akan berbeda satu sama lain, sebab apa yang tersaji adalah konten yang dinilai cocok untuk mereka.

Perbedaan sajian konten ini dikarenakan sebuah *platform* memiliki parameternya sendiri untuk menetapkan apakah sebuah konten “bagus” atau tidak bagi penggunanya. Kata bagus di sini diberi tanda petik karena “bagus” menurut media sosial berbeda dengan pandangan bagus menurut kaidah-kaidah informasi yang akurat.

Penilaian “bagus”, menurut media sosial, adalah segala konten yang memiliki *shareability* yang tinggi, atau sejauh mana konten itu memiliki potensi untuk menyebar dengan mudah. Agar dapat menyebar dengan mudah, maka sajian konten tersebut haruslah bombastis, cepat, dan menarik, bahkan cenderung *lebay*. Semakin unsur-unsur itu terpenuhi, maka potensi persebaran dan peminatnya akan semakin luas.

Kurasi algoritma itu jugalah yang mengelompokkan masyarakat. Mereka yang menyukai konten tertentu akan dikelompokkan ke dalam satu gelembung di mana mereka akan sering didekatkan dengan orang-orang yang sepemikiran. Selain didekatkan, kurasi algoritma juga menyebabkan penggunanya merasa mendapatkan pembenaran, karena opini dan informasi yang mereka buat diafirmasi oleh orang-orang yang sepemikiran.

Kondisi ini dapat menajamkan polarisasi aku vs. kamu atau kami vs. kalian. Seseorang dapat tidak memercayai atau bahkan

memusuhi sesamanya hanya karena perbedaan pendapat, padahal pendapat itu bisa saja dibangun atas informasi yang salah. Atau, bisa juga seorang anggota keluarga memutuskan hubungan kekeluargaan oleh karena informasi yang dibelokkan di media sosial. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kekuatan narasi, juga benar-salahnya informasi, banyak dipengaruhi oleh media sosial.

c. Confirmation bias

Kita sudah mengetahui bahwa dalam *platform* media sosial terdapat kurasi algoritma yang menentukan apakah sebuah konten dinilai bagus atau tidak bagi penggunaannya. Dengan kecanggihannya, media sosial memiliki hitungan tertentu melacak jejak digital kita; mana saja konten yang kita beri *likes*, dan konten-konten yang kita beri komentar. Pendeknya, media sosial dapat menghitung seberapa banyak interaksi yang kita lakukan pada satu konten; dan ketika kita melakukan interaksi (melihat, mengklik, memberi *likes*, komentar, *save* dan *share*), media sosial menganggap kita *menyukai* konten itu.

Hitungan tersebut disimpan oleh media sosial dan dianalisis. Kelak, ketika kita kembali membuka media sosial, konten-konten itulah yang akan muncul di halaman muka. Dengan bantuan algoritma, media sosial memprioritaskan hal yang ingin kita lihat, siapa yang kita ketahui, apa yang kita inginkan dan butuhkan. Algoritmalah yang membuat pilihan, klasifikasi, dan pada akhirnya merekomendasikan konten-konten yang kira-kira disukai oleh pengguna. Cara kerja algoritma ini juga sangat personal. Dialah yang menentukan, apakah satu konten itu cocok atau tidak bagi penggunaannya.

Hal ini semakin diperparah dengan kehadiran *bot* dalam

media sosial. Bot, yang merupakan kependekan dari robot, adalah akun-akun palsu yang bertugas untuk mengamplifikasi satu informasi. Amplifikasi itu akan memperbesar dan mengintenskan kemunculan satu konten. *Platform* sendiri bisa terkecoh dan melihat konten yang diamplifikasi bot tersebut sebagai konten yang sedang *nge-tren* atau viral. Kita sebagai masyarakat awam dapat terkecoh akan segala sesuatu yang sedang *viral* di media sosial dan celakanya lagi jika kita menganggap bahwa apa yang *viral* adalah apa yang benar.

Dengan fenomena ini, secara kritis kita dapat menilai bahwa di satu sisi media sosial “memenjara” perspektif penggunaannya. Algoritma membuat kita melihat konten yang “itu-itu saja”, yang cocok dengan kita. Ini akan menghasilkan gelembung besar di mana kita tinggal di dalamnya. Dalam gelembung itu, kita hanya dikitari oleh informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Saat seseorang sudah mengalami *filter bubble*, maka dirinya berpikir bahwa pendapatnya merupakan pendapat yang benar karena sering diafirmasi oleh konten-konten yang secara algoritmik cocok dengan seleranya.

Media sosial sekaligus dapat mengarahkan pandangan kita pada satu titik sehingga kita mengalami bias dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk; mana yang benar dan salah. Kini, baik-buruk dan benar-salahnya sebuah informasi menjadi kabur karena informasi yang salah jika ditampilkan terus-menerus, lama-lama diterima menjadi sebuah kebenaran. Inilah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa media sosial itu kerap dipandang sebagai alat yang melestarikan prasangka atau stereotipe. Selain itu, karena basis perspektif dan kebenaran seseorang ditentukan oleh orang-orang yang sepemikiran, maka jarang muncul dialog kritis dan konstruktif yang menjembatani perbedaan.

2. Bagaimana cara mengatasi hal ini?

a. News filtering

Salah satu cara yang cukup efektif untuk menangkal disinformasi adalah melakukan *news filtering*⁵, yakni menyaring berita dan informasi. Bila ada berita yang *viral* namun patut dicurigai sebagai berita bohong, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari pembanding dan melakukan *kroscek*. Kita dapat mengeksplorasi lebih jauh tentang berita atau informasi tersebut melalui pencarian di Google. Sebagai catatan, eksplorasi itu harus didasarkan pada situs-situs berita arus utama (*mainstream news sites*).

Langkah kedua adalah mengidentifikasi siapa yang mengunggah informasi tersebut. Bila informasi itu dibagikan di media sosial, kita dapat membuka halaman profil dari si penyebar informasi. Dari langkah ini akan terlihat identitas dan tujuan para pemengaruh (*influencer*) yang menjadikan berita atau informasi itu *viral*. Kadang, satu akun dapat terdeteksi sebagai akun bot. Ciri-ciri umum akun bot adalah aktivitas unggahan yang begitu tinggi dalam sehari yang bisa lebih dari 20 unggahan. Lalu, akun bot juga jarang mengunggah informasi pribadi atau cenderung anonim. Selain itu, akun bot biasanya juga tidak pernah mengunggah konten asli. Konten-konten yang diunggah biasanya diambil dari akun lain. Untuk beberapa media sosial yang menyediakan fitur tagar atau *hashtag* (#), akun bot juga cenderung menggunakan tagar yang sedang populer kala itu.

5. Thoms, J. (2016). Believing the news: Exploring how young Canadians make decisions about their news consumption. Unpublished doctoral dissertation, The University of Western Ontario, Canada. Retrieved from <http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=5898&context=etd>

b. Menghindari konten emosional dan konten konspirasi

Dalam praktik bermedia sosial, kita juga perlu waspada ketika melihat konten yang begitu mudah memancing amarah, ketakutan, atau rasa iba/kasihannya sebab konten ini akan memancing interaksi kita untuk menonton/membaca, memberi *likes* dan *comments* atau menyimpan (*save*) konten tersebut. Bila konten tersebut berhasil menarik perhatian dan interaksi pengguna, maka potensi konten itu untuk menjadi viral akan semakin besar, dan orang yang terlibat secara emosional juga akan semakin banyak.

Kita juga perlu menghindari konten yang mengandung asumsi-asumsi, yang kebenarannya sulit dibuktikan. Biasanya konten ini “menuduh” keberadaan komplotan elite, jahat, dan tidak terdeteksi di balik sebuah peristiwa. Kita juga perlu waspada bila melihat konten yang memuat sebuah pendapat namun konten tersebut tidak menyertakan nama atau menyamarkan sosok yang menyatakan pendapat. Beberapa contoh kalimat yang sering digunakan untuk menarasikan konten semacam ini adalah:

- Kata pakar, dunia akan kiamat di tahun 2040
- Peneliti berpendapat bahwa ekonomi Indonesia akan terpukul parah
- Ahli dari Amerika berpendapat bahwa akan terjadi hujan salju di Indonesia

Pakar dan peneliti yang dimaksud dalam kalimat itu tidak jelas. Bisa jadi, hal itu disampaikan untuk memengaruhi pembaca agar mereka lebih percaya pada informasi palsu yang disampaikan.

- c. Menghindari polarisasi kelompok dan tidak mendiskreditkan mereka yang berseberangan dengan kita

Setelah kita tahu bahwa media sosial berpotensi untuk menciptakan polarisasi, maka kita harus sadar bahwa kita tidak perlu ikut serta dalam diskusi-diskusi yang memperuncing polarisasi. Sebab, ketika kita berinteraksi dan ikut serta dalam diskusi-diskusi yang sudah terpolarisasi, maka media sosial akan menilai kita suka dengan informasi atau berita tersebut. Alhasil, kita akan sering melihat konten-konten sejenis.

Lalu, bila sudah telanjur “tercebur” dalam diskusi dan situasi yang sudah panas, kita perlu menahan diri untuk tidak mendiskreditkan lawan bicara dengan cara menyerang secara personal (*ad hominem*) dan tidak melakukan *doxing* atau membuka data diri seseorang dan menyebarnya tanpa persetujuan pihak terkait.

3. Strategi promosi keberagaman keber-agamaan

a. Menjadi *powerful users*

Untuk menjadi agen pembawa damai di media sosial, pengguna perlu menjadi *powerful users* dan bukan *power users*. *Powerful users* merujuk pada sosok yang kontennya memiliki pengaruh yang kuat dan dapat memengaruhi persepsi publik. Sedangkan *power users* merujuk pada pengguna yang sering menggunakan media sosial tanpa bertujuan untuk memengaruhi persepsi publik.

Lalu, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi *powerful users*? **Pertama**, kita perlu terjun dalam diskusi-diskusi yang ada di media sosial dan merangkai opini kita

dengan *frame* yang konstruktif. Penyampaian opini juga harus diikuti dengan sikap saling menghormati dengan tetap memberikan persuasi agar atensi publik terarah pada opini kita. **Kedua**, berani berinteraksi dan menjalin percakapan dengan pengguna yang memiliki pandangan yang berbeda, namun tetap waspada dengan risiko *backlash* (serangan balasan) dan *cyberbullying*. **Ketiga**, menambahkan penggunaan berbagai fitur-fitur interaktif yang disediakan *platform* media, seperti *polling*, *collaboration*, atau *hyperlink*. Fitur-fitur ini dapat mendukung pesan perdamaian yang kita ciptakan.

Pada akhirnya, pesan dengan nuansa damai itu pasti bernuansa diskursif. Pesan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian tersebut harus dibawa ke ranah publik. Mau tidak mau, kita perlu membangun percakapan kolektif, dengan belajar dan berdiskusi dengan orang lain di jagat media sosial, bahkan dengan orang yang berseberangan dengan kita.

b. Berani mengenal dan menjalin relasi positif dengan orang yang berseberangan dengan kita

Salah satu karakter media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan keberagaman adalah tidak adanya sekat ruang. Siapa pun dapat hadir di mana pun dan ini bisa dilakukan kapan saja. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berjumpa dan menjalin dialog di antara mereka yang memiliki perbedaan pandangan. Salah satu contohnya adalah situs *Mepeace* yang mengakomodasi pertemuan rakyat Israel dan Palestina yang memiliki tujuan untuk membangun narasi perdamaian.

Ada pula contoh proyek dari Facebook, yakni “Crack in the Wall” yang juga mengakomodasi warga Israel dan Palestina untuk bertemu. Proyek ini berhasil mengurangi ketakutan, kebencian, dan ketidakpercayaan yang dimiliki oleh partisipannya. Ini mengindikasikan bahwa konflik bermula dari keengganan kita untuk mengenal dan berelasi dengan mereka yang berseberangan dengan kita.

c. Peran besar aktor dan isi pesan dalam mengampanyekan keberagaman

Dalam konteks aktivisme digital, terutama yang berkaitan dengan media sosial, ada dua hal penting yang menjadi penentu apakah narasi kita akan berhasil atau tidak. Kedua hal itu adalah peran aktor dan isi pesan yang disampaikan. Beberapa studi tentang aksi di dunia digital mengatakan bahwa *peran aktor* itu *cukup penting* dalam membangun *aksi bersama*. Bila satu aktor melempar isu dan ia dipandang cukup kredibel serta memiliki jumlah pengikut yang besar maka pesannya memiliki potensi untuk mendapatkan perhatian dari warganet.

Isi pesan juga berperan penting dalam aksi digital. Kecenderungan orang untuk *kepo* dan keinginan untuk mencari informasi yang kredibel (*culture of searching*) menjadi faktor pendorong yang sangat kuat agar satu pesan dapat tersebar secara luas dan meningkatkan partisipasi warganet. Bila pesan yang disampaikan cukup mengundang rasa penasaran dan menyajikan satu informasi yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka potensi warganet untuk menyukai informasi itu akan meningkat. Selain itu, patut diingat bahwa motivasi untuk berpartisipasi secara digital itu juga ditentukan oleh kepercayaan bahwa mereka dapat menjadi bagian dari sebuah

perubahan dan membuat kondisi lingkungannya menjadi lebih baik.

d. Belajar dari era keemasan blog: berdiskusi dan berkomentar positif tanpa kepentingan tertentu

Saat era blog sedang berkembang dan ramai digunakan banyak orang, ada istilah *blogosphere* untuk menyebut ruang publik yang tercipta karena popularitas satu artikel yang cukup panjang di sebuah laman blog. Karena artikel blog itu banyak ditanggapi, baik di kolom komentar atau di laman lain, laman blog itu pada akhirnya menjadi ruang publik yang menyatukan berbagai komunitas dan orang-orang yang memiliki ketertarikan atas artikel tersebut.

Berbeda dengan cara kerja media sosial terkini, blog tidak memiliki hitungan algoritma secanggih media sosial seperti Instagram, X, TikTok, Facebook, atau Youtube. Artikel blog juga cenderung tidak memiliki motif ekonomi dan biasanya ditulis oleh *orang-orang biasa*, sehingga interaksi yang muncul di dalamnya cenderung otentik dan tanpa tendensi untuk membuat polarisasi atau kubu-kubu. Kebutuhan mereka untuk berpartisipasi, baik sebagai penulis ataupun pemberi komentar, murni untuk berdiskusi atau memberi apresiasi.

Adaptasi atas cara kerja *blogosphere* ini sempat digunakan masyarakat Pakistan di media sosial untuk mengadvokasi mereka yang terpinggirkan dan menyebarkan pesan-pesan kesetaraan dan keadilan. Media sosial, dengan segala fiturnya, sebenarnya juga dapat mengakomodasi cara kerja blog, yakni menuliskan cerita-cerita personal. Namun cerita-cerita itu perlu disampaikan secara otentik tanpa tendensi untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Yang menjadi nilai lebih

dari teknik ini adalah kita tidak memerlukan satu keterampilan teknis dalam mengoperasikan media sosial.

e. Menunda reaksi spontan

Harus diakui, ketika kita melihat berita atau informasi yang memancing amarah, kita terdorong untuk turut menumpahkan emosi kita ke dalam media sosial. Untuk mengatasi hal ini, cara yang cukup ampuh adalah menahan setiap reaksi selama beberapa menit. Waktu ini kita gunakan untuk berpikir berkali-kali, apakah reaksi yang akan saya salurkan itu akan memperbaiki atau malah memperburuk keadaan.

Banyak studi telah memperingatkan bahwa media sosial memperbesar ketidaksadaran manusia untuk mengambil keputusan. Media sosial telah membiasakan kita untuk memberikan reaksi spontan, seperti mengetuk dua kali untuk memberi *likes*, *scroll* jika satu informasi atau berita dirasa tidak menarik, bahkan berpindah aplikasi media sosial jika kita sudah bosan dengan satu aplikasi yang sedang kita gunakan. Segala kecepatan yang ditawarkan media sosial ternyata juga menuntut reaksi yang serba cepat, dan kecepatan ini tidak memberi celah sedikit pun untuk berpikir kritis dan menyertakan pertimbangan moral. Oleh sebab itu, agar tidak ikut terpancing dengan reaksi sesaat, kita perlu membiasakan untuk menunda reaksi untuk turut "*nimbrung*" di media sosial.

BAB V

KISAH-KISAH SUKSES

Narasi atau kisah memegang peranan yang penting untuk membentuk kesadaran. Cara bercerita, gaya bahasa yang digunakan, dan siapa yang bertutur dengan karakter masing-masing sekaligus juga memberikan kewenangan yang lebih jika itu dilakukan oleh para pelakunya.

Bab ini merupakan kumpulan tulisan yang dikisahkan oleh para pemimpin informal di daerahnya masing-masing. Apa yang dituliskan dan bagaimana mereka menceritakan sepenuhnya dilakukan oleh mereka sendiri. Tim Unika Soegijapranata hanya memberikan kisi-kisi sederhana tentang apa yang harus dituliskan melalui dua pertemuan *online* (daring) dan satu pertemuan *offline* (luring). Urutan daerah dalam bab ini dilakukan secara alfabetis dan tidak menunjukkan yang pertama lebih penting dibandingkan sesudahnya.

A. Ambon

Memahami Konsep Kehidupan Orang Basudara

Bai Tualeka

Maluku atau dijuluki sebagai tanah raja-raja memiliki keanekaragaman budaya yang masing-masing memiliki keunikan. Sistem sosial hidup *orang basudara* merupakan sebuah tindakan interaksi berpola yang dipraktikkan oleh masyarakat Kepulauan Maluku yang bersifat lintas negeri dan pulau. Sistem sosial "*hidop orang basudara*", selain mengandung sebuah pandangan hidup, juga merupakan gagasan luhur yang fundamental tentang hakikat diri masyarakat Kepulauan Maluku yang luas dan multikultur. Konsep kehidupan orang basudara merupakan eksistensi dan pemaknaan dalam kehidupan keragaman. Konsep ini menghidupkan dan menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Dalam kehidupan orang basudara, mereka belajar untuk saling menerima, mengakui, dan menghargai serta bekerjasama untuk kebahagiaan dan kemajuan hidup bersama. Sistem sosial orang basudara merupakan sebuah pola manajemen sosial masyarakat kepulauan di wilayah Kepulauan Maluku dalam rangka membebaskan kehidupan bersama. Makna filosofisnya, secara tegas dalam sikap pengakuannya, bahwa masyarakat Maluku yang majemuk itu selalu terbuka, saling menyapa, dan menghidupkan. Sistem sosial yang dimaknai dengan kata "*katong samua orang basudara*", "*potong di kuku rasa di daging*", "*ale rasa beta rasa*" mengandung makna bahwa rasa yang sama merekatkan kehidupan orang Maluku yang majemuk,

tersegregasi untuk mengenal satu dengan yang lain sebagai saudara dan saling menerima. Kehidupan orang basudara mengamanatkan nilai-nilai kerukunan sejati yang religius dan berkelanjutan dalam konteks kemajemukan. Dalam kehidupan orang basudara, mereka menumbuhkembangkan dinamisme kemanusiaan orang Maluku dalam kehidupan berbangsa dan kebhinekatunggalikaan.

Dalam konteks inilah guru didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial kehidupan orang Maluku dalam mata pelajaran tertentu, seperti yang terjadi pada 2019 di Kota Ambon. Proyek “*guru bacarita, guru kebhinekaan*” menekankan pada penguatan guru dan pemahaman tentang memaknai nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, pendekatan kemanusiaan, dan perdamaian. Konsep ini diberikan agar guru dapat melakukan intervensi dalam pola belajar-mengajar bersama peserta didik untuk membangun karakter anak-anak tersebut. Mengapa penting, karena dalam kehidupan pasca-konflik terdapat segregasi tempat tinggal berbasis agama: anak-anak yang hidup dalam mayoritas agamanya dapat memunculkan sikap intoleransi. Proyek ini salah satunya mengajak para guru untuk mengunjungi beberapa rumah ibadah kemudian berefleksi. Ada beberapa guru yang mengakui bahwa selama ini mereka tidak pernah masuk di dalam masjid, gereja, pura, atau wihara. Refleksi guru dapat dijadikan sebuah proses pembelajaran dalam mendorong kreativitas mereka agar dapat menginisiasi pembelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai toleransi.

Selain itu, di tahun yang sama, program *peace generation* dilakukan bagi siswa MTs Hasyim Asy'ari Ambon, di mana ketika acara berlangsung beberapa anak mengajukan pertanyaan mengenai makna perayaan Paskah yang kemudian dijelaskan oleh seorang ibu pendamping komunitas yang beragama Kristen.

B. Denpasar

Membangun Kerukunan dan Moderasi Beragama Melalui Kepemimpinan dan Akademisi *Ida Bagus Subrahmaniam Saitya*

Sebagai akademisi, ketua Forum Generasi Muda Lintas Agama (Forgimala) Kota Denpasar, serta wakil ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Provinsi Bali, Ida Bagus Subrahmaniam Saitya yang lebih dikenal dengan Tugus Bram telah memainkan peran strategis dalam memperkuat kerukunan umat beragama dan moderasi beragama di Bali. Dengan pendekatan ilmiah, dialog lintas agama, serta keterlibatan aktif dalam organisasi keagamaan, Tugus Bram menjadi penggerak utama dalam menjaga toleransi di tengah masyarakat yang beragam.

Peran Akademisi dalam Moderasi Beragama dan Penelitian Toleransi

Sebagai akademisi, Tugus Bram telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung penguatan nilai-nilai moderasi beragama lewat penelitian mengenai toleransi beragama dan keyakinan. Melalui kontribusi yang konsisten, Tugus Bram telah menjadi penggerak dalam upaya menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya moderasi beragama di tengah masyarakat yang beragam.

Narasumber Moderasi Beragama

Dalam peran sebagai narasumber moderasi beragama, Tugus Bram telah berbicara di berbagai forum yang membahas pentingnya moderasi beragama dalam menjaga keseimbangan sosial di Indonesia. Melalui diskusi yang dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat, Tugus Bram menyampaikan pendekatan moderasi sebagai jalan untuk mengatasi potensi konflik dan mempromosikan kerukunan antar-umat beragama.

Sosialisasi dan Penyusunan Pedoman Moderasi Beragama

Sebagai peserta dalam sosialisasi penguatan moderasi beragama, Tugus Bram aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan akademik. Kegiatan ini memberikan wawasan yang lebih luas dan memperkaya pemahaman Tugus Bram mengenai langkah-langkah praktis dalam memperkuat moderasi beragama di kalangan masyarakat.

Selain itu, Tugus Bram juga turut serta menyusun pedoman Rumah Moderasi Beragama di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pedoman ini menjadi landasan penting bagi universitas dalam mempromosikan moderasi beragama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan harmonis.

Pengurus Rumah Moderasi Beragama dan Informan Toleransi

Sebagai pengurus Rumah Moderasi Beragama di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Tugus Bram memiliki peran strategis dalam menjalankan program-program yang mendukung

moderasi beragama di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Rumah Moderasi Beragama ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang mendorong dialog antar-umat beragama, penguatan nilai-nilai toleransi, dan penanaman semangat moderasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tugus Bram juga berkontribusi sebagai informan dalam penelitian toleransi beragama yang dilakukan oleh dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Melalui pengalaman dan penelitian yang dilakukan, Tugus Bram juga memberikan wawasan penting mengenai kondisi toleransi beragama di Bali dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keharmonisan.

Penelitian tentang Toleransi Beragama dan Berkeyakinan

Sebagai akademisi yang aktif dalam penelitian mengenai toleransi beragama dan berkeyakinan, Tugus Bram terus menggali isu-isu krusial yang berkaitan dengan keberagaman dan bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Penelitian Tugus Bram memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika toleransi, tidak hanya di Bali tetapi juga dalam konteks nasional.

Dengan pengalaman akademik dan kontribusi aktif dalam moderasi beragama, Tugus Bram telah berperan penting dalam membangun fondasi bagi penguatan kerukunan antar-umat beragama di Indonesia. Peran Tugus Bram sebagai akademisi tidak hanya berdampak dalam lingkungan kampus, tetapi juga di tingkat nasional melalui berbagai kegiatan dan penelitian yang dilakukan.

Forgimala dan Denpasar, Kota Toleran Berbasis Budaya

Sebagai ketua Forum Generasi Muda Lintas Agama (Forgimala) Kota Denpasar periode 2021-2026, Tugus Bram memegang peran penting dalam menciptakan kerukunan antar-umat beragama di kalangan pemuda. Forgimala, yang merupakan sayap dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), berfungsi sebagai wadah bagi generasi muda untuk saling bertukar pandangan dan berdialog mengenai isu-isu lintas agama, sekaligus menjadi pilar dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Denpasar.

Memfasilitasi Dialog Lintas Agama

Dalam perannya sebagai ketua, Tugus Bram secara aktif memfasilitasi dialog antarpemuda dari berbagai latar belakang agama. Melalui pertemuan rutin, Forgimala mempromosikan ruang untuk diskusi terbuka mengenai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan beragama serta menemukan solusi yang mendukung kerukunan di masyarakat. Pertemuan ini berfungsi untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi, sekaligus menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antar-umat beragama.

Melalui kepemimpinan Tugus Bram, dialog lintas agama yang difasilitasi oleh Forgimala berhasil meminimalisasi potensi konflik berbasis agama yang mungkin terjadi di Denpasar, khususnya di kalangan generasi muda. Pendekatan dialog ini memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghormati di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.

Menjaga Kebebasan Beragama di Denpasar

Forgimala juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Denpasar, yang selaras dengan visi kota sebagai “kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju”. Tugus Bram berperan aktif dalam memastikan setiap individu dan kelompok agama memiliki ruang untuk menjalankan keyakinan mereka dengan bebas tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan misi Kota Denpasar yang berfokus pada penguatan stabilitas sosial dan pengembangan budaya sebagai fondasi masyarakat yang inklusif.

Pencapaian ini membawa Kota Denpasar diakui secara nasional sebagai salah satu kota paling toleran. Menurut Setara Institute, Denpasar berhasil menduduki peringkat ke-26 dari 94 kota di Indonesia dalam Indeks Kota Toleran 2023. Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa sinergi antara visi kota, misi pemerintah, dan peran aktif organisasi seperti Forgimala berkontribusi besar dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan di Denpasar.

Forgimala, di bawah kepemimpinan Tugus Bram, tidak hanya menjaga harmoni, tetapi juga menjadi model bagaimana keberagaman dapat dirayakan dan menjadi kekuatan. Denpasar kini tidak hanya berkembang secara ekonomi dan budaya, tetapi juga menjadi kota yang aman, toleran, dan kreatif, di mana nilai-nilai multikulturalisme terjaga dengan baik.

Peran Strategis dalam Menjaga Kerukunan Beragama: Wakil Ketua Peradah Bali

Sebagai wakil ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Provinsi Bali periode 2021-2024, dan sebelumnya

sebagai ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kota Denpasar periode 2015-2018 dan 2019-2022, Tugus Bram memainkan peran krusial dalam memperkuat kerukunan antar-umat beragama, khususnya di kalangan pemuda Hindu. Peradah Bali berperan aktif dalam memfasilitasi dialog lintas agama serta mempromosikan nilai-nilai budaya Bali sebagai landasan harmoni dan toleransi di antara masyarakat.

Pentingnya Dialog Lintas Agama

Pada 2019, sebagai ketua Peradah Kota Denpasar, Tugus Bram berpartisipasi dalam diskusi bersama Forum Pemuda Lintas Agama Kota Tomohon, Sulawesi Utara yang menjadi momen penting dalam memperluas jaringan dan memperkuat hubungan antarpemuda lintas agama di luar Bali. Forum ini membahas tantangan dalam menjaga kerukunan di masyarakat majemuk serta menemukan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengalaman dalam diskusi ini memperkaya perspektif Tugus Bram mengenai pentingnya dialog antar-agama, yang kemudian dibawa dalam kegiatan-kegiatan Peradah. Berkat pendekatan ini, Tugus Bram mampu memfasilitasi dialog-dialog terbuka antara pemuda Hindu dan komunitas agama lainnya di Bali, memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai perbedaan.

Peran dalam Dharma Santih Hari Raya Nyepi

Pada 2022, Tugus Bram dipercaya menjadi narasumber dalam acara Dharma Santih Hari Suci Nyepi di Universitas Udayana, sebuah acara penting yang mempromosikan nilai-

nilai keagamaan dan budaya Hindu di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Dalam peran ini, Tugus Bram memberikan pandangan tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati di tengah-tengah keberagaman agama, terutama dalam konteks Bali yang kental dengan tradisi dan budaya.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat peran Tugus Bram sebagai pemimpin, tetapi juga memperlihatkan kontribusi aktif dalam menyebarkan nilai-nilai budaya dan agama yang mendukung kehidupan harmonis.

Keterlibatan Aktif dalam Forum dan Diskusi Nasional

Selain itu, Tugus Bram juga dikenal sebagai peserta aktif dalam berbagai kegiatan dan diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun NGOs. Diskusi-diskusi ini berfokus pada isu-isu krusial seperti kebebasan beragama, kerukunan sosial, dan pengembangan masyarakat berbasis budaya. Keterlibatan Tugus Bram dalam forum-forum ini memperlihatkan dedikasi dalam menyuarakan kepentingan komunitas serta memperkuat pemahaman lintas agama untuk menciptakan solusi bersama.

Sebagai wakil ketua Peradah Bali, peran Tugus Bram tidak hanya terbatas pada organisasi internal, tetapi juga menjangkau lingkup yang lebih luas melalui kolaborasi dan keterlibatan dalam kegiatan lintas agama serta lintas sektor. Melalui pendekatan ini, Tugus Bram berhasil memperkuat posisi Peradah Bali sebagai organisasi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Bali dan sekitarnya.

C. Depok

Melati dan IRET: Refleksi Kemanusiaan di Tengah Ancaman Bangsa

Dr. Cutra Sari, M.Ag.

“Ibu kan Muslimah, katanya lulusan pesantren dan seorang ustazah, kenapa Ibu tidak pakai cadar? Sayang sekali, tidak sempurna iman Ibu.”

Pada kesempatan berikutnya ia berkata, *“Ternyata di sini banyak gereja ya, Bu! Pantas saya merasa malas salat, malas ibadah, karena terikut suasana tidak Islami daerah sini.”*

Melati (bukan nama sebenarnya) beberapa kali bertemu dengan saya sambil membawa anaknya yang masih balita. Ia beralasan ingin berkonsultasi tentang masalah keluarga. Awalnya, pembicaraan kami memang berfokus pada persoalan keluarga, tetapi kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai masalah keagamaan. Melati dulunya seorang guru dan sarjana, tetapi ia melepaskan pekerjaannya atas tuntutan suaminya. Ia mendapat doktrin keagamaan dari sang suami, yang belakangan berpoligami dan meninggalkan Melati tanpa nafkah serta status yang jelas.

Dalam dialog kami, Melati selalu menyoal tentang pakaian saya yang dianggapnya kurang *kaffah* (sempurna) karena tidak bercadar. Atau, dia menyalahkan kondisi imannya yang fluktuatif (naik turun) karena banyaknya gereja di sekitar tempat tinggalnya (di Kota Depok). Dalam pembicaraan dengan Melati, saya mengajaknya memahami bahwa perintah Allah dalam Al-Qur’an tidak boleh dipahami secara parsial atau hanya dari sisi tekstual semata. Al-Qur’an harus dipahami

secara utuh, dengan mempertimbangkan konteks dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Betul bahwa Islam menghendaki umatnya menutup aurat, tetapi batasannya memiliki beragam pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, penting untuk menghormati teman-teman Muslimah yang memilih pandangan atau pendapat yang berbeda dari kita dalam hal ini.

Tentang imannya yang naik turun karena adanya gereja, sekilas terkesan lucu, dibuat-dibuat, dan awalnya saya menganggap hal itu sebatas candaan. Namun kemudian saya tersadar bahwa hal ini tidak dapat disepelekan. Pengalaman saya sebagai aktor resolusi konflik (ARK) Kementerian Agama, beberapa kali membersamai mereka yang memiliki pemahaman serupa dengan Melati. Jangankan non-Muslim, umat Islam yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka pun halal darahnya untuk ditumpahkan.

Saat mendengar keluhan Melati tentang kondisi imannya yang naik turun karena suasana yang kurang islami, pikiran saya melayang ke Negeri Sakura. Beberapa bulan yang lalu, saat Ramadan, saya berkesempatan menjadi *dai ambassador* di sana.

Kepada Melati, saya ceritakan bagaimana teman-teman Muslim-Muslimah di Jepang jarang sekali mendengar azan, karena masjid atau musala di sana sangat jarang ditemui. Mereka baru bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah pada pukul 10 malam, setelah lelah bekerja sepanjang hari. Salat pun sering dilakukan di rumah dengan suasana sederhana, tanpa pengeras suara atau gemerlap tradisi khas Ramadan seperti di Tanah Air.

Namun, justru di tengah keterbatasan itu, banyak dari mereka merasa menemukan hakikat iman. Jauh dari kampung

halaman, mereka merasakan manisnya ibadah dan kedekatan dengan Allah yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan.

Mendengar cerita itu, Melati terdiam. Saya berharap, setelah mendengar pengalaman ini, ia dapat melihat kondisi dirinya dari sudut pandang yang berbeda.

Pemahaman ekstrem seperti yang dimiliki Melati sangat mengkhawatirkan dan, sejak dahulu, menjadi ancaman bagi eksistensi Bangsa Indonesia. Pemahaman ini melupakan tugas utama Nabi Muhammad saw. saat diutus ke muka bumi adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.* (QS. al-Anbiya' [21]: 107).

Adalah Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al Jufri, seorang ulama kontemporer, yang menulis kitab *al-Insaniyyah Qobla at-Tadayyun* (Perikemanusiaan Sebelum Religiositas). Perikemanusiaan merupakan sifat-sifat alami dan natural pada manusia, yang Allah ciptakan menjadi fitrahnya. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada agenda IRET (intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan teorisme) seyogianya Melati dan kita semua memikirkan ulang dengan menggunakan potensi akal yang sudah Tuhan berikan. Sebagaimana kehendak Al-Qur'an, *afalaa yatafakkafrun, afalaa yataadabbarun.* (Apakah engkau tidak memikirkan? Apakah engkau tidak merenungkan?)

Dalam dua tahun terakhir, BNPT menyebut bahwa gerakan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme telah mengubah pola serangan mereka dari serangan terbuka menjadi pendekatan lunak (*soft approach*). Jika sebelumnya pola serangan yang sering dilakukan berupa serangan bom

terhadap rumah ibadah, fasilitas publik, aparatur negara, dan target lainnya, kini mereka lebih berfokus pada pola-pola lunak seperti penyebaran ideologi melalui pendidikan, penyusupan agen ke dalam ranah pemerintahan, dan cara-cara lain yang lebih tersembunyi.

Itulah mengapa dalam dua tahun terakhir tidak terjadi serangan terbuka terhadap objek vital dan simbol agama seperti rumah ibadah, fasilitas publik dan lainnya. Bahkan, jika boleh dikatakan, *zero attack*. Namun, hal ini tetap patut menjadi perhatian serius. Gerakan dan ideologi semacam ini tidak pernah benar-benar padam dan terus mencari cara untuk tetap eksis, menyusup melalui berbagai celah yang ada di masyarakat, seperti digambarkan dalam pola *soft approach* di atas.

Melihat fenomena IRET yang terus mengancam Bangsa Indonesia, patut menjadi pertanyaan: mengapa manusia, yang pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sering kali tidak mampu mencontoh sifat kemaharahmanan dan kemaharahiman-Nya?

Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, saya meminjam pernyataan Ralf Dahrendorf, seorang pakar transformasi konflik. Ia mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki sisi ganda. Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan seperti malaikat, yang hanya berorientasi pada kebaikan, dan tidak pula seperti setan, yang hanya berorientasi pada keburukan. Manusia memiliki sisi ganda: di satu sisi, manusia berpotensi membawa perdamaian, tetapi di sisi lain sekaligus berpotensi menimbulkan perpecahan.

Pendapat Dahrendorf ini diperkuat oleh Annemarie Schimmel, yang menggambarkan manusia dengan pernyataan

"Keadaan manusia adalah seperti sebuah sayap yang diambil dari malaikat, yang kemudian diikatkan pada ekor keledai. Keledai itu secara kebetulan menjadi malaikat berkat cahaya yang dibawa oleh sayap malaikat tersebut." Penggambaran ini bukan hanya menunjukkan hakikat dualistik manusia yang terdiri atas raga dan jiwa, tetapi juga memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk dengan berbagai kemungkinan. Ia bisa menjadi hina seperti keledai jika lebih mengedepankan dimensi jasmaninya, atau menjadi mulia seperti malaikat jika lebih mengutamakan dimensi rohaninya.

Islam juga menggambarkan dualitas ini dalam QS. Asy-Syams [91]: 7-8, *"Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya."*

Para *mufassir* (baca: penulis Kitab Tafsir) menggambarkan bahwa dalam ayat ini Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Allah ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna (*ahsanu taqwim*). Setelah menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan baik. Sejalan dengan apa yang digambarkan Annemarie Schimmel dan Ralf Dahrendorf di atas.

Selaras dengan dualitas manusia, kita terkadang melihat manusia bertindak bertolak belakang dengan hakikat penciptaannya. Ada manusia yang bertindak seperti Pencipta, menjustifikasi bahwa praktik agamanya adalah yang terbaik dan paling benar, sehingga paling layak menjadi penghuni surga. Mereka mengklaim bahwa praktik agama orang atau kelompok lain salah, menganggap pihak lain memang pantas ditempatkan di neraka.

Pemahaman sempit seperti ini melupakan bahwa dalam

Al-Qur'an, Allah dengan sangat gamblang menyebutkan bahwa surga-Nya seluas langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran [3]: 133: "*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.*"

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak sepatutnya seorang atau sekelompok orang merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang atau kelompok lain, apalagi merasa lebih pantas masuk surga dibandingkan yang lain. Surga yang Allah sediakan, memiliki luas seluas langit dan bumi—sangat luas sehingga sangat cukup untuk menampung seluruh anak manusia. Tugas manusia adalah bertakwa, yang dalam Islam dimaknai sebagai menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Melalui kisah Melati dan Muslimah lainnya yang memiliki pemahaman serupa, kita harus menyadari bahwa tugas kita ke depan sangatlah berat. Tugas ini menjadi lebih menantang dan panjang, terlebih jika dilakukan sendirian. Tugas itu adalah mengajak Melati dan teman-temannya untuk menjaga warisan para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang telah mewariskan satu konsensus penting dalam berbangsa dan bernegara, yaitu kesepakatan untuk bersatu dalam perbedaan (*Bhineka Tunggal Ika*; berbeda-beda tetapi tetap satu jua), dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Konsensus ini secara nyata telah berhasil menyatukan beragam kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama dijaga dan dipadukan dengan kearifan lokal serta adat istiadat.

Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, sementara ritual agama dan budaya saling berjalin dalam harmoni yang damai. Hal ini mencerminkan bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan jika dirawat dan dihormati bersama.

Wallahu a'lam bish Shawwab...

Ketika Toleransi Menjadi Praktik: Sebuah Kisah dari Depok

Abdul Hakim

Kota Depok merupakan salah satu daerah yang heterogen sekaligus kota penyangga Ibu Kota. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini selalu dianugerahi juara satu kota paling intoleran se-Indonesia, berdasarkan hasil riset Setara Institute.

Sejak 2017 saya mengajar di salah satu sekolah swasta yaitu Lazuardi Al Falah yang berada di jalan utama Kota Depok, Margonda Raya, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) atau biasa disebut *Islamic Studies*. Ada salah satu pengalaman menarik yang tak bisa saya lupakan, yakni ketika saya berjumpa dengan salah seorang siswa kelas VIII yang ternyata seorang non-Muslim, padahal Sekolah Lazuardi dikenal sebagai *Islamic school*.

Anggap saja namanya Ayya. Ia mengikuti pembelajaran seperti biasa, berinteraksi dengan teman-teman, guru, maupun staf. Dari pengamatan saya selama kurang lebih satu setengah tahun, saya melihat perkembangan Ayya hingga ia naik ke kelas IX. Artinya, konsep atau pelajaran toleransi di Lazuardi

tidak lagi sekadar teori semata, tetapi sudah teraplikasikan dan berjalan dengan baik. Saya secara personal mendapatkan banyak pelajaran dari sana.

Ayya selalu mengikuti pembelajaran dengan baik, bahkan ketika sesi pelajaran Islamic Studies, yang sebetulnya tidak harus diikuti olehnya. Selain itu, Ayya juga terlihat mengikuti unit aktivitas seperti ekstrakurikuler Kaligrafi. Saya melihat ia dapat berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya.

Di saat itulah momentum toleransi terbangun satu sama lain di antara siswa-siswi dan terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan serius maupun sebatas selentingan canda terkait pengalaman Ayya mengikuti kelas Islamic Studies. Pengalaman tersebut menjadikan semakin eratnya hubungan pertemanan di dalam bingkai saudara sebangsa setanah air.

Dari Wihara hingga Pesantren: Refleksi Toleransi dalam Keberagaman, Pengalaman Pertama Pelajar NU

Sebagai perwakilan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Depok, saya mendapat kesempatan berharga untuk mengikuti kegiatan Peace Heritage yang diadakan oleh Peace Leader Indonesia (PLI) Regional Jawa Barat. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk benar-benar menyelami arti keberagaman melalui kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang merepresentasikan harmoni antar-agama. Dengan semangat ingin belajar, saya bergabung dengan peserta lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan.

Sebagai tambahan, PLI merupakan sebuah gerakan pemuda yang berfokus pada promosi perdamaian, toleransi, dan moderasi beragama melalui kegiatan lintas agama, suku, dan budaya. Gerakan ini bertujuan untuk melibatkan generasi

muda dalam aksi nyata yang mendorong kebersamaan, keadilan sosial, dan pencegahan ekstremisme.

Wihara Dhanagun menjadi destinasi pertama dalam program Peace Heritage yang saya ikuti. Tempat ibadah umat Buddha tersebut terletak di pusat Kota Bogor. Saat melangkah masuk, saya terkesan dengan ornamen-ornamen khas Tionghoa yang menghiasi wihara. Aroma dupa yang khas serta suasana tenang membuat saya merasa damai. Saya sempat berbincang dengan salah satu pengurus wihara yang menjelaskan makna filosofis di balik patung-patung dan ukiran yang ada di sana. Ini adalah kali pertama saya memasuki tempat ibadah agama lain, dan saya merasa kagum dengan bagaimana mereka menjaga tradisi dan nilai-nilai spiritual mereka.

Selanjutnya, kami mengunjungi makam Raden Saleh Syarif Bustaman yang terkenal dengan sebutan Raden Saleh, seorang seniman kenamaan yang fenomenal. Sebagai pelukis legendaris dan tokoh sejarah, kisah hidup Raden Saleh mengajarkan kami tentang pentingnya menghormati warisan budaya lintas agama dan identitas. Di lokasi ini, saya merenungi bagaimana keberagaman telah menjadi bagian dari sejarah bangsa kita. Refleksi ini semakin memperkuat keyakinan saya bahwa keberagaman bukanlah halangan, melainkan kekuatan yang menyatukan.

Kunjungan yang paling menorehkan kesan mendalam bagi saya adalah ketika kami masuk ke dalam bangunan Gereja Katedral Bogor. Perasaan campur aduk muncul karena ini adalah pertama kalinya saya memasuki gereja. Namun, sambutan hangat dari para pastur dan suasana khuyu di dalam gereja menghapus rasa canggung saya. Dalam kesempatan itu mereka menjelaskan sejarah gereja dan makna simbol-simbol di dalamnya. Saya merasa kagum bagaimana nilai-nilai cinta

kasih dan perdamaian sangat dijunjung tinggi di sana, serupa dengan ajaran Islam yang saya yakini. Saya menyadari bahwa meskipun berbeda, setiap agama memiliki tujuan yang sama: kedamaian dan kebaikan bagi umat manusia.

Perjalanan kami berakhir di Pesantren Al-Ghazaly. Sebagai seorang Muslim, saya merasa bangga menunjukkan kepada teman-teman lintas agama tentang nilai-nilai Islam yang mengajarkan toleransi dan kedamaian. Di sini, kami berdiskusi bersama, saling berbagi pengalaman, dan merayakan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi pengalaman yang membuka mata saya tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai. Lebih dari sekadar kunjungan, Peace Heritage adalah pelajaran hidup yang mengajarkan saya bahwa harmoni dan toleransi adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang damai.

Peace Goes to School: Pelajar Damai untuk Indonesia Damai Fadli Husein

“Assalamualaikum, Fadli. Hari Sabtu ini *Antum* sama teman *Antum* datang ya ke acara Peace Goes to School di Lazuardi. Bisa, ya?”

Spontan saya pun menjawab, “Siap, Ustaz!” karena saya tahu bahwa acara yang dibuat ustaz saya dan komunitasnya pasti seru dan bagus!

Yap! Jadi, lebih jelasnya, saya mendapat undangan dari

Ustaz Hakim untuk mewakili diri bersama teman saya sebagai pelajar Islam dari kalangan santri. Acara yang bertemakan “Peace Goes to School” ini adalah acara yang dibuat oleh Peace Leader Indonesia dan komunitas lain untuk mengarahkan para pelajar untuk tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bisa memahami nilai-nilai keberagaman yakni *peace* itu sendiri.

Saya dan teman saya pun merasa sangat antusias mengikuti acara ini sebab kami berdua selama ini memang ingin mempunyai teman yang tidak hanya berada di lingkup sempit saja. Kami tidak ingin selalu hidup di “kandang sendiri” tanpa bisa memahami dunia luar yang beragam. Dengan tekad yang bulat, kami pun memohon izin kepada ustaz asrama untuk pergi mengikuti acara ini.

Setelah mendapatkan izin, sampailah kami di Sekolah Lazuardi, sekolah yang asri dan terlihat sangat indah, hanya panasnya Kota Depok yang membuat estetika sekolah ini jadi agak berkurang (ini bercanda ya).

Kami datang paling awal. Sebenarnya bukan karena kami rajin, tetapi karena takut dimarahi jika terlambat. Ternyata tidak juga, karena panitianya ramah-ramah.

Datanglah bergiliran teman-teman kami dari berbagai sekolah dengan mengenakan almamater khas sekolah masing-masing. Tentu di awal kami semua masih diam dan malu-malu, sehingga tidak langsung saling mengajak berkenalan selain juga ada sedikit gengsi. Tetapi ketika sesi *games* sudah dimulai dan secara acak kami masuk ke dalam kelompok-kelompok dengan latar belakang anggotanya yang berbeda-beda baik dari sisi suku, budaya, dan agama, suasana mulai cair dan kami bisa saling mengenal. Saya jadi teringat bahwa Allah Swt.

dalam Al-Qur'an pernah berfirman:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (Al-Hujurat ayat 13)

Maha Suci Tuhan, yang menjadikan segala yang di dunia pasti memiliki manfaat. Kemudian barulah di situ kami mulai akrab, saling berkenalan, bercanda, dan saling bermusyawarah agar menang dalam *game*. Di masing-masing kelompok kami disediakan kertas karton, pulpen, dan kertas origami untuk membuat profil dan keluh kesah sosial dari setiap anggota kelompok kami. Di situ kami bergantian menulis dan menuangkan keluh kesah yang kami alami di lingkungan sosial.

Dalam proses itu saya sadar bahwa diskriminasi kepada kelompok minoritas itu memang ada! Tidak hanya di media sosial atau di berita saja, hal itu saya dapatkan ketika berkenalan dengan seorang teman dari Konghucu dan Kristen yang kerap mendapatkan perundungan karena agama mereka, dan mereka di-*bully* oleh orang-orang yang seagama dengan saya. Di situ saya terheran-heran dari mana orang-orang itu mengambil contoh? Padahal Nabi kami, Nabi Muhammad saw. telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjaga hubungan baik dan menjaga ucapan dengan mereka yang berbeda agama.

Maka dari itu kemudian kami diberi edukasi tentang keberagaman, bagaimana kita bisa hidup dengan baik tanpa menyinggung hal-hal yang berbeda, bahwa kita semua setara dalam hak sebagai warga negara Indonesia dan lebih luas lagi kita punya hak yang sama sebagai "manusia".

Setelah sesi diskusi dan pemberian materi selesai, acara

pun diakhiri dengan *games* singkat yang seru dan melatih kekompakan kami. Kami mengakhiri acara ini dengan penuh sukacita dan adanya harapan bahwa acara seperti ini akan diadakan kembali, dan bahwa “kita tetap bisa berdampingan sekalipun memiliki banyak perbedaan”. Akhirnya, saya menutup tulisan ini dengan perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib:

“Mereka yang bukan saudaramu dalam beragama adalah saudaramu dalam kemanusiaan.”

Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Retno Lastani

Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah yang nilainya ikut menentukan apakah seorang siswa naik kelas atau tidak. Oleh karena itulah, sebelum tahun 2016, siswa penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diwajibkan untuk mengikuti salah satu mata pelajaran agama untuk memenuhi syarat kenaikan kelas. Hal ini tentu sangat diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama sila pertama Pancasila dan Pasal 29 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ironi Penghayat Kepercayaan di Era Orde Lama dan Orde Baru

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan antara lain

bersumber dari kebijakan Pemerintah Orde Lama yang menerbitkan UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat) untuk mengawasi aliran kepercayaan yang dianggap membahayakan negara. Pada masa itu, tidak ada payung hukum yang menjamin dan melindungi serta memberikan hak-hak sipil maupun hak untuk berkembang kepada para penghayat kepercayaan. Yang terjadi justru adalah berkembangnya stigma yang keliru, di mana ajaran Kepercayaan dianggap sesat karena tidak menyembah Tuhan. Sementara itu, para penghayatnya yang tidak memeluk salah satu agama akan dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga akan kesulitan mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Kenyataan ini menjadi keharusan bagi para penghayat kepercayaan untuk terpaksa memilih salah satu agama dari agama yang diakui Negara demi mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, termasuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Secercah Harapan di Era Reformasi

Tahun 1998, ketika Orde Baru beralih menjadi Era Reformasi, isu tentang hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, terus berkembang dari waktu ke waktu. Berbagai dukungan yang berasal dari organisasi masyarakat sipil maupun tokoh-tokoh agama dialamatkan kepada penghayat kepercayaan agar mereka mendapatkan payung hukum yang jelas. Bagaimanapun, hal ini penting untuk terus diupayakan sebab kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai luhur para leluhur bangsa sehingga sudah selayaknya mendapat perlindungan

dari negara. Dengan demikian, penghayatnya pun mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara.

Pada perkembangannya, sepanjang Era Reformasi, pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan telah diatur dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin para penghayat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang teregistrasi dalam administrasi kependudukan (KTP dan kartu keluarga), pencatatan sipil (perkawinan, kelahiran, perceraian, kematian, dll.), pendidikan Kepercayaan (setara dengan pendidikan agama) di sekolah, serta akses terhadap lowongan pekerjaan di pemerintahan (PNS/ASN), TNI, Polri, dll. Berikut peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

1. Pancasila, sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
2. UUD 1945, pasal 28 E ayat (2) dan (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32
3. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006
4. PBM Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 41 dan No. 40 Tahun 2009 tentang Pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Permendikbud No. 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat
6. Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha

Esas pada Satuan Pendidikan

7. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
8. Keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 atas Judicial Review Pasal 61 dan 64 UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa yang dimaksud agama adalah termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Upaya Pelestarian Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Melalui Pendidikan Kepercayaan di Satuan Pendidikan

Selama berpuluh-puluh tahun pengakuan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan regenerasi dalam eksistensi kepercayaan itu sendiri. Orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai Kepercayaan kepada anak-cucunya karena khawatir di kemudian hari mereka akan mendapatkan kesulitan akibat stigma negatif tentang Kepercayaan. Ditambah lagi, para generasi muda merasa kurang termotivasi dan apatis terhadap upaya perjuangan para penghayat untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya dari negara.

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mempercepat pelestarian nilai-nilai Kepercayaan adalah dengan mengembangkan pendidikan Kepercayaan di satuan pendidikan (sekolah) sebagai salah satu pilihan mata pelajaran Pendidikan Agama. Terkait hal tersebut, MLKI bersama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat segera menyiapkan infrastruktur pendidikan

Kepercayaan, yaitu:

1. Menyusun Kurikulum
 - a. Penyusunan kurikulum Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Penyusunan Pedoman Implementasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016
 - c. Penyusunan Modul Ajar (Kemahaesaan Tuhan, Budi Pekerti, Sejarah Kepercayaan, Martabat Spiritual, Larangan dan Kewajiban)
 - d. Penyiapan buku guru dan buku siswa (bahan ajar dan modul)
 - e. Penyiapan soal ujian sekolah berstandar nasional

2. Menyiapkan penyuluh Kepercayaan sebagai tenaga pendidik
 - a. Penyusunan standar kompetensi khusus Kepercayaan untuk diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Penyiapan asesor Kepercayaan untuk melaksanakan uji kompetensi kepada penyuluh Kepercayaan
 - c. Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Kepercayaan oleh MLKI sebagai lembaga sertifikasi profesi sebelum terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 - d. Bimtek dan sertifikasi Penyuluh Terampil dan Penyuluh Ahli
 - e. Peningkatan kapasitas Penyuluh Kepercayaan

Dengan tersedianya infrastruktur layanan pendidikan Kepercayaan, diharapkan implementasi layanan pendidikan Kepercayaan di daerah-daerah dapat terwujud dengan baik. Selain itu, upaya ini juga dapat memotivasi dan membangkitkan semangat generasi muda penghayat kepercayaan untuk lebih percaya diri menampilkan jati dirinya.

Kisah Sukses Layanan Pendidikan Kepercayaan di Kota Depok dan Bogor

Pada 2013, ketika kegiatan pendampingan terhadap siswa penghayat mulai diinisiasi lewat layanan pendidikan Kepercayaan, sempat ada kekhawatiran tentang hambatan dari pihak sekolah yang mungkin dihadapi. Kekhawatiran ini dilandasi oleh hasil penelitian dari Setara Institute bahwa sejak 2017 Kota Depok masuk dalam daftar sepuluh kota yang tidak toleran di Indonesia. Namun demikian, tanpa diduga, siswa penghayat mendapatkan layanan yang baik tentang pendidikan Kepercayaan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok.

Sebagai antisipasi terhadap adanya kemungkinan hambatan yang dihadapi, kami selaku pengurus organisasi sudah menyiapkan langkah-langkah untuk meminimalisasi hambatan. Langkah strategis yang kami tempuh adalah dengan melakukan pendekatan persuasif dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai Pedoman Implementasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016. Berikut langkah-langkah yang kami lakukan dalam memberikan layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

Tahap	Langkah yang Dilakukan
Persiapan awal	<p>Orang tua siswa menyampaikan kepada pengurus organisasi (Paguyuban Penghayat Kapribaden) bahwa putra/putrinya ingin mengikuti mata pelajaran/mata kuliah Kepercayaan dan memohon agar hal tersebut dapat difasilitasi. Pengurus menyanggupi dan menyarankan kepada orang tua siswa untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada wali kelas/kaprodi.</p>
Pendahuluan oleh orang tua/siswa/mahasiswa, untuk melatih upaya swabela	<p>Orang tua siswa/siswa/mahasiswa selanjutnya akan menghadap wali kelas/kaprodi dan memberitahukan bahwa dirinya seorang penghayat kepercayaan dan menyampaikan permohonan untuk mengikuti mata pelajaran/mata kuliah Kepercayaan sebagai pilihan mata pelajaran agama.</p> <p>Sebelum ada Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, biasanya pihak sekolah/ perguruan tinggi akan menyampaikan bahwa belum ada kurikulum untuk mata pelajaran/mata kuliah Kepercayaan. Setelah ada Permendikbud pun masih ditemukan sekolah-sekolah yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut.</p>

	<p>Orang tua/siswa/mahasiswa sudah kami bekali jawaban untuk menjelaskan bahwa saat ini sudah ada Permendikbud yang mengatur pelaksanaan pendidikan Kepercayaan di satuan pendidikan. Kurikulum serta guru/penyuluhnya pun tersedia. Selanjutnya organisasi yang akan menindaklanjuti pelaksanaannya.</p>
<p>Penguatan oleh pengurus organisasi ke sekolah</p>	<p>Setelah wali kelas memberitahukan izin dari kepala sekolah bahwa siswa dapat mengikuti pelajaran kepercayaan, maka pengurus organisasi/penyuluh Kepercayaan akan menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi dan menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Pengurus organisasi/penyuluh Kepercayaan biasanya memberikan dokumen-dokumen terkait layanan pendidikan Kepercayaan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Permendikbud No. 27 Tahun 2016• Pedoman Implementasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016• Kurikulum Pendidikan Kepercayaan• Sertifikat BNSP/pelatihan Penyuluh Kepercayaan• Surat tugas dari MLKI/organisasi/Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat

- Buku atau modul Kepercayaan yang akan digunakan
- Surat pernyataan orang tua bahwa anaknya merupakan penghayat kepercayaan
- Surat permohonan orang tua agar anaknya mendapatkan pendidikan Kepercayaan

Di Kota Depok dan Kabupaten Bogor, semua sekolah mempersilakan kegiatan belajar-mengajar pendidikan Kepercayaan dilakukan di lembaga masing-masing, sementara untuk penilaian tengah semester/semester, soal dapat dikirimkan ke sekolah untuk dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya soal yang sudah dikerjakan dikirimkan kembali ke penyuluh untuk dinilai, lalu nilai dikirimkan ke wali kelas/guru kurikulum.

<p>P r o s e s kegiatan belajar- mengajar</p>	<p>Kegiatan belajar-mengajar dilakukan di rumah penyuluh Kepercayaan selama seminggu sekali. Ketika masa pandemi Covid-19, kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan secara daring melalui Zoom.</p> <p>Setiap tengah semester, penyuluh mengirimkan nilai siswa melalui surat resmi yang dilampiri dengan soal ujian yang telah dikerjakan oleh siswa. Penyuluh Kepercayaan juga melaporkan kegiatan belajar-mengajarnya kepada MLKI dan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.</p>
---	--

Berikut adalah beberapa sekolah di Kota Depok dan Kabupaten Bogor yang telah memberikan layanan Pendidikan Kepercayaan. Pelaksananya diampu oleh Endang Retno Lastani, seorang penghayat kepercayaan Kapribaden yang menjadi penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersertifikat BNSP sejak tahun 2017, di bawah koordinasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI). Sebetulnya masih ada beberapa sekolah lain yang memberikan layanan pendidikan Kepercayaan, namun dengan penyuluh yang berbeda.

No.	Nama Sekolah	Nama Siswa	Tahun Ajaran	Keterangan
1	SMP Negeri 3 Depok	SL	2013–2016	Sebelum ada Permendikbud No. 27/2016
		SN	2014–2017	
2	SMA Negeri 4 Depok	SL	2017–2020	Setelah ada Permendikbud No. 27/2016
		SN	2018–2021	
3	SMP Negeri 9 Depok	IM	2018–2021	
4	SMK Negeri 1 Cibinong		2021–2024	
5	SMA PGRI Plus, Cibinong	FA	2020–2023	
6	Universitas Pancasila, Depok	S	Semester I, 2013	
		SL	Semester I, 2020	Setelah ada Permendikbud No. 27/2016

Menurut pengamatan kami, ada beberapa hal yang melatarbelakangi baiknya layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah-sekolah di Kota Depok:

1. Koordinasi yang baik antara orang tua siswa/siswa dan pengurus organisasinya, sehingga orang tua dapat menyampaikan masukan kepada sekolah dengan baik, persuasif, dan dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait layanan pendidikan Kepercayaan

2. Pengurus organisasi/penyuluh Kepercayaan yang kompeten dalam memberikan pendampingan dan penguatan kepada orang tua/siswa, khususnya dalam memberikan penjelasan kepada sekolah terkait peraturan perundang-undangan, kurikulum, dan proses penilaian, sehingga pihak sekolah percaya bahwa proses kegiatan belajar-mengajar akan dilaksanakan dengan baik dan semestinya.
3. Adanya standar kota ramah anak yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok di mana sekolah ramah anak adalah salah satu standarnya. Dengan demikian setiap anak wajib mendapatkan hak pendidikan dan hak perlindungan khusus bagi kelompok minoritas.
4. Adanya standar sekolah ramah anak yang menjamin tiap anak mendapatkan haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Demikian kisah sukses layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Depok dan Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sampai 2024. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi.

Layanan Pendidikan Siswa Penghayat Kepercayaan

Sri Lestari

Lestari lahir dan dibesarkan sebagai seorang penghayat kepercayaan. Meskipun begitu, sistem pendidikan di Indonesia mengharuskan semua murid mengikuti pelajaran agama (salah satu dari enam agama yang diakui). Meskipun tidak sesuai dengan keyakinannya, Lestari memilih untuk

menghormati proses belajar tersebut dengan sepenuh hati, berusaha menyerap pengetahuan dari pelajaran agama yang tidak sejalan dengan keyakinannya.

Tahun 2013 menjadi titik balik bagi Lestari. Saat memasuki jenjang SMP, ia menemukan keberanian baru setelah mengetahui pengesahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini memberikan ruang bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Dengan semangat itu, Lestari memberanikan diri mengajukan permohonan untuk mengikuti mata pelajaran kepercayaannya. Dengan tekad yang kuat, pihak organisasi kepercayaannya bertemu dengan kepala kurikulum sekolah dan mengajukan surat permohonan untuk mengambil mata pelajaran kepercayaan.

Berkat usaha mereka, sekolah akhirnya menyetujui permohonan Lestari. Meskipun senang, Lestari menyadari bahwa tidak ada guru tetap untuk mengajarkan pelajaran kepercayaannya. Semua pembelajaran dilakukan di rumah penyuluh dari organisasinya. Bersama penyuluh, Lestari mendalami nilai-nilai kehidupan dan filosofi yang menjadi dasar keyakinannya.

Menjalani hidup sebagai seorang penghayat tentu bukanlah hal yang mudah bagi Lestari. Saat di sekolah, Lestari sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang kepercayaannya dari teman maupun guru. Banyak yang menganggap keyakinannya sama dengan animisme atau dinamisme. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, ia menjelaskan keyakinannya secara terperinci, sehingga perlahan-lahan teman dan gurunya mulai memahami dan menghormatinya.

Di tahun 2016 ketika memasuki jenjang SMA, Lestari berusaha kembali untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik atas kepercayaannya. Dengan adanya payung hukum mengenai fasilitas penyuluh yang dapat mengajar di sekolah-sekolah, Lestari mengajukan permohonan untuk menghadirkan penyuluh di sekolahnya. Sayang, pihak sekolah menyatakan bahwa syarat penambahan guru agama adalah memiliki minimal 5% dari populasi siswa. Lestari menerima kenyataan bahwa ia adalah satu-satunya murid penghayat kepercayaan di sekolah tersebut.

Di SMA, meskipun sudah ada beberapa perkembangan, respons teman-teman dan guru tetap sama: mereka masih merasa asing dengan istilah penghayat kepercayaan. Lestari terus berjuang menjelaskan dan memperkenalkan konsep kepercayaannya serta nilai-nilai yang dianutnya.

Saat memasuki jenjang kuliah, Lestari merasakan kemajuan yang signifikan. Pihak kampus mulai menyediakan pilihan untuk mengambil mata kuliah Kepercayaan sehingga ia dapat mengikuti perkuliahan tersebut dengan lebih baik. Sekali lagi, pembelajaran dilakukan melalui penyuluh dari organisasi kepercayaannya, tetapi kali ini dengan lebih banyak dukungan dari kampus.

Berita baik datang pada tahun-tahun berikutnya. Layanan pendidikan Kepercayaan akhirnya difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya kurikulum yang jelas, kegiatan bimbingan teknis untuk penyuluh, dan buku ajar untuk siswa, Lestari merasa optimistis bahwa generasi selanjutnya akan lebih mudah mendapatkan pendidikan Kepercayaan di sekolah mereka secara lebih baik.

Dari Minoritas Menjadi Manajer: Perjalanan Irma Widjaya di Tupperware

Vina Firmalia

Namanya Irma Widjaya, sosok sahabat sekaligus kolega. Saya bertemu dengannya pada acara demo produk Tupperware, tepatnya di awal tahun 2016. Irma seorang Katolik taat yang bersuamikan seorang Muslim dan mereka dikaruniai dua orang putri. Saat itu ia berencana menukar salah satu produk Tupperware-nya dengan yang baru. Saya pikir pertemuan kami akan berakhir di situ tanpa ada kelanjutan.

Ternyata kami dipertemukan kembali di kantor Tupperware Sawangan pertengahan tahun yang sama. Melihat karakternya yang riang, supel, dan humoris saya memutuskan untuk mengajaknya bergabung menjadi salah satu *salesforce* (anggota) Tupperware. Perusahaan Tupperware memberlakukan sistem *direct selling* di mana penjualan dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa melibatkan perantara seperti toko. Sistem tersebut menuntut produsen mampu menjelaskan dengan baik kelebihan dan keunggulan sebuah produk, mampu menarik minat calon pembeli untuk kemudian membeli produk yang ditawarkan. Berdasarkan kriteria yang diperlukan, wajar jika karakter seperti Irma ini sangat potensial untuk direkrut menjadi tim saya.

Awalnya ia merasa tidak yakin bergabung dengan tim saya. Alasan pertama karena perasaannya sebagai warga minoritas di Sawangan. Bagaimana mungkin ia dapat melakukan demo produk kepada warga Sawangan dan sekitarnya yang secara agama berbeda dengan dirinya. Bagaimana ia bisa memengaruhi dan membujuk konsumen untuk membeli

produk yang ia jual karena dalam kesehariannya ia jarang sekali berinteraksi dengan tetangga di sekitar. Bagaimanapun, hal itu baginya menimbulkan rasa canggung, kikuk untuk berbaur dengan “mayoritas”. Alasan kedua adalah pandangan yang telah tertanam di antara masyarakat sekitar selama ia tinggal di Depok: mayoritas warga Depok akan lebih mengutamakan membeli dari “sesamanya”. Hal ini dikarenakan anggapan mereka bahwa hal itu adalah bagian dari ibadah, bentuk bantuan secara tidak langsung yang diganjar pahala seperti yang diajarkan keyakinan mereka (Islam).

Meskipun upaya untuk meyakinkan dia agar mau bergabung dengan tim saya bukanlah perkara mudah, namun saya yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dimungkinkan. Hal pertama yang saya tekankan adalah sebuah keyakinan bahwa kesuksesan tidak memiliki agama. Artinya, barangsiapa bersungguh sungguh dalam usahanya pasti akan sukses, apa pun agama yang dipeluknya. Saya memberikan contoh dari kalangan terdekat yang memeluk keyakinan yang sama dengannya. Ketika itu saya mencontohkan pemimpin distributor kami, Ibu Julia yang sangat gigih dan tekun hingga akhirnya mampu membuka distributor di daerah Bintaro dan itu adalah sebuah pencapaian tertinggi bagi kami yang bergelut di bisnis Tupperware.

Untuk membuatnya semakin yakin, sering kali saya mengajak dia melakukan demo produk dari rumah ke rumah. Selain mengenalkan produk, saya juga mengenalkan dirinya kepada pemilik rumah dan audiens yang hadir (mayoritas Muslimah dan berhijab). Di awal pertemuan ia selalu menunjukkan keengganan dan kecanggungan setiap kali diminta untuk menjadi pembicara namun perlahan-lahan ia mampu mengatasi keadaan dan mulai lancar berbicara di

depan umum. Tak perlu waktu lama untuk menjejaki karier di Tupperware dengan karakter dan kemampuan yang terus diasah. Hanya dibutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya ia menjadi seorang manajer di kantor Tupperware Sawangan.

Jalan seorang Irma tidak berhenti di situ. Awal tahun 2020 seluruh dunia mengalami pandemi. Seperti yang sudah diketahui bersama, pandemi menghantam segala aspek kehidupan, tak terkecuali Tupperware. Semua *sales force* dituntut untuk beradaptasi dengan cara penjualan, seperti pembatasan berkerumun, pengurangan demo produk, aktivitas jual beli secara *online*, dan penggunaan media sosial. Semua itu membutuhkan daya adaptasi yang cepat dan tepat meskipun banyak dari kami yang tidak siap dengan situasi tersebut. Dengan menyesal, pada akhirnya tim saya dan Irma terpaksa kalah oleh keadaan.

Namun demikian, pertemanan saya dengan Irma tidak berhenti sampai di situ. Awal tahun 2023 kami memulai usaha baru di dunia rajut-merajut. Bidang ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi kami karena kami sama-sama memiliki hobi yang sama yaitu merajut. Ketika masih aktif di Tupperware pun kami sesekali menerima pesanan untuk membuat tas rajut dan produk rajut lainnya. Hobi kami ini terkadang menjadi penolong ketika omzet penjualan Tupperware kami terjun bebas.

Meskipun saya masih terus berjuang untuk menyemangati dan membesarkan hatinya, Irma masih seperti Irma yang saya kenal dulu, termasuk soal kepercayaan diri dan perasaan minornya. Kini, kami tengah menyelesaikan pesanan bunga rajut sebanyak 200 buah untuk salah satu merek ternama. Semoga pertemanan kami akan tetap terjalin dalam segala

aspek kehidupan karena kesuksesan itu tidak beragama. Ia nyata dan berlaku sama meskipun agama kita berbeda.

Gambaran singkat tentang perjalanan sosok Irma Widjaya mewakili sikap dan pandangan kelompok minoritas di Depok. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka bukan lagi pada jenis produk yang mereka jual, tetapi lebih kepada penerimaan diri sebagai penjual yang merupakan bagian dari kelompok minoritas. Apakah mereka yang notabene kelompok minoritas akan tetap dilirik meskipun yang dijual produk halal, apakah mereka yang mayoritas akan tetap membeli darinya meskipun dalam kelompok mereka ada yang menjual produk serupa. Hal ini juga yang dialami oleh Irma.

Depok sebagai kota satelit Jakarta terus bertumbuh dan menarik minat banyak orang untuk menetap dan mencari penghasilan baik di bidang formal atau informal. Selama ini isu yang muncul di permukaan mengenai kehidupan beragama adalah perbedaan keyakinan dan tata cara beribadah (Ahmadiyah, Syiah). Interaksi warga Depok, baik yang mayoritas maupun minoritas, dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya bidang ekonomi, belum menjadi isu utama. Hal inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian selanjutnya. Pembangunan karakter umat beragama menjadi keniscayaan. Regulasi yang mendukung tidak akan berperan maksimal apabila belum terbentuk karakter masyarakat yang saling menghargai dan menerima perbedaan baik dari kelompok mayoritas ataupun minoritas.

Dilingkungan kerja, saya sering menjumpai perasaan minder, sungkan, tidak diterima, dan eksklusivitas di antara kelompok minoritas. Sebagai contoh, ketika ia harus memperagakan penggunaan sebuah produk maka ia akan berpikir dua kali untuk maju begitu melihat mayoritas audiensnya berhijab.

Atau, ketika ada kegiatan lingkungan seperti perlombaan peringatan kemerdekaan antarwarga maka ia cenderung akan menarik diri. Menurut penuturan Irma, ia sempat pula mengalami diskriminasi ketika mengajukan diri sebagai warga terdampak Covid-19 dan layak mendapatkan bantuan, namun ia tidak pernah mendapat informasi dari ketua RT di lingkungannya. Meskipun, pada akhirnya bantuan tersebut bisa ia dapatkan setelah berinisiatif bertanya. Kenyataan di atas adalah hubungan sebab-akibat yang menjadikan harmonisasi kehidupan beragama menjadi terhambat.

Pembangunan Karakter Umat Beragama dalam Kegiatan Ekonomi

Pembangunan karakter adalah sebuah proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan/atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak (budi pekerti) insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Modul diklat LAN RI). Karakter merupakan fondasi dasar dalam mengembangkan kualitas terbaik manusia. Karakter tersebutlah yang akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin kuat karakter baik semua umat beragama maka akan semakin mempermudah peningkatan kualitas hidup dan pencapaian hal baik dalam kehidupan.

Dalam hal ini, agama memegang peranan penting karena menjadi sumber nilai dan etika yang memberikan landasan moral. Dengan seperangkat aturan yang dimiliki diharapkan mampu membimbing pemeluknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan beragama. Menurut data BPS Depok tahun 2021, umat Muslim adalah

kelompok mayoritas di Depok (1,7 juta jiwa). Masyarakat Muslim ini berpegang pada hukum diperbolehkannya muamalah (bergaul) seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai-menggadai. Terkait dengan pembangunan karakter, maka diaturlah sejumlah etika bermuamalah dalam Islam, di antaranya menegakkan keadilan, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, serta menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Beragam etika tersebut, menurut hemat saya, telah diterapkan jauh sebelum Irma tergabung dalam keluarga besar Tupperware Sawangan. Prinsip keadilan dan toleransi telah diterapkan sedemikian rupa baik dalam mekanisme penjualan produk ataupun interaksi di antara sesama anggota Tupperware. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah Irma harus mampu mendobrak dan menghilangkan anggapan atau stigma yang belum tentu benar terkait sikap Muslim dalam bermuamalah dengan non-Muslim. Sebagai pemimpin dalam tim, upaya yang saya lakukan untuk memperkuat karakter dasar yang telah dimiliki Irma mencakup usaha internal ke sesama anggota Tupperware dan upaya eksternal yang melibatkan warga sekitar tempat tinggal kami (Kelurahan Sawangan), misalnya:

- **Diskusi kecil mingguan**

Kegiatan ini dilakukan untuk menjembatani Irma dengan sesama anggota Tupperware lainnya. Diskusi internal mengharuskan setiap anggota menceritakan pengalaman mereka ketika mengadakan demo produk, kendala apa yang mereka hadapi, dan bagaimana cara mereka mengatasi kendala itu. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan perasaan didengar dan diterima sehingga akan menguatkan rasa percaya diri dan membentuk solidaritas antar-tim.

- **Penetapan target yang terukur dan sistematis**

Bisnis yang sukses selalu mempunyai target yang jelas. Dengan penetapan sebuah target kami akan bekerja sama menyusun strategi serta mempelajari kekuatan kami dan hambatan potensial dalam pencapaian target tersebut. Setiap anggota diwajibkan menyampaikan gagasan dan ide mereka serta tak lupa untuk mengapresiasi dan memberikan *reward* bagi anggota yang telah mencapai target.

Selain penguatan karakter yang dimulai dari dalam, ada pula beberapa upaya eksternal yang dilakukan, di antaranya:

- **Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan**

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan santunan saat hari besar keagamaan, pemberian takjil kepada pengguna jalan di bulan Ramadan, serta pengadaan bakti sosial. Dengan aktif dalam kegiatan lingkungan diharapkan sosok Irma dapat lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat sekitar.

- **Pengenalan sekilas tentang latar belakang konsumen yang akan dihadapi**

Proses ini menuntut Irma untuk terus bergerak di luar rumah, bersosialisasi dan berbaur dengan lingkungan rumahnya atau lingkungan yang lebih luas (lintas RT/RW), hingga mengetahui latar belakang calon konsumen. Diskusi dan obrolan singkat sering terjadi di belakang layar sebelum kami memulai demo pengenalan produk. Informasi seperti status pekerjaan calon pembeli, bagaimana kondisi keluarganya, apa hobinya menjadi data awal yang perlu digali untuk menumbuhkan rasa percaya.

Upaya yang ditempuh di atas setidaknya mampu menggerakkan seorang Irma untuk terus belajar membaca

situasi dan peluang serta menumbuhkan sikap pantang menyerah hingga memperluas relasi dan jaringannya. Hal ini penting untuk membuka cakrawala pandangnya bahwa sekalipun dia berasal dari kelompok minoritas tetapi eksistensinya tetap diterima dan dihargai. Perlu ditekankan bahwa penerimaan itu tidak sekonyong-konyong jatuh dari langit melainkan sebuah hasil dari proses belajar yang tak kenal henti. Hal ini berlaku di mana saja, entah di Tupperware ataupun bidang usaha yang lain. Sekali lagi, regulasi dan kondisi yang ideal tidak menjamin kesuksesan mutlak semua umat beragama. Pembentukan karakter yang kuat dan berkualitaslah yang menempati peranan penting dalam sebuah pencapaian. Pada akhirnya, hal tersebut diarahkan pada kerukunan hidup antar-umat beragama.

D. Kupang

Nusa Terindah Toleransinya (NTT) yang Penuh Kasih?

I Putu Yoga Bumi Pradana

Saudaraku semua, pernahkah Anda ke Kupang? Wah, sayang sekali kalau belum. Cobalah buka aplikasi Google dan ketik kata “Kupang”. Saya yakin banyak hal unik dan menarik yang bakal dilihat. Mulai dari pantai berpasir putih, budaya yang kaya, hingga keramahan masyarakatnya yang membuat siapa pun betah berlama-lama di ibu kota Nusa Tenggara Timur ini. Kupang bukan hanya gerbang menuju wisata eksotis seperti Pulau Rote atau Pulau Sabu, tetapi juga cerminan harmoni dalam keberagaman.

Di Kupang, Anda akan menemui paduan indah antara budaya lokal dan keberagaman agama. Meski mayoritas masyarakatnya memeluk agama Kristen Protestan, Kupang juga menjadi rumah bagi komunitas Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan, di beberapa sudut kota, Anda akan menemui simbol-simbol budaya dan keyakinan yang hidup berdampingan dengan damai. Sebagai seorang umat Hindu yang lahir dan besar di Kupang, saya merasa keberagaman ini adalah salah satu kekayaan yang patut dirayakan.

Kupang itu *melting pot*, tempat berbagai budaya dan keyakinan berjumpa, berbaur, dan saling menguatkan. Di sini, kami belajar bahwa toleransi bukan sekadar semboyan, tetapi juga praktik sehari-hari. Saya sering kali melihat bagaimana masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Dalam perayaan Nyepi, misalnya, teman-teman dari komunitas agama lain sering ikut membantu mempersiapkan kebutuhan upacara. Sebaliknya, ketika ada kegiatan besar di gereja atau masjid, umat Hindu di Kupang tidak segan-segan untuk turut mendukung.

Kok bisa ya Kupang seharmonis itu? Lalu, apa rahasia keberagaman yang damai ini?

Salah satu jawabannya terletak pada filosofi hidup masyarakat NTT yang menjunjung tinggi *rumah besar kebangsaan*. Prinsip bahwa setiap orang adalah bagian dari satu keluarga besar, apa pun latar belakang suku dan agamanya, telah menjadi nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Sama seperti falsafah Minahasa “*Si Tou Timou Tumou Tou*” yang bermakna hidup untuk saling menghidupi, masyarakat NTT memiliki konsep *padu woe seka jaga lelebo*—hidup untuk berbagi, saling menjaga, dan menghormati.

Kehidupan keberagaman di Kupang juga diperkuat oleh inisiatif komunitas lintas iman. Forum-forum dialog dibuka, bukan sekadar untuk berbasa-basi, tetapi untuk saling belajar memahami. Saya teringat sebuah momen di mana saya duduk berdampingan dengan sahabat dari agama lain di acara Sarasehan Toleransi. Di sana, kami bukan hanya berbagi pengalaman, tetapi juga berbagi pandangan tentang tantangan menjaga harmoni di tengah dinamika politik dan sosial yang ada. Diskusi yang hangat itu membuktikan bahwa perbedaan tidak akan menjadi penghalang jika kita mau membuka hati.

Kegiatan lintas budaya seperti Festival Kebhinekaan juga menjadi medium pengikat. Dalam festival tersebut, ada kolaborasi tarian tradisional, musik daerah, hingga doa-doa lintas agama. Pernahkah Anda melihat tarian Bali, prosesi *hadrah* Islami, dan paduan suara gereja tampil dalam satu panggung yang sama? Di Kupang, semua itu menjadi hal yang lumrah. Setiap nada, gerak, dan kata yang dilantunkan adalah simbol kasih yang merekatkan.

Prinsip ini juga tecermin dalam banyak aktivitas lintas agama di Kupang. Saya teringat ketika Peradah, organisasi pemuda Hindu, mengadakan dialog lintas iman yang melibatkan tokoh agama Kristen, Islam, dan Buddha. Dalam dialog tersebut, kami tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga isu-isu bersama seperti pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Kami sepakat bahwa keberagaman ini adalah aset berharga yang harus dijaga.

Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, semangat toleransi ini tetap hidup. Ketika pandemi Covid-19 melanda, banyak komunitas lintas iman bergandengan tangan membantu mereka yang membutuhkan. Peradah, misalnya, menginisiasi program pembagian sembako yang tidak hanya menysasar umat

Hindu, tetapi juga masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Dalam momen itu, saya menyadari bahwa kasih adalah bahasa universal yang mampu melampaui batasan keyakinan.

Kupang juga mengajarkan saya bahwa keberagaman bisa dirayakan melalui budaya. Setiap tahun, berbagai festival budaya diadakan untuk merayakan kekayaan adat dan tradisi. Festival semacam ini sering menjadi ajang untuk mempererat hubungan lintas komunitas. Tarian Bali, misalnya, pernah menjadi salah satu suguhan di Festival Seni Kupang. Kehadirannya disambut dengan tepuk tangan meriah, menunjukkan bahwa masyarakat Kupang benar-benar menghargai keberagaman budaya.

Namun, perjalanan menuju harmoni tidak selalu mulus. Seperti daerah lainnya, Kupang juga menghadapi tantangan, mulai dari stigma hingga diskriminasi. Meski demikian, upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas agama, maupun masyarakat umum, membuat tantangan ini bisa diatasi. Yang terpenting, ada kesadaran kolektif bahwa toleransi adalah fondasi utama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Kupang, dalam pandangan saya, adalah simbol dari kasih yang nyata. Di kota ini, kami hidup dalam semangat *Tat Twam Asi*—aku adalah engkau. Semangat ini mengajarkan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menghidupi dan mencintai sesama.

Jadi, jika suatu hari Anda berkesempatan mengunjungi Kupang, saran saya jangan hanya menikmati keindahan alamnya. Rasakan juga kehangatan masyarakatnya, dengarkan cerita mereka, dan pelajari bagaimana kasih dan toleransi bisa menjadi jalan menuju harmoni. Karena di Kupang, kasih adalah bahasa yang menyatukan kita semua.

Kupang: Kota yang Merangkul Perbedaan dengan Hangat

Saudaraku semua, pernahkah Anda membayangkan sebuah kota di mana perbedaan justru menjadi pengikat, bukan pemisah? Kupang adalah contoh nyata tempat di mana keberagaman dirayakan dalam harmoni. Sebagai ibu kota provinsi, Kupang adalah rumah bagi masyarakat dari berbagai suku dan agama. Di kota ini, masjid, gereja, pura, dan wihara berdiri berdampingan, menjadi simbol bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan penghalang untuk saling mengasihi.

Di Kupang, kebersamaan tidak hanya terwujud dalam kata-kata, tetapi dihidupi dalam keseharian. Setiap perayaan hari besar keagamaan menjadi momen istimewa untuk mempererat tali silaturahmi. Ketika Idul Fitri tiba, umat Muslim menggelar tradisi *halal bihalal*, para tetangga dari latar belakang agama berbeda ikut hadir untuk bersalaman, menikmati hidangan, dan berbagi doa. Begitu pula saat umat Hindu merayakan Galungan, para tetangga berdatangan untuk mencicipi lawar dan sate lilit sambil ikut merasakan khidmatnya suasana perayaan. Sementara itu, perayaan Natal di Kupang selalu diramaikan oleh kunjungan dari tetangga yang beragama Islam dan Hindu yang datang membawa makanan dan ucapan selamat.

Kupang hidup dengan filosofi *basodara*, yang berarti semua orang adalah saudara. Nilai ini mengajarkan bahwa meskipun berbeda agama dan budaya, pada dasarnya kita adalah satu keluarga besar. Prinsip lain yang dipegang teguh adalah "*bae sonde bae, tanah Timor lebe bae*"—artinya, di atas segalanya, kerukunan di Tanah Timor lebih penting daripada ego atau kepentingan pribadi. Filosofi ini diwariskan oleh leluhur

masyarakat NTT dan terus dijunjung tinggi oleh generasi sekarang.

Di pasar tradisional, filosofi *basodara* terasa begitu nyata. Para pedagang dari berbagai suku dan agama tidak hanya menjual dagangan mereka, tetapi juga berbagi cerita dan canda tawa. Ibu-ibu Timor, Jawa, dan Flores duduk berdampingan menjual hasil bumi mereka dengan penuh keakraban. "Agama dan suku itu urusan masing-masing. Yang penting kita hidup rukun, saling bantu satu sama lain," ujar seorang pedagang ikan sambil tersenyum ramah.

Satu momen yang selalu membekas dalam diri saya adalah ketika sebuah gereja di pusat Kupang mengadakan perayaan Natal. Meski acara itu merupakan kegiatan keagamaan umat Kristen, para tetangga yang beragama Islam dan Hindu hadir dan ikut membantu persiapan, mulai dari menghias tenda hingga menyiapkan kursi. Setelah ibadah selesai, acara makan bersama menjadi puncak yang paling dinanti. Di sana, perbedaan agama hilang dalam tawa, makanan lezat, dan obrolan penuh kehangatan.

Namun, kehidupan yang harmonis di Kupang tentu tidak lepas dari tantangan. Ada masa ketika perbedaan pandangan memunculkan ketegangan. Tetapi, masyarakat Kupang selalu mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian. Mereka duduk melingkar, berbicara dari hati ke hati, hingga akhirnya menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Prinsip mereka sederhana: lebih baik mengalah sedikit demi menjaga kedamaian bersama.

Kupang mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah tembok pemisah, tetapi jembatan yang menghubungkan. Di kota ini, kasih dan penghormatan menjadi bahasa sehari-hari

yang memperkaya kehidupan. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kupang, jangan hanya menikmati pantai-pantai indahny atau mencicipi kuliner se'i sapi yang lezat. Luangkan waktu untuk mendengar cerita warganya, rasakan keramahan mereka, dan saksikan sendiri bagaimana keberagaman dirayakan dengan cinta dan kehangatan. Sebab, di Kupang, kita semua adalah basodara.

Ketika Hari Raya Menyatukan Semua Orang

Pagi itu, suasana di lorong kecil Kupang dipenuhi aroma opor ayam dan ketupat yang baru saja matang. Suara tawa anak-anak terdengar dari halaman rumah Bu Halimah, yang pintunya selalu terbuka lebar setiap kali Idul Fitri tiba. Di dalam rumah, tamu-tamu dari berbagai latar belakang agama duduk bersama menikmati hidangan khas Lebaran.

Pak Made, tetangga beragama Hindu, datang membawa sepiring sate lilit dan lawar buatan istrinya. Maria, seorang jemaat Katolik, ikut membantu menuangkan teh hangat ke dalam gelas-gelas tamu yang terus berdatangan. "Inilah Kupang, Kota Kasih yang selalu menghangatkan," ujar Pak Made sambil tersenyum lebar.

Ketika Nyepi tiba, suasana kota berubah hening namun tidak terasa sunyi yang menakutkan. Tetangga-tetangga non-Hindu memahami bahwa Nyepi adalah momen refleksi dan perenungan suci. Sehari sebelumnya, mereka mengantar makanan kecil sebagai simbol solidaritas dan penghormatan.

"Biar tenang saat introspeksi, makanan sudah cukup," kata Bu Siti, tetangga Muslim yang selalu mengantar sepiring kue kering sebelum Nyepi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada umat Hindu agar tidak merasa sendiri di hari

suci mereka. Perbedaan agama tak pernah jadi alasan untuk memutus tali persaudaraan yang sudah terjalin erat.

Saat Natal tiba, lampu hias dan pohon natal menyala terang di halaman rumah jemaat Kristiani, memancarkan kehangatan di malam yang sejuk. Tetangga Muslim dan Hindu berdatangan memberikan ucapan selamat Natal sambil membawa bingkisan kecil. Setelah ibadah malam Natal, meja panjang penuh hidangan menjadi tempat berbagi cerita dan tawa antartetangga.

Di hari yang sama, jemaat gereja menyambut tamu lintas agama dengan penuh kehangatan. Mereka duduk bersama, membuktikan bahwa kasih lebih kuat daripada perbedaan. Saling berbagi makanan dan kebahagiaan menjadi kebiasaan yang membuat suasana hari raya terasa seperti milik semua orang.

Kupang hidup dengan filosofi Kota Kasih, tempat perbedaan menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap orang, terlepas dari keyakinan mereka, adalah keluarga besar yang pantas dirangkul dengan cinta dan hormat. Di sini, tidak ada yang merasa tersisih, dan tidak ada yang dianggap asing.

Namun, perjalanan menjaga harmoni ini tidak selalu mudah dan mulus. Ada kalanya perbedaan pandangan memicu gesekan kecil di tengah masyarakat. Tetapi, masyarakat Kupang selalu memilih jalan dialog untuk menyelesaikan perbedaan dan menjaga persaudaraan.

Prinsip mereka sederhana: lebih baik menurunkan ego daripada mengorbankan rasa kebersamaan. Duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan saling mendengarkan menjadi cara yang sudah diwariskan turun-temurun. Semua itu

memperkuat keyakinan bahwa kehidupan yang damai dimulai dari rasa saling peduli dan menghormati.

Kupang mengajarkan bahwa perayaan keagamaan bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga perayaan kasih yang hadir dalam bentuk sapaan ramah dan uluran tangan. Ucapan selamat yang tulus dan piring makanan yang dibagikan menjadi simbol kehangatan yang meneguhkan persaudaraan. Kehidupan sehari-hari di Kupang menunjukkan bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dirawat bersama.

Jadi, jika Anda pernah mendengar bahwa perbedaan bisa memecah belah, datanglah ke Kupang dan saksikan bagaimana kasih menyatukan semua. Di Kota Kasih ini, setiap hari raya adalah undangan untuk berbagi kebahagiaan dan membangun jembatan kasih. Karena di Kupang, perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan untuk saling merangkul lebih erat.

Dialog Keberagaman atau Sekadar Basa-basi?

Saudaraku semua, pernahkah kalian membayangkan duduk dalam satu lingkaran bersama mereka yang berbeda keyakinan, berbicara jujur tanpa rasa canggung? Di Kupang, dialog lintas iman bukan sekadar formalitas, tetapi ruang pertemuan yang hidup, tempat pikiran dibuka dan hati dilibatkan sepenuhnya. Di sini, keberagaman tidak hanya dibicarakan, tetapi juga dirasakan.

Bayangkan sebuah sore di halaman sebuah gedung komunitas. Ada pemuda Muslim yang datang dengan peci putih, pendeta dengan jubah hitamnya, dan tokoh Hindu dengan udeng di kepala. Mereka duduk melingkar, tidak ada podium tinggi yang memisahkan mereka. Moderator hanya bertanya santai, "Tantangan apa yang paling berat menjadi minoritas di

tempat kalian?” Lalu suasana berubah menjadi hangat, diiringi kisah-kisah penuh kejujuran. Seorang peserta Hindu berbagi tentang tantangan membangun rumah ibadah tanpa merasa takut dianggap “terlalu menonjol”.

Dialog seperti ini bukan tempat mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan wadah mendengar dan memahami. Seorang ibu dari komunitas Katolik pernah berkata, “Saya datang ke dialog ini karena ingin tahu apa yang dirasakan saudara Muslim saat Ramadan tiba, ketika suara lonceng gereja masih bergema setiap Minggu pagi.” Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuka jalan menuju rasa saling mengerti yang tulus.

Tak jarang, dialog menjadi gerbang kolaborasi sosial. Pernah juga ada kegiatan bakti sosial yang digagas setelah pertemuan lintas iman. Semua berawal dari satu sesi diskusi tentang kebersihan lingkungan tempat ibadah. “Kenapa kita tidak lakukan bersama?” ujar salah satu peserta. Dalam seminggu, mereka mengumpulkan sapu, cat, dan alat kebersihan, lalu bergotong royong membersihkan taman kecil di dekat masjid, pura, dan gereja. Hasilnya? Taman itu kini dikenal sebagai “Taman Damai”, tempat anak-anak bermain tanpa melihat sekat agama.

Dialog lintas iman di Kupang juga kerap memunculkan kejutan-kejutan kecil yang menyentuh. Dalam sebuah diskusi, seorang pemuda Muslim mengaku merasa kagum melihat tradisi ngaben umat Hindu yang penuh penghormatan pada leluhur. Di sisi lain, ada umat Kristen yang mengapresiasi kekhidmatan salat berjamaah saat Lebaran. Kejutan semacam ini memperkaya wawasan dan meruntuhkan tembok prasangka yang mungkin ada sebelumnya.

Namun, jangan bayangkan dialog ini selalu berjalan lurus-lurus saja. Ada kalanya perdebatan memanas, terutama ketika membahas isu sensitif seperti kebijakan yang dinilai tidak adil. Tapi, masyarakat Kupang tahu satu hal: dialog bukan soal menang atau kalah, melainkan soal mengungkapkan dan mendengarkan dengan penuh penghormatan. Prinsip ini mengakar kuat dalam filosofi basodara dan "bae sonde bae, Tanah Timor lebe bae".

Ketika banyak orang berpikir bahwa dialog hanya menghasilkan janji tanpa tindakan, Kupang menunjukkan bahwa dari dialog bisa lahir gerakan nyata. Diskusi tentang pendidikan agama, misalnya, menghasilkan kerjasama untuk mengadakan kelas kunjungan lintas iman di sekolah-sekolah. Murid-murid diberi kesempatan mengunjungi rumah ibadah agama lain dan belajar tentang tradisi mereka langsung dari sumbernya.

Kupang mengajarkan bahwa dialog lintas iman bukanlah basa-basi jika diiringi ketulusan dan kemauan mendengar. Ia adalah upaya merawat keharmonisan dalam perbedaan. Jadi, jika Anda berpikir bahwa dialog hanya soal kata-kata, datanglah ke Kupang. Di kota ini, dialog adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh kasih.

Pemuda Kupang: Jembatan yang Menghubungkan, Bukan Membelah

Malam itu, lampu gereja kecil di sudut Kota Kupang menyala terang, memancarkan kehangatan di tengah malam yang sejuk. Jemaat mulai berdatangan dengan wajah penuh sukacita untuk mengikuti ibadah malam Natal. Namun, yang menarik perhatian adalah barisan pemuda yang berdiri berjaga di depan

pagar gereja. Bukan hanya pemuda Kristen, tapi juga pemuda Muslim, Katolik, dan Hindu yang tergabung dalam organisasi Kompak (Komunitas Pemuda Kupang).

Di sudut pintu masuk, Fandi, seorang pemuda Muslim, tersenyum menyambut jemaat yang datang. "Selamat malam, Om. Hati-hati di tangga, ya," ucapnya sambil membantu seorang bapak tua yang berjalan perlahan. Sementara itu, Mario, pemuda Katolik yang berdiri di sisi kanan pintu, mengatur arus kendaraan agar tidak menumpuk di jalan. Di sampingnya, Gede, pemuda Hindu, memastikan area parkir tetap aman.

"Malam Natal ini bukan cuma milik saudara kita umat Kristen, tapi milik kita semua yang ingin menjaga damai," ujar Fandi kepada temannya yang bertanya kenapa ia ikut berjaga. Mario mengangguk setuju dan berkata, "Di Kupang, menjaga rumah ibadah itu menjaga rumah hati kita juga."

Hal serupa terjadi saat pagi Idul Fitri tiba. Setelah gema takbir berkumandang, para pemuda lintas agama berdiri berjaga di depan masjid. Mereka membantu mengatur arus jamaah yang datang dan memberikan tempat duduk untuk ibu-ibu lansia. Setelah salat Id, mereka membantu membagikan makanan ringan kepada jamaah dan anak-anak yang datang berlarian ke halaman masjid.

Di salah satu sudut masjid, terlihat seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Ma, itu abang pakai kalung salib kok ada di sini?" Sang ibu tersenyum dan berbisik, "Karena di sini semua saling jaga, Nak. Hari raya apa pun, semua bisa saling bantu."

Kisah serupa terjadi saat umat Hindu merayakan Galungan di pura. Pemuda Muslim dan Katolik terlihat membantu mengatur arus kendaraan dan menyambut tamu dengan

ramah. "Selamat Galungan, Om!" sapa Mario kepada seorang tetua Hindu yang datang bersama cucunya. Senyum dan salam hangat itu menggambarkan suasana kasih yang nyata, bukan sekadar basa-basi.

Di Kupang, menjaga rumah ibadah bukan hanya tugas aparat atau umatnya saja, tetapi tanggung jawab bersama sebagai wujud cinta kepada sesama. Pemuda-pemuda lintas agama ini bukan hanya penjaga pintu, tetapi juga penjaga jembatan kasih yang menghubungkan hati masyarakat.

Setiap hari raya di Kupang adalah undangan untuk berbagi senyum dan kebersamaan. Kupang mengajarkan banyak hal, bahwa menjaga satu sama lain adalah bentuk kasih yang paling tulus dan penuh kehangatan.

Solidaritas di Tengah Duka: Ketika Bencana Menghapus Sekat Agama

Malam itu, langit Kupang gelap gulita. Badai seroja baru saja melintas, meninggalkan jejak kehancuran. Atap-atap rumah beterbangan, pohon-pohon tumbang, dan jalanan dipenuhi puing. Di tengah hiruk-pikuk suara tangis dan rintihan, sekelompok pemuda dengan senter di tangan menyusuri lorong-lorong untuk memastikan tetangga mereka selamat.

"Semua baik-baik saja, Pak?" tanya Adi, seorang pemuda Muslim, kepada seorang kakek tua yang rumahnya rusak parah. Kakek itu mengangguk lemah. "Baik, Nak. Cuma rumah sudah rata," jawabnya dengan suara lirih. Adi tidak sendiri. Di belakangnya, ada Maria, seorang pemudi Katolik, dan Gede, pemuda Hindu, membawa tikar dan air minum. Mereka bertiga segera membantu sang Kakek pindah ke posko darurat.

Begitulah solidaritas bekerja di Kupang. Tidak ada lagi sekat agama atau identitas lain ketika duka datang. Yang tersisa hanya rasa kemanusiaan.

Di posko darurat, suasana hangat tercipta meski kondisi serba terbatas. Adi memimpin doa bersama, bukan untuk satu agama tertentu, tetapi doa yang universal, sederhana, dan tulus: "Tuhan, beri kami kekuatan untuk bangkit." Setelah doa selesai, semua menatap satu sama lain dengan mata yang penuh harapan.

Saat pagi menjelang, aktivitas di posko semakin sibuk. Beberapa ibu memasak nasi bungkus menggunakan dapur darurat. Di sampingnya, pemuda-pemudi membagikan air dan pakaian kepada warga yang membutuhkan. "Minum dulu, Pak, Bu," kata Gede sambil menyodorkan segelas air. Seorang ibu yang mengenakan jilbab menerima dengan senyum kecil. "Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian."

Cerita lain datang dari seorang pemuda Protestan bernama Riko yang bersama komunitas lintas iman bergotong royong memperbaiki rumah ibadah yang roboh akibat badai. Meski bukan tempat ibadahnya, ia bekerja tanpa henti, mengangkat kayu dan memperbaiki atap bersama warga Hindu dan Muslim. "Tempat ibadah bukan cuma rumah Tuhan mereka, tapi rumah doa kita semua," ujarnya saat diwawancarai oleh seorang jurnalis.

Di momen-momen seperti ini, rasa lelah sering kali datang tanpa permisi. Tapi justru di tengah letih itu, tawa dan sapaan hangat mengalir begitu saja. "Bro, kuat, ya?" celetuk Adi kepada Wayan yang mulai berkeringat. "Kuat, Bro! Kita di sini bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk bantu sesama," jawab Gede sambil mengangkat kayu terakhir.

Tentu saja tidak semua berjalan sempurna. Ada saat-saat persediaan logistik habis lebih cepat dari yang diperkirakan, dan ada perbedaan pendapat tentang distribusi bantuan. Tapi, di tengah semua itu, mereka tahu satu hal: musibah bisa menghancurkan atap rumah, tetapi tidak akan meruntuhkan rasa persaudaraan jika mereka tetap saling percaya dan mendukung.

Beberapa minggu kemudian, saat posko mulai dibongkar dan warga kembali membangun rumah mereka, sebuah pesan sederhana tertulis di papan kayu yang berdiri di tengah lapangan: "Badai boleh datang, tapi kasih sayang tetap tinggal."

Kisah solidaritas ini mengajarkan bahwa di tengah duka, manusia menemukan kekuatannya yang sejati—kasih yang tidak mengenal batas. Di Kupang, bencana memang bisa menghancurkan tembok fisik, tetapi tidak pernah bisa menghancurkan jembatan hati yang sudah dibangun oleh masyarakat lintas iman. Ketika badai datang dan berlalu, yang tersisa bukan hanya puing, tetapi juga harapan yang dikuatkan oleh solidaritas.

Panggung Toleransi: Ketika Tarian Bali dan Musik Timor Berpadu

Malam itu, gemerlap lampu panggung menerangi lapangan terbuka di jantung Kota Kupang. Suasana penuh antusiasme. Penonton dari berbagai kalangan telah memenuhi tempat duduk sejak sore, menunggu festival budaya tahunan dimulai. Di antara mereka ada ibu-ibu dengan kain tenun Timor yang indah, pemuda-pemudi dengan pakaian tradisional, serta anak-anak yang duduk di pangkuan orang tua mereka.

Begitu musik pertama dimainkan, suasana langsung berubah. Nada sasando menggema lembut, diiringi denting

gamelan Bali yang khas. Dua dunia musik yang berbeda itu berpadu sempurna, menyapa seluruh hadirin. Tiba-tiba, muncul sekelompok penari Bali dengan gerakan anggun, membawa kipas dan kain kuning keemasan yang berkilauan. Di belakangnya, pemuda-pemudi Timor menyusul dengan tarian Likurai mereka yang penuh energi, mengayunkan pedang rotan sambil tersenyum lebar.

Penonton tak henti-hentinya bertepuk tangan. Banyak yang takjub melihat tarian yang kontras itu bisa bersatu dalam harmoni yang indah. "Kupang memang istimewa," bisik seorang penonton sambil mengusap air matanya karena terharu. "Lihat, mereka dari agama dan budaya yang berbeda, tapi gerakannya seirama," lanjutnya.

Iniilah panggung toleransi yang menjadi ciri khas Kota Kupang.

Tak hanya di festival budaya, panggung toleransi itu juga tampak nyata dalam Pawai 17 Agustus dan hari jadi Kota Kupang. Setiap tahun, kedua acara ini menjadi perayaan kebersamaan yang melibatkan lintas agama dan budaya. Barisan peserta bukan hanya terdiri dari kelompok adat atau suku tertentu, tetapi juga diisi oleh komunitas keagamaan yang tampil dengan pakaian khas mereka.

Pada Pawai 17 Agustus, misalnya, satu rombongan membawa replika rumah ibadah—gereja, masjid, pura, dan wihara—sebagai simbol persatuan. Mereka berjalan beriringan sambil mengibarkan bendera Merah Putih, melambangkan bahwa di atas segalanya, mereka adalah satu bangsa. Di barisan lain, kelompok pemuda Muslim memainkan rebana diiringi lagu perjuangan, sementara kelompok paduan suara dari gereja menyanyikan lagu yang sama dengan semangat

membara. Penonton di pinggir jalan ikut bersorak, seolah lupa bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda.

Pawai hari jadi Kota Kupang juga tak kalah meriahnya. Suara gong dan tambur bergema ketika rombongan pemuda lintas iman memulai barisan mereka. Penari Bali dengan kain berwarna cerah menari berdampingan dengan penari Timor yang mengenakan kain tenun motif khas Kupang. Di tengah barisan, anak-anak dari komunitas Katolik dan Hindu membawa hiasan berbentuk burung merpati sebagai lambang perdamaian. Di sepanjang jalan, orang-orang melambaikan tangan dan tersenyum, bangga menjadi bagian dari sebuah kota yang menjunjung tinggi harmoni.

Di balik kemeriahan pawai dan festival ini, ada kerja keras dari para panitia lintas agama yang bergotong royong menyiapkan semuanya. Made, seorang pemuda Hindu yang menjadi koordinator tari, bercerita bahwa mereka sempat kesulitan mencari penari karena hari itu bertepatan dengan perayaan keagamaan. “Tapi setelah berdiskusi, semua setuju untuk saling mendukung. Ada yang latihan pagi, ada yang sore. Yang penting, semuanya ikut merasakan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Festival dan pawai di Kupang bukan hanya hiburan semata, melainkan panggung toleransi yang mengajarkan nilai persaudaraan kepada semua yang menyaksikan. Ketika musik mulai dimainkan dan barisan peserta berjalan penuh semangat, perbedaan agama, budaya, dan tradisi mencair jadi satu dalam harmoni.

Di Kupang, seni dan budaya bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah jembatan kasih yang mengingatkan bahwa perbedaan itu indah jika dihayati dengan cinta. Dari festival hingga pawai

17 Agustus, pesan yang selalu tersampaikan tetap sama: harmoni bukan tentang seragam, melainkan tentang menerima dan menghormati warna-warni perbedaan dengan sepenuh hati.

Kupang Mengajarkan Kita bahwa Keberagaman adalah Anugerah, Bukan Ancaman

Ketika berbicara tentang Kupang, kita tak hanya berbicara tentang indahnya Pantai Lasiana atau lezatnya se'i sapi yang menggoda lidah. Lebih dari itu, Kupang adalah gambaran nyata bagaimana perbedaan bisa hidup berdampingan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai anugerah yang memperkaya. Inilah mengapa NTT sering disebut "Nusa Terindah Toleransinya"—karena di tanah ini, keberagaman justru menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah.

Di Kupang, perbedaan adalah warna yang merangkai cerita kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan sebuah pasar tradisional di pagi hari: di satu sudut, ada penjual jagung bakar yang menyapa pelanggannya dengan sapaan hangat khas Timor. Di sisi lain, ada ibu-ibu dari berbagai latar belakang agama yang duduk berdampingan menjajakan kain tenun, hasil kebun, dan ikan segar. Suara tawa mereka bercampur dengan riuh-rendah obrolan, membuktikan bahwa perbedaan tidak pernah menjadi penghalang bagi rasa persaudaraan.

Bahkan, di saat-saat sulit, seperti ketika badai seroja melanda dan menghancurkan banyak rumah, solidaritas lintas agama begitu terasa. Warga Muslim, Kristen, Hindu, dan Katolik bahu-membahu membangun kembali rumah-rumah yang roboh tanpa pernah bertanya, "Kamu dari gereja mana?" atau "Kamu salat di mana?" Yang mereka tahu hanyalah, "Ini

saudara kita. Mari kita bantu."

Salah satu kisah yang sering diceritakan di Kupang adalah tentang sebuah kampung yang menjadi contoh nyata harmoni dalam perbedaan. Di sana, ada sebuah masjid dan gereja yang berdiri hanya beberapa meter satu sama lain. Setiap hari Minggu, ketika lonceng gereja berbunyi, suara itu tidak pernah dianggap sebagai gangguan oleh jamaah masjid yang sedang bersiap melaksanakan salat Zuhur. Sebaliknya, pada hari Jumat, ketika azan berkumandang, jemaat gereja tidak pernah merasa terganggu. Mereka hidup berdampingan dengan saling menghormati, memahami bahwa suara doa, dalam agama apa pun, adalah bentuk komunikasi dengan Sang Pencipta yang layak dihormati.

Keberagaman yang dirawat di Kupang tidak hanya tentang kebersamaan dalam ruang keagamaan, tetapi juga dalam budaya dan tradisi. Pawai 17 Agustus, misalnya, menjadi simbol persatuan. Di pawai itu, setiap komunitas membawa kebanggaan mereka masing-masing—penari dengan busana adat, rombongan pemuda lintas agama yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan kelompok ibu-ibu yang membawa aneka hidangan khas NTT. Mereka berbaris bersama di jalanan utama, mengibarkan bendera Merah Putih seolah ingin berkata kepada dunia: "Kami berbeda, tapi kami satu."

Di balik semua itu, tentu ada tantangan berupa prasangka dan ketidaksepahaman yang sesekali muncul. Namun, masyarakat Kupang selalu punya cara untuk mengatasinya: duduk bersama, berdialog, dan saling mendengarkan. Prinsip "basudara" selalu dihidupkan—keyakinan bahwa semua orang, terlepas dari suku dan agamanya, adalah saudara yang layak dihormati dan dicintai.

Kupang mengajarkan bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Sebaliknya, ia adalah kekayaan yang harus dijaga dan dirayakan. Ketika kita menerima perbedaan dengan sepenuh hati, harmoni akan tumbuh dengan sendirinya.

Jadi, jika suatu hari Anda berkesempatan mengunjungi Kupang, dengarkan cerita warganya tentang bagaimana mereka hidup dalam keberagaman, dan rasakan kehangatan persaudaraan yang tulus. Karena di Kupang, keberagaman bukan sekadar realitas, melainkan anugerah yang membuat hidup lebih bermakna.

Penutup

Pagi itu, di sebuah lapangan kecil di pusat Kota Kupang, bendera Merah Putih berkibar megah diiringi sorak sorai anak-anak sekolah. Di barisan depan, pemuda Muslim, Katolik, Hindu, dan Protestan berdiri berdampingan, memegang bendera kecil di tangan mereka. Seorang kakek tua dengan pakaian adat Rote berdiri sambil tersenyum bangga, menyaksikan generasi muda berjalan dalam pawai kemerdekaan penuh kebersamaan.

"Ini baru namanya persaudaraan," gumam Pak Daud, seorang pedagang ikan di pasar yang ikut menyaksikan pawai. Di sebelahnya, Bu Siti, tetangganya yang beragama Islam, mengangguk setuju sambil menambahkan, "Di Kupang, perbedaan itu biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kita bisa hidup rukun." Percakapan sederhana itu menggambarkan semangat *basodara* yang selalu hidup di hati masyarakat Kupang.

Pak Daud bercerita tentang pengalaman di hari raya Idul Fitri ketika para tetangga dari berbagai latar belakang agama

datang membawa senyum dan makanan khas mereka. "Pak Made selalu datang bawa sate lilit, dan Maria selalu bantu cuci piring di dapur," ujarnya sambil tersenyum.

Di momen lain, ketika badai seroja merusak banyak rumah, para pemuda lintas agama bahu-membahu memperbaiki rumah Pak Iwan yang nyaris roboh. "Badai tidak tanya kita sembahyang di mana, jadi bantuan juga jangan pilih-pilih," kata Gede, pemuda Hindu yang ikut mengangkat atap kayu bersama teman-temannya. Kisah itu menjadi pengingat bahwa dalam kesulitan, kasih yang tulus justru semakin terasa nyata.

Ketika acara pawai selesai, anak-anak berlarian mengejar balon yang terbang ke langit, sementara para orang tua saling bersalaman. Pak Daud menatap langit biru dengan mata berkaca-kaca. "Kupang mengajarkan bahwa keberagaman itu bukan ancaman, tapi kekayaan yang harus kita jaga," bisiknya pelan.

Seperti bunyi pepatah lama, "Hidup hanya bermakna jika kita hidup untuk menghidupi dan mencintai sesama." Harmoni di Kupang bukan sekadar cerita, tetapi jejak kehidupan sehari-hari yang membuktikan bahwa kasih mampu menyatukan semua. Di tanah *basodara* ini, semua orang berjalan berdampingan, saling menjaga dan menguatkan.

E. Manado

Sulut Sulit Disulut?

Iswan Sual

Saudaraku semua, pernahkah Anda pergi ke Manado? Wah, sayang sekali kalau belum. Cobalah buka aplikasi Google dan

ketik kata “Manado”. Saya yakin banyak hal unik dan menarik yang bakal dilihat. Atau, cobalah menonton film *Senjakala di Manado*. Siapa tahu film yang diluncurkan tahun 2016 dan disutradarai oleh Deni Pusung serta dibintangi Ray Sahetapy dan Mikha Tambayong itu dapat menyodorkan sejumlah referensi destinasi wisata ke ibu kota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini. Cobalah pula menonton film *Mariara* karya Veldy Umbas. Siapa duga Saudara kepincut dan datang mencicipi *tinutuan*, makanan khas yang lumrah disebut bubur Manado itu; makanan yang sekaligus lambang keberagaman di provinsi yang sangat dekat dengan Negara Filipina.

Sulawesi Utara itu *melting pot*. Nyaris semua suku di Indonesia ada wakilnya di tanah yang dijuluki Bumi Nyiur Melambai itu. Di sini kebanyakan masyarakat adalah penganut agama Kristen Protestan, tetapi juga menjadi *wale wangko'* (rumah besar) bagi umat beragama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi, Bahá'i, Taoisme, Zoroaster, Ahmadiyah, Gereja Ortodoks, Syiah, Mormon, Saksi-saksi Yehova, Gereja Anglikan, Malesung, Masade', dan Musi. Tiga yang disebut terakhir adalah agama-agama lokal atau kepercayaan leluhur atau lebih dikenal Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya sendiri adalah seorang penghayat kepercayaan Malesung. Saya adalah pemimpin organisasi penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung (Laroma) yang berpusat di Kabupaten Minahasa Selatan, juga selaku presidium di Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Provinsi Sulawesi Utara.

Kok bisa ya Sulawesi Utara seberagam itu? Saya yakin ada beberapa alasannya. Pertama, di jantung provinsi ada Kota Manado yang merupakan bagian dari tanah adat Minahasa. Sulawesi Utara mengadopsi falsafah Minahasa “*si tou timou*

tumou tou" sebagai motto daerahnya. Makna dari ungkapan itu kurang lebih adalah: manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Di sana terkandung nilai *membetengan* (Minahasa: saling berbagi) karena ada kesadaran bahwa dunia ini adalah milik bersama (Minahasa: *tana'ta im baya*).

Nilai-nilai itu termaktub dalam amanat leluhur Minahasa: *Sapaka si kayoba'ang anio' tana'ta im baya. Asi endo makasa sa me'em si ma'api, wetengen eng kayoba'ang, wetengen e patu'usan... aka'd se tu'us tumou wo tumou tou*. Artinya, kita adalah pemilik bersama dari dunia ini, maka kita harus berbagi... agar keturunan kita hidup dan terus-menerus membantu yang lain hidup.

Tentu saja nilai-nilai dan kearifan lokal yang mengandung kesadaran berbagi ruang dan keterbukaan terhadap perbedaan itu ada pula dalam budaya lain di sekitar. Hal ini tampaknya makin diperkuat oleh ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang datang dan mengada di Sulawesi Utara di kemudian hari. Akan panjang catatan peristiwa dan kejadian yang mencerminkan contoh-contoh pengejawantahan nilai-nilai yang sudah saya singgung di atas, namun saya tidak bisa membeberkan semuanya di tulisan ini. Saya akan membatasi penggalan-penggalan pengalaman pribadi saya sebagai penghayat kepercayaan Malesung, sejauh yang masih saya ingat, yang terjadi beberapa tahun terakhir. Begini kisah-kisahanya:

KTP Penghayat Kepercayaan

Sebenarnya sejak 2017 atau 2018 penghayat kepercayaan sudah memiliki hak untuk tidak mencamtumkan kepercayaan

yang tak diyakininya di kartu tanda penduduk (KTP). Meskipun belum bisa ditulis sebagai “Malesung” pada kolom agama, namun setidaknya kami tak lagi diwajibkan memilih salah satu dari enam agama yang tak kami yakini. Sekarang ini di KTP kami tertulis: “Kepercayaan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Seingat saya, KTP dengan kolom Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa saya dapatkan sejak 2020. Ketika itu saya mengurusnya di Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sebetulnya, saya tergolong penduduk baru di sini. Awalnya saya beralamat di Desa Tondei, Kabupaten Minahasa Selatan, sekitar 3 jam perjalanan dari Kota Tondano. Setelah menikah dengan istri saya yang berasal dari Tondano, barulah saya pindah ke Kabupaten Minahasa.

Saya nyaris tak menemukan hambatan yang berarti saat mengurus kartu keluarga (KK) dan KTP di Tondano, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meski di awal para pegawainya sempat sedikit terkejut tatkala saya menyodorkan formulir dan surat pernyataan terkait perubahan data kependudukan, kesan yang saya tangkap, mereka bersikap ramah dan melayani dengan cepat.

Di Kabupaten Minahasa Utara pun kurang lebih serupa. Sebagai pengurus MLKI kami pernah membantu seorang penghayat Kejawen yang berniat mengganti data agama ke Kepercayaan di kabupaten itu. Dia merupakan penduduk yang baru pindah dari Jawa Tengah.

Di Kabupaten Minahasa Selatan, tempat tinggal asal saya, memang sempat ada kesan mempersulit ketika warga kami mengurus perubahan kolom agama menjadi kepercayaan. Kini, keadaan berubah dan pelayanannya semakin baik.

Sejauh ini mereka sudah menerbitkan lima KTP dengan kolom Kepercayaan.

Kegiatan Lintas Iman

Saya memiliki beberapa teman rohaniwan Kristen di desa, di mana pusat organisasi penghayat kepercayaan kami ada dan tinggal. Kami tetap saling mengunjungi dan menghadiri acara syukuran yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, maka saat mengundang mereka, kami menginformasikan tata urutan upacaranya terlebih dulu serta mengimbau agar mereka datang pada saat makan dan minum saja (bila mengikuti upacara “agama” lain bertentangan dengan keyakinan mereka).

Tentu pertemuan demi pertemuan yang terselenggara bukan saja sekadar basa-basi tetapi juga dimaksudkan untuk memberi ruang dan saling belajar: melihat titik kesamaan dan perbedaan, mengurangi kesan negatif bahwa penghayat kepercayaan adalah sesat dan tertutup, pula ada harapan mereka akan menjadi juru bicara kami di luar sana.

Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak 2020 adalah musibah sekaligus berkat bagi kami. Musibah, karena situasi pandemi membuat banyak persoalan menjadi terbengkalai dan macet. Apa-apa serba dibatasi, ke mana-mana harus punya surat pengantar atau sertifikat vaksin, yang mana semua ini terasa menyulitkan. Di mana-mana orang mengeluh dan menggerutu. Ada yang sampai harus menerima kenyataan jadi pengangguran. Ada yang batal menikah. Ada yang resah tak bisa beribadah. Dunia terasa begitu sukar dihuni.

Kendati demikian, lama-kelamaan, berangsur-angsur, masyarakat mulai terbiasa. Orang-orang mulai mengubah

kebiasaan dan mencari kesibukan. Ada yang memanfaatkan pembatasan itu sebagai kesempatan belajar memasak, berkebun, dan mengembangkan hobi-hobi yang tidak *kesampaian* sebelumnya.

Saat itulah saya justru berkenalan dengan umat Bahá'í di Tondano, selain juga terhubung dengan pemimpin umat Yahudi di Indonesia yang ternyata tempat ibadahnya berada di Tondano, hanya beberapa menit dari tempat saya bermukim.

Perjumpaan kami dengan umat agama yang berbeda dapat diibaratkan seperti rantai yang saling menghubungkan. Saya sering diajak mengikuti kegiatan doa bersama oleh kelompok Bahá'í yang ternyata peserta doanya terdiri atas umat berbeda agama juga. Kami pun pernah berkunjung ke sinagoge, tempat ibadah umat Yahudi. Rabi lalu memperkenalkan kami dengan jemaat Gereja Ortodoks. Romo Gereja Ortodoks mengenalkan pastor Gereja Anglikan. Pastor Anglikan memperkenalkan kami dengan pemimpin umat Tao. Secara bergiliran kami saling berbagi dan berkenalan soal agama dan kepercayaan masing-masing secara *onsite* atau lewat Zoom dan grup Whatsapp. Di kemudian hari, setelah bertemu tokoh agama Sikh, kami bersepakat untuk membentuk Forum Lintas Iman Indonesia (Indonesia Interfaith Forum). Forum ini dibuat bukan sebagai wadah tandingan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang tampaknya enggan melibatkan kami, melainkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dalam konteks kebhinekaan Indonesia.

Oh, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa kami sering bertemu di rumah ibadah umat Yahudi. Si Rabi sering mengundang kami yang tergabung dalam FLII itu. Malahan, gegara seringnya saya pergi ke sinagoge, beberapa orang mengira bahwa saya seorang Yahudi. Relasi baik yang terjalin

tersebut membawa dampak positif bagi diri saya. Banyak informasi yang memperkaya pengetahuan saya tentang agama Yahudi. Sewaktu-waktu bila ada tamu yang kebetulan duduk di dekat saya dan hadir di sinagoge tetapi malu bertanya, jika terdengar oleh telinga saya maka sontak saya *sok-sok tahu* dan membantu menjawabnya.

Sinagoge di Tondano ini, meski kecil, telah menjadi tuan rumah bagi banyak pengunjung lintas iman bahkan lintas negara. Di tempat ini saya mendapat kesempatan bertemu rabi-rabi dari luar negeri, tokoh agama lain, termasuk petinggi dari Kedutaan Amerika Serikat dan Jerman. Di tempat di mana sinagoge berdiri juga disediakan ruangan sekretariat untuk FLII atau Indonesia Interfaith Forum, di mana saya ditunjuk sebagai koordinatornya. Alasan penunjukan saya sebagai koordinator adalah karena saya berlatar belakang penganut agama lokal. Sebagai tuan rumah, kata mereka.

Selama masa pandemi, saya juga mendapatkan kesempatan mengikuti Sekolah Lintas Iman (angkatan XIII) secara daring. Setiap minggu kami bertemu melalui aplikasi Zoom Meeting. Hal yang paling saya ingat adalah para pesertanya kebanyakan merupakan rohaniwan muda dari Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kami saling berkenalan dan membahas soal seperti kesalahpahaman tentang agama lain. Para pembicara yang dihadirkan pun beragam dan sangat menginspirasi. Tidak melulu berbicara soal agama, program ini juga berbicara soal lingkungan. Kegiatan itu membuka mata saya bahwa ternyata kegiatan lintas iman tidak melulu membahas soal iman atau pengalaman toleransi dan diskriminasi. Banyak topik dan isu-isu bersama lain misalnya soal lingkungan, ekonomi kreatif, gerakan literasi dan lain sebagainya yang menjadi topik bahasan.

Dian/Interfidei-lah yang merekomendasikan kami sehingga bisa terlibat dalam kegiatan pelatihan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di kemudian hari saya dikukuhkan sebagai anggota Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dengan beragam identitas agama, suku, dan gender. Saya mendapat banyak teman baru dan pengetahuan terkait hukum dalam kegiatan yang sangat bermutu itu.

Yang terbaru, penghayat kepercayaan dan jaringan lintas iman juga dilibatkan dalam kegiatan training of trainers para guru alumni pelatihan “Mengelola dan Memaknai Perbedaan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Dian/Interfidei di Manado. Saya diundang sebagai perwakilan agama lokal Malesung untuk berbicara dalam salah satu sesi dan bertemu secara langsung dengan para pemuka agama seperti Islam, Bahá’i, Yahudi, Katolik, dan Protestan. Kegiatan ini diselenggarakan di kapel gereja Katolik, di Desa Pineleng, Minahasa yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan Katolik.

Saya juga pernah diundang oleh teman Katolik untuk menjadi narasumber dalam sebuah webinar. Webinar ini sangat berkesan bagi saya. Penyelenggaranya adalah alumni siswa Katolik di salah satu SMA di Kota Manado. Manado memang unik, apalagi walikota yang menjabat saat tulisan ini dibuat tahun 2022 merupakan seorang penganut Konghucu. Padahal, nyaris 70% warga Kota Manado adalah umat Kristen Protestan dan jumlah umat Konghucu hanya mencapai 0,06%.

Dalam webinar yang saya sebut di atas, ada pula pembicara lainnya yang merupakan perwakilan dari berbagai agama di Indonesia. Ada yang berasal dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Pembicara dari KGPM adalah pimpinan tertinggi dari gereja

itu.

Untuk memasyarakatkan penghayat kepercayaan di Sulawesi Utara dan sekitarnya, kami sering menyelenggarakan pertemuan secara daring. Pembicara dipilih dari beragam latar belakang keyakinan, namun pasti selalu ada pembicara dari kelompok penghayat. Moderator selalu perwakilan umat Kristen atau Islam. Agama-agama lokal seperti Monibi (Kabupaten Bolaang Mongondow), Masade (Kabupaten Sangihe), Musi (Kabupaten Talaud) pernah juga menjadi pembicara. Kami secara aktif mengundang dan menghadiri kegiatan-kegiatan dialog lintas iman, entah menjadi pembicara atau peserta biasa.

Selain itu, kami juga pernah berdialog dengan BRIN, Narasi Toleransi Indonesia, Katolikana, Festival Kebhinekaan, dan lain sebagainya.

Penelitian Siswa dan Mahasiswa Teologi

Saya telah lama mengenal Pdt. Jonely Lintong. Meski berstatus pendeta di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), ia lebih banyak berkarya sebagai dosen di Fakultas Teologi dan Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia di Tomohon (UKIT). Kami beberapa kali bertemu dalam diskusi budaya Minahasa. Di kemudian hari, kira-kira 2017, saya menjadi muridnya saat terdaftar sebagai mahasiswa di Program Pasca Sarjana UKIT. Sayalah satu-satunya mahasiswa non-Kristen kala itu. Selama menimba ilmu di sana, saya pernah diminta oleh Pdt. Jonely Lintong untuk menjadi “dosen tamu” dan berbagi tentang agama atau kepercayaan Malesung bagi mahasiswa S-1 Fakultas Teologi. Hal itu masih terus berlangsung sampai dia berpulang tahun lalu.

Di UKIT saya belajar tentang teologi dan antropologi budaya. Kesempatan kuliah di sana saya gunakan untuk mengakses karya ilmiah, skripsi, dan buku-buku tentang Kepercayaan Malesung yang tersimpan di perpustakaan mereka. Sungguh kesempatan yang indah bagi saya.

Setelah itu banyak dosen lain yang mengampu mata kuliah Agama Suku atau agama-agama yang mewajibkan mahasiswa mereka bertemu dengan saya, entah itu untuk keperluan tugas kelompok atau untuk kepentingan studi lanjut. Barangkali sudah ada lima belas judul skripsi atau tesis dari berbagai universitas selain UKIT, seperti IAKN, IAIN, UKSW, UKDW, Unibraw, Unsoed, dll. dengan fokus penelitiannya pada kepercayaan Malesung dan Laroma.

Bulan November 2024, saat sedang beristirahat, tiba-tiba ponsel saya berdering. “Selamat malam, salam rahayu. Perkenalkan saya Evanoel selaku perwakilan dari SMA Lentera Harapan Tomohon. Jadi torang ada penugasan sekolah mengenai agama Malesung, apakah Bapak berkenan untuk diskusi sama-sama atau riset mengenai agama Malesung?”

Saya langsung menyanggupi permintaan dari siswa tersebut. Biasanya topik penelitian agama Malesung dilakukan oleh mahasiswa, tetapi kali ini justru berangkat dari minat siswa. Ini menarik, pikir saya. Siapa guru mereka?

Kami pun bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman. Para siswa itu datang agak terlambat. Dari enam anggota kelompok, lima di antaranya adalah perempuan tetapi hanya empat orang yang aktif bertanya. Menariknya, pertanyaan mereka tak jauh berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa yang pernah datang kepada saya untuk tujuan penelitian.

Terharu, itulah kata yang mampu mengeskpresikan

perasaan saya ketika itu. Setidaknya sedari SMA guru mereka telah memberikan kebebasan untuk memilih tema tugas kelompok. “Pak, hasil penelitian kami, selain akan dipaparkan di kelas, juga akan dimuat di akun media sosial kami. Semoga kami bisa turut membantu memberi klarifikasi kepada masyarakat terkait berita atau informasi negatif tentang agama Malesung.”

Natal Gereja Ortodoks versus Natal Bahá’i

Adalah pengalaman yang unik tatkala seorang penghayat kepercayaan hadir dalam ibadah perayaan Natal, malahan diberi kesempatan untuk memberikan pidato sambutan. Tentu saya gunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Kepercayaan Malesung. Kala itu saya datang bersama umat beragama Bahá’i yang kebetulan rumahnya ada di Tondano, dekat dengan rumah tinggal saya. Di kesempatan itulah untuk pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pendeta dari gereja Anglikan yang juga hadir sebagai tamu undangan.

Hingga kini, penghayat kepercayaan masih menjadi target kristenisasi sehingga di kalangan gereja lain pihak penghayat kepercayaan tidak diberikan ruang sosialisasi. Penghayat kepercayaan bahkan dianggap ancaman, harus dihindari atau “ditobatkan”. Namun, kali ini berbeda. Saat menghadiri acara Natal gereja Ortodoks yang dilaksanakan pada 6 Januari 2022 (sesuai kalender Gregorian, sementara menurut kalender Julian hari itu adalah 25 Desember 2021).

Acara ibadah dilanjutkan dengan makan bersama. Kami memanfaatkan waktu itu untuk mengobrol santai. Perkenalan antar-individu dan komunitas pun terjadi. Hadir juga utusan umat Ahmadiyah dan penghayat kepercayaan Adat Musi.

Jika yang menyelenggarakan acara Natal adalah umat Kristiani itu adalah hal yang lumrah, lalu bagaimana jika acara Natal diselenggarakan oleh umat Bahá'í? Tentu luar biasa. Heboh! Peristiwa ini terjadi di Kota Tondano. Tamu undangan yang hadir pun dari latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Satu hal menarik dalam acara tersebut adalah sesi doa bersama. Masing-masing perwakilan lintas iman diberi kesempatan mendaraskan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk utusan dari penghayat kepercayaan, saya sendiri. Kegiatan ini diselenggarakan di rumah keluarga penganut Bahá'í di Kelurahan Rinegetan, Sulawesi Utara. Lokasinya tak jauh dari Danau Tondano.

Umat Bahá'í di Sulawesi Utara tidaklah banyak. Setahu saya, hanya ada dua keluarga saja. Kedua keluarga inilah yang paling aktif mengikuti kegiatan lintas iman di Tondano.

Ruang Toleransi Ahmadiyah

Perkenalan kami dengan umat Ahmadiyah dimungkinkan berkat Rabi Yaakov Baruch. Sejak saat itu kami saling mengunjungi dan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan masing-masing komunitas, entah secara online maupun onsite. Pernah saya dihubungi oleh seorang ustaz Ahmadiyah di Manado dan meminta saya mengirimkan foto tokoh Minahasa atau Malesung yang memiliki tulisan-tulisan perdamaian. Saya dengar dia juga melakukan hal yang sama dari tokoh-tokoh agama lain yang tergabung dalam FLII.

Usai kegiatan bersama di suatu tempat, sang ustaz mengajak saya dan beberapa teman mampir ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Begitu tiba di tempat tinggal sang ustaz tampak gedung masjid berdiri di dekatnya. Ada tangga yang menanjak

menghubungkan rumah dan masjid itu. Kami dipersilakan masuk lalu disugahi kue dan kopi. Setelah itu kami diantar ke ruangan lain. Dindingnya penuh dengan foto dan gambar. “Pak, ini foto tokoh-tokoh yang pernah saya minta,” kata Ustaz. Saya kaget ternyata memang benar ruangan itu dipenuhi gambar dan kata-kata perdamaian dari berbagai tokoh agama dan kepercayaan yang beragam.

Pernah juga kami diundang untuk hadir dalam Jalsa Salana, sebuah pertemuan nasional umat Ahmadiyah. Di dalam masjid kami diberi tempat duduk lalu diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan berbagi informasi tentang kepercayaan masing-masing. Kami menghabiskan lebih dari tiga jam di tempat itu sembari mengobrol dengan para undangan. Momen itu sangat berkesan bagi saya. Di situ pula saya baru memahami bahwa umat beragama lain boleh menggunakan mimbar masjid untuk memperkenalkan keyakinan yang berbeda.

Belajar di Pesantren Pracimantoro

Nahdlatul Ulama (NU) dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Salah satu tokoh terkenal dari organisasi ini adalah K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tokoh besar toleransi sekaligus pemerhati lingkungan. Banyak orang mengagumi pemikiran dan aksi-aksi kemanusiaan beliau. Perjuangannya dianggap perlu diteruskan. Itulah barangkali yang melatarbelakangi kelahiran kelompok Gusdurian.

Saya memiliki relasi yang sangat baik dengan kelompok Gusdurian, terutama yang berada di Manado. Selain di Manado, kelompok Gusdurian lain yang hidup di Sulawesi Utara ada

Gusdurian Minahasa dan Kotamobagu. Kelompok Gusdurian Manado termasuk sangat aktif dalam kegiatan lintas iman. Kami sudah sering saling menghadiri kegiatan masing-masing.

Karena rekomendasi dari kelompok Gusdurian Manado-lah saya berkesempatan bepergian ke Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri acara sarasehan lintas agama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dalam kesempatan itu saya bertemu dengan para pelaku budaya Nahdlatul Ulama. Selain saya, ada kelompok penghayat kepercayaan lain yang juga hadir, yaitu dari masyarakat Urang Kanekes atau sering disebut Baduy, penghayat kepercayaan Marapu dari Nusa Tenggara Timur, masyarakat adat suku Kajang, suku Bajo, dan suku Tengger tak ketinggalan. Pesertanya lintas iman dan budaya. Ujung barat diwakili utusan dari Aceh, timur diwakili oleh orang Papua, utara diwakili oleh Minahasa, dan selatan diwakili oleh NTT.

Kegiatan sarasehan dipusatkan di aula Pesantren Syahiidah yang terletak di Desa Lebak. Sekalipun kegiatan lebih banyak dilaksanakan di sana, termasuk berbagai diskusi bertemakan budaya, keberagaman, dan lingkungan, para peserta juga diajak untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat budaya spiritual kerajaan Jawa Islam dan situs Kerajaan Majapahit. Di ujung acara selama tiga hari itu diadakan kirab Nusantara dan penanaman pohon serta pagelaran wayang kulit semalaman suntuk.

Sebelum pulang saya menyempatkan diri untuk mengunjungi Candi Borobudur. Pengalaman tiga hari itu sarat dengan peristiwa penting dan membuka cakrawala saya.

Interaksi dengan orang-orang berbeda suku, keyakinan, dan budaya sungguh sangat menyenangkan.

Pendampingan LBH Manado

Selama setahun terakhir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado mulai menyeriusi topik kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) setelah sebelumnya lebih banyak berkuat pada konflik-konflik agraria dan isu HAM lainnya. Penghayat kepercayaan pun beberapa kali dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas seperti membuat media publikasi yang menarik sebagai alat sosialisasi organisasi penghayat kepercayaan. Bagaimanapun, salah satu penyebab terjadinya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan adalah kurangnya informasi dari sumber primer (penghayat itu sendiri).

Demikian halnya, hal ini tampak juga dalam perayaan Natal yang diselenggarakan oleh LBH Manado. Salah satu kelompok rentan yang diundang untuk hadir, selain penghayat kepercayaan, ialah kelompok LGBTQIA+ dan disabilitas. Bahkan, LBH Manado sampai pada tahap mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) yang ramah terhadap kelompok minoritas yang telah disebut di atas. LBH Manado senantiasa mengupayakan supaya kelompok-kelompok rentan selalu mengadakan kegiatan bersama dan saling mendukung sehingga di antara kelompok-kelompok rentan tersebut dapat berkolaborasi dan tidak sektoral.

Jaringan yang terbangun antara Lalang Rondor Malesung (Laroma) dan LBH Manado membawa penghayat kepercayaan lebih dikenal oleh masyarakat Sulawesi Utara. Pemberitaan dan sesi dialog podcast khusus yang membahas sejarah,

perkembangan, dan tantangan penghayat kepercayaan sudah diadakan beberapa kali. Pengurus LBH Manado dan penghayat kepercayaan kini saling menghadiri kegiatan masing-masing. LBH Manado selalu hadir dalam forum-forum demi memberikan penguatan soal landasan hukum terhadap penghayat kepercayaan. Selain itu LBH Manado juga turut membantu menyuarakan dalam forum-forum nasional terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dialami penghayat kepercayaan di Sulawesi Utara.

Mitra Balai Pelestari Kebudayaan

Hubungan antara Laroma, MLKI Sulawesi Utara, serta lembaga yang mengurus penghayat kepercayaan di daerah terutama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVII yang mencakup juga Gorontalo juga terjalin baik. BPK memberikan pendampingan kepada Laroma saat terjadi perusakan Wale Paliusan atau sasana sarasehan milik warga penghayat kepercayaan Malesung di Kabupaten Minahasa Selatan. BPK turut membantu dalam mendiseminasi informasi terkait Laroma. Tidak hanya itu, mereka juga memfasilitasi tempat dan memberi ruang publikasi di media cetak lokal. Pada kesempatan itu warga Laroma diberi kesempatan membuat tulisan panjang untuk dipublikasikan di koran lokal, yang juga dimuat di media versi online-nya.

Pada suatu waktu BPK pernah mengundang saya sebagai ketua umum Laroma dan presidium MLKI untuk menjadi pembicara dalam podcast dialog lintas iman dengan topik moderasi beragama dan pendidikan kepercayaan dalam pemajuan kebudayaan. Di situ saya berdampingan dengan pembicara lainnya yaitu dosen Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Manado, Kepala BPK, dan dosen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara BPK dan Manado Post. Rekaman dialog ini dimuat di akun Youtube Manado Post dan Facebook BPK.

Film Dokumenter Mahasiswa Pukkat

Pukkat (Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur) digerakkan oleh insan-insan berpendidikan teologi. Mereka di antaranya berprofesi sebagai dosen, jurnalis, aktivis HAM, maupun masyarakat adat. Kiprahnya dalam gerakan kebudayaan dan jurnalistik termasuk yang paling serius di Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilakukan Pukkat antara lain banyak menggelar diskusi tentang budaya, teologi, lingkungan, dan isu-isu terkini. Kantor Pukkat menjadi salah satu ruang diskusi yang telah banyak menghadirkan pembicara-pembicara nasional. Secara rutin mereka menjadi host family bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa untuk belajar selama beberapa bulan. Di akhir program, sebagai luarannya, akan senantiasa ada produk video atau film pendek terkait tema yang dipilih, salah satunya Laroma.

Kami pun beberapa kali pernah menerima mahasiswa yang kemudian berinteraksi secara langsung dengan warga Laroma. Dari hasil diskusi dan wawancara itu, mereka kemudian menciptakan film dokumenter pendek terkait Laroma. Salah satu peristiwa yang disorot adalah kasus perusakan rumah ibadat kami. Kami merasa sangat senang sebab, setidaknya, sebagai mahasiswa Kristen mereka turut memberikan narasi berimbang terkait penghayat kepercayaan. Harapannya, melalui karya mereka, masyarakat teredukasi dan bisa menilai persoalan dari kedua belah pihak. Film tersebut berhasil

menyabet juara III berdasarkan penilaian panitia di kampus mereka.

Bagaimana mahasiswa yang berasal dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Jakarta itu bisa sampai membuat film dokumenter terkait penghayat kepercayaan? Singkatnya, hal ini dikarenakan hubungan jejaring yang sudah lama terbangun antara Laroma dan Pukkat. Keduanya punya minat yang serupa pada tema-tema yang sudah disinggung di atas.

Penghayat Mediator Bersertifikat

Dengan berjejaring dengan beragam manusia maka kita akan terhubung dengan berbagai macam organisasi. Hal tersebut pulalah yang membawa saya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Pusat Media Nasional (PMN) dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Yayasan Wakaf Paramadina. Kedua lembaga itu menggandeng Rumah Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari itu dibuka secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Kota Manado. Pesertanya berasal dari berbagai elemen, antara lain Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Manado, Forum Pembauran, IAKN, Ahmadiyah, Bahá'i, Gusdurian, AMAN, Katolik, penyuluh Buddha, guru Agama Islam, dan lain sebagainya. Isi kegiatannya berupa materi dan praktik atau simulasi tentang mediasi.

Kegiatan ini diselenggarakan mengingat mulai meningkatnya konflik sosial di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara yang dianggap sebagai salah satu daerah toleran. Dari proses yang

diikuti, saya kemudian menyadari bahwa pengetahuan saya tentang mediasi sebelumnya adalah keliru. Mediasi gaya lama cenderung menghadirkan unsur pemaksaan supaya salah satu pihak mengalah atas alasan stabilitas. Penyelesaian konflik di negara kita memang banyak dilakukan dengan cara demikian. Mediator tidak berperan sebagai jembatan tetapi justru sebagai alat penekan dari yang lebih berkuasa.

Setelah kegiatan ini usai, kami masih harus mengikuti pertemuan-pertemuan lanjutan, bahkan kami juga harus menempuh ujian. Tahap evaluasi pun ditempuh untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan itu telah berfaedah dalam kegiatan sehari-hari. Pada akhirnya, kami menyepakati untuk membentuk lembaga yang di dalamnya bernaung para mediator bersertifikat ini. Saya tentu merasa senang karena ikut dilibatkan. Semoga ilmu dan pengalaman ini bisa bermanfaat di masa mendatang.

Sarasehan di Rumah Penghayat Kejawan

Mungkin orang beranggapan bahwa kepercayaan Kejawan itu identik dengan Jawa dan hanya terdapat di Jawa. Tak banyak yang menduga bahwa di Kabupaten Minahasa Utara pun ada warganya yang menganut kepercayaan Kejawan. Sudah sekitar 5 tahun dia tinggal di Sulawesi Utara dan bermukim di sana.

Kami bertemu di Watu Pinawetengan, pusat budaya spiritual orang Minahasa atau Malesung. Di tempat itu kami mengobrol panjang dan di sanalah saya mengetahui bahwa dia adalah seorang penghayat Kejawan. Pada kesempatan itu, ia juga mengutarakan keinginannya mengubah identitas kepercayaannya di KTP. Saya sampaikan bahwa kami akan membantu bila itu diperlukan. Beberapa bulan kemudian,

dia datang berkunjung ke rumah kami dan menyatakan kemantapannya untuk mengganti data agama di KTP.

Ia tinggal di Desa Kawiley seorang diri. Saya amati ia memiliki banyak teman. Akhir pekan rumahnya selalu ramai. Semenjak mengubah identitas keyakinannya, ia bergabung dalam kepengurusan MLKI Sulawesi Utara. Perbedaan tata cara dan konsep keyakinan di antara kami sama sekali tidak menghalangi pertemanan kami.

Rumah penghayat Kejawaen menjadi salah satu tempat pelaksanaan kegiatan MLKI di Sulawesi Utara, Kegiatan yang dimaksud tersebut dinamakan Sarasehan Kepercayaan-Agama dan Pelatihan Jurnalistik Berperspektif Keberagaman. Sang tuan rumah merelakan rumahnya untuk dipakai memungut biaya sewa sepersen pun. Beberapa alat rumah tangga bahkan diizinkan untuk digunakan demi kesuksesan acara itu.

Tolak Bala

Nyaris setiap tahun, desa kami Tondei melaksanakan upacara Kemi'is In Do'ong. Upacara ini dilakukan untuk memohon kepada Yang Mahakuasa agar unsur-unsur jahat dan negatif dijauhkan dari kampung kami.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 Mei 2022 lalu itu tergolong istimewa sebab pesertanya bukan hanya penghayat kepercayaan dari penduduk desa, melainkan juga dari luar desa. Keyakinan mereka pun beragaman. Suami teman saya yang berdomisili di Kota Tomohon meminta supaya komunitas yang dia bina juga diundang. Tentu kami senang. Mengejutkan karena para peserta yang datang adalah pembina dan anak-anak PPA dari Desa Mariri, Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu, organisasi gereja yang bernama Panji Yosua ikut

serta bahkan ikut mengawal jalannya upacara dari awal sampai akhir.

Gereja Anglikan

Gereja Anglikan termasuk gereja yang paling baru di bumi Manado. Kami pertama kali bertemu di acara Natal yang diselenggarakan oleh gereja Ortodoks Indonesia di Manado. Komunikasi kami dengan pastornya, yang juga tertarik dengan kegiatan sosial-budaya, cukup bagus. Dia bahkan meminta saya sepeinggal kain tenun Minahasa untuk dia jadikan sebagai stola di gerejanya. Saya menangkap adanya kesan positif terhadap keinginannya menunjukkan keramahan terhadap budaya lokal dan barangkali kepada para penghayat kepercayaan.

Suatu ketika kami datang ke gedung gerejanya di satu permukiman elite di Kota Manado. Kami menggunakan satu ruangan untuk menyelenggarakan diskusi lintas iman. Para pembicaranya berasal dari perwakilan agama Yahudi, Ahmadiyah, Bahá'i, Taoisme, Sikh (Jakarta), serta gereja Ortodoks. Kedua kelompok yang terakhir disebut hadir secara daring, sementara saya berperan sebagai moderator.

Kegiatan dialog lintas iman itu berlangsung sangat menarik, apalagi Direktur Dian/Interfidei, Pdt. Olga Sarapung yang kebetulan sedang berkunjung ke Manado ikut hadir, selain juga para dosen IAKN Manado.

Siswa Penghayat Pertama

Organisasi kami, Laroma, sejak dua tahun lalu memiliki anggota baru anak usia sekolah. Sayangnya, ketika itu kami sempat mengalami kendala dalam melayani pendidikan kepercayaan

mereka. Syukur kepada Tuhan, mulai tahun ini seorang siswa penghayat sudah mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti.

Permohonan kepada kepala sekolah tentang pendidikan kepercayaan bagi siswa penghayat yang disampaikan secara langsung oleh orang tua siswa mendapat respons yang positif, yaitu dengan memberikan solusi menggunakan hari Rabu setiap minggunya untuk melaksanakan pendidikan kepercayaan di sekretariat organisasi penghayat kepercayaan Laroma.

Saat saya datang ke sekolah dan menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas sebagai guru atau penyuluh pendidikan penghayat untuk melayani siswa di sekolah tersebut, para guru dan kepala sekolah juga menyambut gembira. Saya menanyakan keadaan dan perkembangan siswa tersebut pada wali kelas. Kami berbincang santai dan ramah, tanpa sedikit pun perilaku intoleran dan diskriminatif yang diterima. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sekolah itu adalah sekolah negeri dan terbuka dengan siswa yang beragam keyakinannya.

Festival HAM

Tahun 2024 lalu, Kota Bitung ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia. Ratusan peserta aktivis pun datang memadati kota yang terkenal dengan kota ikan cakalang itu. Secara serentak, semua mata tertuju pada Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai salah satu warga, tentu kami merasa sangat bangga.

Tak terkecuali kami dan para penghayat kepercayaan lain pun ikut dirangkul dan diundang sebagai peserta oleh INFID. Semua akomodasi dan transportasi disediakan oleh panitia. Dalam diskusi-diskusi di kelompok kecil maupun panel, kami

juga diberi kesempatan untuk bersuara. Masalah-masalah yang pelik didiskusikan dalam suasana santai. Festival yang serius namun santai ini juga dibalut dengan penampilan konser musik, pameran, dan penampilan-penampilan menarik lainnya.

Beruntungnya lagi, organisasi penghayat Laroma diberi ruang untuk memasang x-banner dan perlengkapan pameran lainnya. Tentu, kami tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami pun mencetak banner berisi foto-foto dan narasi yang pada pokoknya berisi tentang informasi tentang penghayat kepercayaan dan bagaimana ups and downs-nya di Sulawesi Utara.

Festival Kebhinekaan

Meningkatkatnya ketegangan akibat politik di Jakarta mengakibatkan polarisasi yang meruncing di masyarakat. Sulawesi Utara pun tidak luput merasakan dampaknya. Fenomena saling melabel “cebong” dan “kampret” satu sama lain meluas hingga bumi Nyiur Melambai pula. Hal itu tentu menimbulkan kekhawatiran di antara warga Sulawesi Utara yang tak ingin terbawa arus destruktif tersebut. Dari sinilah para aktivis keberagaman berkumpul untuk melakukan sesuatu.

Berawal dari pertemuan santai di Pantai Malalayang, Manado, diikuti pertemuan lain melalui mediasosial, tercetuslah ide untuk menggelar satu event yang intinya dikerjakan oleh orang-orang dengan beragam identitas agama dan kepercayaan, suku, dan ras. Pada akhirnya diputuskan secara bulat tentang rencana dilaksanakannya festival keberagaman. Kegiatan ini melibatkan kelompok Kristen, Islam, Konghucu, Hindu, dan

penghayat kepercayaan Malesung. Kegiatan itu digelar pada 2017 di Kota Manado, tepatnya di aula Kantor DPRD Sulawesi Utara.

Festival keberagaman yang diselenggarakan itu merupakan perpaduan antara unsur seni, budaya, dan pesan-pesan perdamaian agama dan kepercayaan. Dalam festival tersebut dikumandangkan pula lagu-lagu kolaborasi, yakni lagu Natal dan salawat. Selain itu ada pula pertunjukan tari Bali dan pencak silat serta tak lupa doa dan pidato-pidato para tokoh agama dan kepercayaan.

Hari Raya Ketupat

Tempat tinggal kami berhadapan dengan gedung gereja. Tak jauh dari tempat kami berada terdapat sebuah lorong yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lorong itu dinamakan Lorong Gorontalo. Nama Gorontalo sebetulnya mengacu pada nama suku sekaligus provinsi. Sebelum memekarkan diri menjadi provinsi baru, daerah itu dulunya menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Orang Gorontalo memang kebanyakan tinggal di seputaran Pasar Tondano. Di tengah-tengah pasar itu terdapat masjid besar. Karena telah hidup secara bergenerasi-generasi di sana, hidup mereka tak ada bedanya dengan orang lokal.

Kami memiliki kios kecil. Dan seorang bapak yang dipanggil “Haji” atau “Ustaz” menjadi salah satu pelanggan kami. Dia mengundang kami saat hari-hari raya Islam. Bila sempat, kami datang dan menikmati makanan khas Gorontalo yang dibawa leluhur mereka ke Kota Tondano, termasuk ketupat khas mereka. Hal seperti itu menjadi hal biasa terjadi di sini.

Komunitas Muslim di Tondano tersebar di tiga tempat. Di

setiap tempat kami memiliki kenalan dan pelanggan. Setiap tahunnya di Kampung Jawa Tondano, setiap ada perayaan hari raya, kami juga datang. Mayoritas penduduk kampung itu adalah keturunan campuran para pria Jawa dan wanita Minahasa. Para pria itu adalah orang-orang buangan di masa Penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19.

Bahasa Tondano yang digunakan oleh masyarakat di Kampung Jawa Tondano sangatlah kental. Sultan Yoga pun sering berkunjung ke kampung itu oleh karena adanya Festival Jaton (Jawa Tondano) setiap tahunnya. Orang-orang Jaton yang tersebar di berbagai daerah hadir dalam festival itu. Ada pagelaran tari, nyanyian, dan lain-lain. Semuanya disampaikan dalam bahasa Tondano.

Makan Siang Bersama Konsulat Jenderal

Sekalipun hubungan antara penghayat kepercayaan dan warga lintas iman itu sudah terjalin baik, namun justru dengan pemimpin agama mayoritas (baca: Kristen Protestan) belum pernah terjadi. Tim dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya-lah yang memungkinkan hal itu terjadi.

Pertemuan lintas iman yang sering terjadi selama ini adalah antar-sesama kelompok mikro minoritas. Baru di tahun 2024 kami berkesempatan bertemu dan makan siang bersama dengan pimpinan Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja terbesar di Sulawesi Utara. Hadir juga pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Hindu, serta Buddha.

Meskipun di awal acara makan siang itu terkesan kaku, tetapi perlahan-lahan situasi itu mencair. Pada kesempatan itu setiap hadirin diberi kesempatan memperkenalkan diri beserta latar agama atau kepercayaan masing-masing,

termasuk memberikan laporan singkat terkait sejarah dan perkembangannya.

Penutup

Saya percaya bahwa kerukunan tidak mungkin diperoleh dengan hanya berpangku tangan. Hal tersebut harus diupayakan dan dikerjakan. Leluhur Minahasa di masa silam tentu sangat menyadari pengaruh buruk dari keadaan yang tidak nyaman. Mereka sangat memahami akibat yang ditimbulkan dari perseteruan antarsuku dan kaum. Hal itu dikarenakan banyak yang telah menjadi korban dari peperangan dan perselisihan yang panjang. Itulah sebabnya di kemudian hari mereka merenung dan mengingat-ingat kembali pesan dan nasihat awal para pendahulu. Maka hadirilah rumusan pemikiran soal kesetaraan dan pentingnya menjaga keselarasan: *“masuat peleng mapute waya”*. Semua sama, seluruhnya serupa.

Ikrar untuk ber-Minahasa atau bersatu padu dan saling melindungi selama ribuan tahun kemudian menjadi DNA orang Minahasa. *Nuwu' in Tu'a* atau amanat leluhur yang kemudian dirumuskan ulang oleh pahlawan nasional Gerungan S. S. J. Ratulangi menjadi *Si Tou Timou Tumou Tou* adalah warisan pemikiran dan upaya yang harus dikekalkan anak keturunan “Apo Lumimut” dan “Apo Toar” di mana pun mereka berada. Kesadaran bahwa dunia ini milik bersama harus terus didengarkan sehingga tak ada sekat pemisah antara yang besar dan kecil. Semua memiliki hak yang sama dalam ruang yang diciptakan oleh Tuhan.

Penghayat kepercayaan, lebih khususnya warga Malesung, harus menjadi subjek yang berperan dalam menghadirkan perdamaian di tanahnya bahkan di dunia (*kayoba'ang*). Ia

harus saling berbagi ruang, bukannya saling berebut. Semua itu dilakukan agar *se tu'us tumou wo tumou tou*. Generasi yang akan datang benar-benar terlahir sebagai manusia yang berpikir dan bergerak memanusiaikan manusia yang lain.

F. Surabaya

Jalan Sempit Berliku dan Berduri Menuju Kesatuan Umat Manusia

Soesi

Ibu Ida dan Bapak Pandu (bukan nama sebenarnya) lebih dari 24 tahun telah tinggal di Kota H yang tak jauh letaknya dari Surabaya. Mereka terpaksa, atau lebih tepatnya dipaksa, meninggalkan desa dan rumahnya yang terletak di Kabupaten K, karena telah memilih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Bahá'u'lláh, yang disebut agama Bahá'í. Ada beberapa puluh jiwa yang diusir pada waktu itu, dengan alasan yang sama. Mereka berasal dari beberapa desa dari salah satu kecamatan di kabupaten itu. Sejak beberapa waktu lalu desa tersebut kini dikenal sebagai Kampung Harmoni, di mana penganut berbagai agama dapat hidup bersama dalam kerukunan, meskipun masih ada juga penolakan terhadap warga Bahá'í untuk masuk kembali ke desa itu.

Pasutri Pandu-Ida ini memiliki dua orang anak. Pada waktu itu anak yang sulung baru masuk sekolah menengah atas, dan yang bungsu di kelas II sekolah dasar. Tidak mudah mencari sekolah bagi anak-anak itu, sebab mereka tidak punya, atau tepatnya membawa, buku rapor apalagi surat dari

sekolah asalnya di K. Ada banyak anak yang terdampak oleh pengusiran ini.

Tulisan ini ingin menyampaikan apa yang dialami oleh keluarga pasutri Pandu-Ida, bersama rekan-rekan mereka, serta perjuangan mereka dalam menjalin hubungan dan menjelaskan identitas agama dan lembaga mereka kepada masyarakat yang mengusir bahkan menghancurkan rumah mereka. Semua itu mereka jalani dengan terus belajar dan semakin memahami ajaran agama Bahá'í yang dianutnya itu; belajar menerapkan dan mempraktikkan ajaran-ajarannya, belajar menyampaikan dan menjelaskan apa yang mereka yakini. Mereka juga belajar untuk tidak menempatkan diri mereka sebagai korban namun semua itu terjadi akibat kurangnya pemahaman, bahwa semua manusia diciptakan mulia, dan masyarakat harus mampu menjaga dan memelihara kemuliaan itu. Belajar adalah kata kuncinya.

Agama Bahá'í

Umat Bahá'í meyakini bahwa semua bangsa di dunia selalu diingat oleh Tuhan. Realitas yang tak dapat diketahui itu, Tuhan, di setiap zaman selalu membuka pintu rahmat-Nya bagi siapa saja, dengan mengirimkan Utusan-Nya yang bertugas memberi stimulus moral dan spiritual yang diperlukan umat manusia untuk bekerja sama dan maju. Banyak dari Utusan itu, para Cahaya Agung bagi dunia itu, yang namanya sudah hilang dan tak lagi dikenal. Namun ada juga yang masuk ke dalam catatan sejarah perkembangan peradaban umat manusia karena telah menyebabkan perubahan besar dalam hal pemikiran, telah membuka khazanah pengetahuan, memberi inspirasi bagi munculnya peradaban baru. Mereka merupakan para visioner

rohani dan sosial, cermin-cermin kebajikan tanpa noda, telah memberikan ajaran-ajaran dan kebenaran-kebenaran yang menjawab kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada zamannya masing-masing. Umat Bahá'í meyakini bahwa Bahá'u'lláh adalah salah satu Sosok itu, yang ajaran-ajaran-Nya akan mengantarkan zaman perdamaian dan persatuan ketika seluruh umat manusia akan hidup berdampingan, bekerja sama, saling membantu dalam kerukunan dan keharmonisan, sebagai saudara dalam satu keluarga besar umat manusia.

Bahá'u'lláh dilahirkan pada 1817 di Teheran, Iran sekarang, Persia pada waktu itu, dan mengumumkan misi-Nya pada 1863 di Baghdad. Pengumuman Bahá'u'lláh didahului oleh munculnya Sang Báb, Bentara yang mengumumkan kedatangan Bahá'u'lláh, pada 1844 di Shiraz. Mereka berdua disebut sebagai Perwujudan Kembar Tuhan. Ajaran Bahá'u'lláh pertama kali masuk ke wilayah ini, Indonesia sekarang, Hindia Belanda kala itu, sekitar tahun 1885.

Para Utusan Tuhan adalah Pendidik sempurna bagi umat manusia. Sepanjang sejarah perkembangan peradaban umat manusia, Mereka membawa cahaya ke dunia, meninggalkan warisan berupa kata-kata suci. Melalui pena Bahá'u'lláh, kata-kata mengalir bagaikan sungai-sungai yang terkumpul dalam samudra berupa puluhan kitab, yang di dalamnya berisi hukum-hukum dan perintah-perintah moral yang membebaskan jiwa manusia dari naluri duniawi yang tak layak bagi jati diri sejatinya.

Selain mengajarkan keesaan Tuhan dan kesatuan agama, Bahá'u'lláh juga mengajarkan kesatuan umat manusia. Ia memberikan penjelasan-penjelasan yang menyingkapkan bekerjanya tangan Tuhan dalam sejarah berliku perkembangan umat manusia yang telah melewati tahap persatuan kaum dan

suku, ke persatuan bangsa, dan sedang menuju ke bentuk-bentuk persatuan yang lebih tinggi. Agama-agama yang berbeda-beda di dunia sebagai ungkapan-ungkapan dari kebenaran mendasar yang tunggal, saling terkait satu sama lain oleh sumber yang sama, dan oleh tujuan yang sama, yakni untuk mentransformasi kehidupan batin dan kondisi lahir umat manusia. Ia mengajarkan kemuliaan roh manusia, dan masyarakat yang Ia visikan adalah masyarakat yang layak bagi kemuliaan itu, dan didirikan di atas prinsip-prinsip yang dapat menjaga kemuliaan itu.

Ibu Ida dan Bapak Pandu menemukan bahwa ajaran-ajaran Baha'u'llah selaras dengan jiwa mereka, sesuai dengan zaman ini. Namun, mereka tidak serta-merta mengumumkan hal itu di dalam masyarakat.

Diteror dan Diusir

Kisah perjuangan pasutri ini dimulai dengan keterbukaan dan kejujuran mereka pada waktu mengisi formulir sensus saat itu, tahun 2000, terkait identitas agama. Petugas sensus mereka beri tahu agar menjaga informasi ini, dan jika ia ingin tahu tentang Bahá'í agar bertanya kepada mereka dan bukan kepada orang yang bukan Bahá'í. Namun petugas itu menyampaikan informasi tersebut kepada ayahnya, yang merupakan seorang guru agama. Ayahnya itu menyampaikan kepada orang-orang lain di desa itu, termasuk ayah Pandu yang merupakan tokoh organisasi massa besar, yang saat itu belum tahu tentang keyakinan baru anaknya. Dapat diduga banyak orang marah mendengar berita itu. Mereka tak bisa menerima ada orang meninggalkan agama yang sama-sama mereka anut.

Tidak berselang lama sejak identitas pasutri ini disampaikan

di sensus, teror terhadap mereka dimulai: rumah mereka akan dibakar, bahkan jiwa mereka pun diancam. Pandu-Ida dan keluarga masih berusaha bertahan di rumah mereka di desa itu, namun tidak lagi berani tidur malam di rumah mereka, takut akan diserang malam-malam.

Ancaman dan teror terus berlanjut hingga akhirnya mereka harus meninggalkan tidak hanya desanya tapi juga Kabupaten K, kemudian memilih tinggal di Kota H. Beberapa waktu kemudian mereka menerima kabar bahwa rumah mereka dirusak massa meskipun tidak sampai dibakar, takut api akan menyebar dan melalap rumah-rumah di sekitarnya yang merupakan milik di antara para perusak itu. Bukan hanya rumah Pandu-Ida saja yang dirusak, tapi ada beberapa rumah orang Bahá'í lain yang juga mengalami nasib serupa.

Setelah peristiwa perusakan rumah tersebut, meski masih ada pihak yang kontra, simpati di antara warga masyarakat mulai muncul. "Kenapa rumah dirusak, rumah *kan* tidak tahu apa-apa."

Teman Sejati

Pandu-Ida mengatakan, pada waktu identitas agama mereka tersebar, mereka berada dalam intaian. Teror dan ancaman terhadap mereka tidak disampaikan secara langsung, tapi didengar dari berita kasak-kusuk di masyarakat. Ada beberapa teman mereka yang mendengar dan menyampaikannya kepada mereka.

Anggota keluarga dan orang-orang yang dianggap dekat dengan mereka ikut dicurigai dan diintai. Beberapa teman terus memberi perkembangan kabar kasak-kusuk di masyarakat

bahkan setelah mereka meninggalkan desa mereka.

Tidak banyak orang yang berani dalam situasi semacam ini. Pandu menuturkan bahwa ada kawannya, ia sebut si kembar, yang terus memberinya kabar, yang bahkan tidak takut membelanya. Si kembar ini tidak memiliki pendidikan yang tinggi tapi memiliki kesadaran untuk mencari fakta, dan tidak membiarkan diri larut dan menerima berita kasak-kusuk begitu saja. Si kembar inilah yang memberi semangat bagi keluarga Pandu-Ida. Teman sejati dalam situasi di mana orang-orang takut mendekat, atau dipandang dekat, karena dianggap murtad.

Di tahun yang sama, orang tua Pandu akhirnya dapat bertemu kembali dengan putra, menantu, dan cucu-cucu mereka. Ibunda Pandu-lah yang mendorong suaminya untuk segera mencari tahu di mana keberadaan Pandu dan keluarganya. Ia amat rindu pada cucunya. Ayah Pandu pun dapat menerima anaknya kembali. Pada awal diketahuinya identitas agama Pandu, keluarga intinya sempat mengancam tidak akan mengakuinya sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan ia tak akan diberi warisan jika melanjutkan keyakinannya itu. Namun, berbeda dengan ayah Pandu, adik kandung dan ipar Pandu yang justru memiliki pengetahuan yang dalam tentang agama—tetapi bukan ahli agama—memerlukan waktu puluhan tahun untuk dapat menjalin hubungan baik kembali dengan Pandu. Salah seorang paman Pandu yang merupakan seorang mubalig, yang ditakuti akan menentang Pandu, di luar ekspektasi malah bisa menerima realitas keyakinan Pandu.

Belajar Menjadi pembelajar

Pandu-Ida dan kedua anak mereka menggunakan sarana

belajar, musyawarah, refleksi, dan tindakan dalam menavigasi jalan yang sulit ini.

Hal pertama yang mereka lakukan dan tekankan bagi diri mereka adalah mempraktikkan kata-kata ini: “Perbuatanlah yang menjadi perhiasan kalian, bukannya perkataan.” Kalimat itu mereka kutip dari salah satu di antara puluhan kitab Baha’u’llah (di mana semua yang ditulis oleh Beliau merupakan kitab suci bagi umat Bahá’í) yang berjudul “Kalimat Tersembunyi” yang berbunyi: “Sesungguhnya Aku katakan kepadamu: Di antara semua manusia yang paling lalai adalah dia yang berdebat dengan tololnya dan berusaha menang di atas saudaranya. ... Perbuatanlah yang menjadi perhiasan kalian, bukannya perkataan.”

Pandu mengatakan, “Saya tidak pernah merasa dendam terhadap orang-orang yang memusuhi saya.” Karena “Mereka tidak bersalah, hanya tidak tahu.” Mereka membenci karena ketidaktahuan saja. Ida selalu memastikan untuk selalu menyapa lebih dulu orang-orang yang memusuhi dia. Ida belajar mempraktikkan ‘jika diberi racun, balas dengan susu’. Diam saja ketika dimusuhi.

Sebenarnya, Pandu-Ida dan keluarga sedang belajar menerapkan antara lain tulisan berikut: “Ketika timbul pikiran untuk berperang, lawanlah pikiran itu dengan pikiran yang lebih kuat tentang perdamaian. Pikiran kebencian harus dihancurkan dengan pikiran yang lebih kuat tentang cinta.” Juga tulisan ini: “Janganlah puas dengan menunjukkan persahabatan hanya dalam perkataan; biarlah hatimu menyala dengan cinta kasih terhadap semua orang yang kautemui.”

Kini tidak hanya bersama kedua putra mereka, mereka belajar dan bermusyawarah bagaimana menerapkan tulisan

ke dalam tindakan, tetapi juga bersama anggota keluarga besar, famili dan kawan-kawan di desa asal mereka, dan juga teman dan tetangga di sekitar tempat tinggal mereka sekarang. Bersama-sama mereka juga belajar melakukan refleksi atas praktik yang mereka lakukan, bagaimana bersama-sama belajar membangun persaudaraan universal, meningkatkan kesadaran bahwa kita adalah satu. Ini bukanlah sebuah proses yang pendek tetapi akan memerlukan waktu yang amat panjang bahkan bergenerasi-generasi, namun kesatuan dan persatuan umat manusia merupakan tujuan dan takdir kita, umat manusia. Tujuan ini harus dicapai dengan menggunakan cara-cara persatuan. Amat banyak rekonsepsi yang perlu dilakukan. Jalannya masih panjang, kadang sempit, berliku, dan bahkan berduri.

BAB VI

PENUTUP

Materi-materi yang disusun dalam modul ini dapat digunakan sebagai bahan ajar sekaligus pembelajaran bagi pemandu maupun peserta lokakarya informal bagi pemimpin lokal untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Materi ini masih sangat bisa dikembangkan terutama dengan menambahkan kisah-kisah sukses baru yang bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin lokal dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran perlunya kebijakan-kebijakan yang inklusif.

Dengan demikian segala hal yang terdapat dalam modul ini bisa diambil seluruhnya ataupun sebagian, digandakan demi kepentingan pengadaan lokakarya sejenis di daerah-daerah lain di Indonesia sepanjang dilakukan dengan menyebutkan sumbernya.

Kontributor Tulisan

Penulis

Benny D Setianto, buruh pengajar dan peneliti di Unika SOEGIJAPRANATA ini meminati isu-isu Hak Asasi Manusia, gerakan masyarakat sipil, dan tata kelola lingkungan yang adil.

Ridwan Sanjaya adalah Guru Besar Sistem Informasi di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Fokusnya pada transformasi digital pendidikan, optimalisasi teknologi untuk bisnis, dan inovasi digital.

Theresia Dwi Hastuti adalah Guru Besar Akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata. Fokus risetnya adalah di bidang ilmu fraud dan forensik audit, akuntansi sosial lingkungan, akuntansi keuangan, dan entrepreneurship.

Adrianus Bintang, staf pengajar di Universitas Katolik Soegijapranata yang mengembangkan minat riset tentang kelompok minoritas keagamaan (baik agama-agama dunia maupun agama leluhur) yang mengalami marjinalisasi, kerja-kerja kreatif masyarakat sipil dalam upaya bina damai, dan studi tentang kewarganegaraan kritis.

Andre Kurniawan Pamudji, pengajar di Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Soegijapranata, meminati hal-hal terkait teknologi untuk mendukung perkembangan kota cerdas.

Stephani Inggrit Swastini Dewi, pengajar di Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Soegijapranata. Berfokus pada penggunaan teknologi untuk bisnis dan bisnis game.

Fidelis Aggiornamento Saintio menjadi pengajar Filsafat Komunikasi, Opini Publik, dan Fotografi di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata. Minat risetnya ada di bidang ujaran kebencian dan hermeneutika.

Kontributor

Soesiana Tri Ekawati, adalah penganut Agama Baha'i yang berdomisili di Kota Malang sekaligus Sekretaris Jenderal Majelis Rohani Nasional Baha'i. Ia juga berkarya di dunia akademik sebagai dosen di Program Magister Teknologi Pendidikan, Universitas Dr. Soetomo.

Iswan Sual, adalah ketua organisasi penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung. Saat ini ia dipercaya sebagai Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara

I Putu Yoga Bumi Pradana, adalah aktivis Perhimpunan Pemuda Hindu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pernah memimpin organisasi tersebut pada 2013-2019. Saat ini ia berkarya sebagai dosen di Departemen Administrasi Publik, Universitas Nusa Cendana

Vina Firmalia, aktif dalam kegiatan Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Depok. Selain itu ia juga merupakan aktivis organisasi masyarakat GusDurian Depok.

Endang Retno Lastani, merupakan penganut agama leluhur sekaligus Sekretaris Jenderal Paguyuban Penghayat Kapribaden.

Sri Lestari, adalah warga penganut agama leluhur sekaligus aktivis Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia (Puan Hayati) DKI Jakarta. Puan Hayati merupakan organisasi yang memperjuangkan hak-hak penganut agama leluhur atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terutama kaum perempuan.

Abdul Hakim Hasan, adalah aktivis Peace leader Indonesia sekaligus pendidik yang berkarya di SMP Lazuardi Al-Falah, Kota Depok. Ia juga adalah aktivis di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Depok.

Baihajar Tualeka, merupakan aktivis perdamaian Maluku yang menjadi inisiator Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN). Organisasi masyarakat sipil itu bertujuan untuk memfasilitasi pendidikan dan diskusi mendalam dan luas di antara umat Islam dan Kristiani di Ambon.

Cutra Sari, adalah seorang penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kota Depok. Ia memperoleh gelar doktor dari Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, adalah Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Kota Denpasar. Saat ini juga berkarya sebagai dosen di Program Studi Teologi Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.